

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN 2018



PEMERINTAH KOTA TANGERANG INSPEKTORAT

Jl. KS. Tubun No. 40 Telp. (021) 5527088, 5585342, Fax. : 5585342 Tangerang 15112
e-mail : inspektorat@tangerangkota.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2017

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Tangerang untuk Tahun Anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kota Tangerang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, handal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

INSPEKTUR KOTA TANGERANG

Drs. H. AAN MOHAMAD IKBAL
Pembina Utama Muda
NIP. 195905241986031010



Walikota Tangerang

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan syukur Alhamdulillahi Robbil 'Alamiin, kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat, Inayah dan Hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2017 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Pemerintah Kota Tangerang memuat informasi kinerja Pemerintah Kota Tangerang dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kota Tangerang pada tahun 2017.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Tangerang ini disusun, agar dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

Akhirnya, dalam rangka mewujudkan visi Kota Tangerang “TERWUJUDNYA KOTA TANGERANG YANG MAJU, MANDIRI, DINAMIS, DAN SEJAHTERA, DENGAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAKUL KARIMAH” perlu upaya yang terus-menerus dalam proses pembangunan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat Kota Tangerang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Tangerang, 27 Maret 2018



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	I-1
I.1 Latar Belakang.....	I-1
I.2 Kondisi Kota Tangerang.....	I-4
I.3 Kedudukan, Kewenangan Dan Tugas Pokok Serta Struktur Organisasi.....	I-19
I.4 Sistematika LKIP 2017	I-23
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	II-1
II.1 Rencana Strategis	II-1
II.2 Visi.....	II-2
II.3 Misi	II-3
II.4 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tangerang	II-6
II.5 Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD	II-8
II.6 Indikator Kinerja Utama	II-12
II.7 Perjanjian Kinerja Kota Tangerang Tahun 2017	II-16
II.8 Rencana Anggaran Tahun 2017	II-18
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017.....	III-1
III.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	III-2
III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama KOTA TANGERANG Tahun 2017.....	III-4
III.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	III-6
III.3.1 Sasaran 1	III-8
III.3.2 Sasaran 2	III-14
III.3.3 Sasaran 3	III-21

III.3.4	Sasaran 4.....	III-23
III.3.5	Sasaran 5	III-31
III.3.6	Sasaran 6.....	III-39
III.3.7	Sasaran 7	III-41
III.3.8	Sasaran 8.....	III-45
III.3.9	Sasaran 9	III-52
III.3.10	Sasaran 10.....	III-58
III.3.11	Sasaran 11.....	III-60
III.3.12	Sasaran 12.....	III-69
III.3.13	Sasaran 13.....	III-76
III.3.14	Sasaran 14.....	III-82
III.3.15	Sasaran 15	III-85
III.4	Realisasi Anggaran	III-96
III.5	Prestasi dan Penghargaan	III-100
BAB 4. PENUTUP		4-1

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

BAB I

Tabel 1.1.	PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014-2016.....	I-8
Tabel 1.2.	PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014-2016	I-9
Tabel 1.3.	Strukitur Perekonomian Kota Tangerang Berdasarkan Kelompok Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (Persen)	I-10
Tabel 1.4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2012 – 2016	I-11
Tabel 1.5.	PDRB Kota Tangerang Tahun 2012 - 2016.....	I-12
Tabel 1.6.	Perkembangan Inflasi Tahunan Tingkat Kota Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Periode 2014-2017	I-13
Tabel 1.7.	Komposisi Belanja Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)	I-14
Tabel 1.8.	Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Tangerang Tahun 2014-2016...I-14	
Tabel 1.9.	Indikator IPM Kota Tangerang Tahun 2014-2016.....	I-17

BAB II

Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tangerang 2014-2018	II-6
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang	II-12
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2017	II-17

BAB III

Tabel 3.1.	Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Tangerang Tahun 2017	III-4
Tabel 3.2.	Ketercapaian Indikator Sasaran Terhadap Target Tahun 2017	III-6
Tabel 3.3.	Capaian Kinerja Sasaran 1	III-8
Tabel 3.4.	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2017 (RpTrilyun)	III-12
Tabel 3.5.	Pendapatan Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2016	III-13

Tabel 3.6.	Capaian Kinerja Sasaran 2	III-14
Tabel 3.7.	Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2007-2016	III-18
Tabel 3.8.	Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tangerang 2014-2017	III-20
Tabel 3.9.	Capaian Kinerja Sasaran 3	III-22
Tabel 3.10.	Capaian Kinerja Sasaran 4	III-24
Tabel 3.11.	Realisasi Investasi PMDN dan PMA Berdasarkan Izin Usaha	III-25
Tabel 3.12.	Rekapitulasi Izin Usaha Tahun 2017	III-25
Tabel 3.13.	Jenis Perizinan di Kota Tangerang.....	III-27
Tabel 3.14.	Capaian Kinerja Sasaran 5	III-31
Tabel 3.15.	Realisasi dan Capaian Jumlah Kunjungan Wisatawan	III-32
Tabel 3.16.	Jumlah Pengunjung pada Event di Kota Tangerang	III-33
Tabel 3.17.	Data Kunjungan Culinary Night Tahun 2017	III-33
Tabel 3.18.	Lokasi dan Jumlah Sosdarwis	III-36
Tabel 3.19.	Jumlah Hotel dan Kelas Hotel di Kota Tangerang.....	III-37
Tabel 3.20.	Capaian Kinerja Sasaran 6	III-39
Tabel 3.21.	Capaian Kinerja Sasaran 7	III-41
Tabel 3.22.	Capaian Kinerja Sasaran 8	III-45
Tabel 3.23.	Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Tempat Buang Air Besar, Sumber Air Minum Utama, , dan Jenis Lantai Terluas di Kota Tangerang Tahun 2015	III-48
Tabel 3.24.	Capaian Kinerja Sasaran 9	III-52
Tabel 3.25.	Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Tangerang.....	III-53
Tabel 3.26.	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan (Rupiah) Tahun 2011-2016	III-57
Tabel 3.27.	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tangerang.....	III-57
Tabel 3.28.	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kota Tangerang.....	III-58
Tabel 3.29.	Capaian Kinerja Sasaran 10	III-58
Tabel 3.30.	Capaian Kinerja Sasaran 11	III-61
Tabel 3.31.	Kejadian dan Penanganan Konflik di Kota Tangerang Tahun 2017....	III-62
Tabel 3.32.	Capaian Kinerja Sasaran 12	III-69

Tabel 3.33.	Titik dan Luas Banjir dan Genangan Tahun 2016	III-70
Tabel 3.34.	Titik dan Luas Banjir dan Genangan tahun 2017	III-71
Tabel 3.35.	Capaian Kinerja Sasaran 14	III-83
Tabel 3.36.	RTLH terbangun Tahun 2017	III-83
Tabel 3.37.	Capaian Kinerja Sasaran 15	III-85
Tabel 3.38.	Hasil IPA Sungai Cisadane	III-87
Tabel 3.39.	Hasil IPA Sungai Mokevart	III-87
Tabel 3.40.	Hasil IPA Sungai Angke	III-87
Tabel 3.41.	Hasil IPA Sungai Sabi.....	III-88
Tabel 3.42.	Hasil IPA Sungai Cirarab.....	III-88
Tabel 3.43.	Hasil IPA Situ Cipondoh.....	III-88
Tabel 3.44.	Hasil IPA Situ Gede	III-89
Tabel 3.45.	Hasil IPA Situ Bulakan	III-89
Tabel 3.46.	Hasil IPA Situ Cangkring	III-89
Tabel 3.47.	Hasil Rekap IPA.....	III-89
Tabel 3.48.	Hasil Perhitungan Indeks Pencemaran Udara Tahun 2017	III-90
Tabel 3.49.	Hasil Perhitungan Indeks Tutupan Lahan (ITL) 2017	III-91
Tabel 3.50.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	III-91
Tabel 3.51.	Rata-rata Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2017	III-96
Tabel 3.52.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017	III-97
Tabel 3.53.	Komposisi Belanja Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)	III-98
Tabel 3.54.	Alokasi dan Realiasasi Anggaran berdasarkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2017	III-98

DAFTAR GAMBAR

BAB I

Gambar 1.1.	Peta Kota Tangerang	I-5
Gambar 1.2.	Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang Tahun 2012 – 2016 dan Perbandingannya dengan Provinsi Banten dan Nasional.....	I-11
Gambar 1.3.	Grafik Perkembangan Inflasi Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2014-2017	I-13
Gambar 1.4.	Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Tangerang 2014-2016	I-16
Gambar 1.5.	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Tangerang Tahun 2011-2016	I-16
Gambar 1.6.	Grafik Perkembangan IPG Kota Tangerang Periode Tahun 2011-2016	I-18

BAB III

Gambar 3.1.	Capaian IKU Kota Tangerang Tahun 2017	III-8
Gambar 3.2.	Capaian Nilai AKIP Kota Tangerang	III-19
Gambar 3.3.	Aplikasi Tangerang LIVE versi Android	III-22
Gambar 3.4.	Perkembangan Realisasi Kunjungan Wisatawan Tahun 2014-2017 .	III-31
Gambar 3.5.	Agenda Festival Cisadane Tahun 2017	III-33
Gambar 3.6.	Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata.....	III-34
Gambar 3.1.	Kontribusi PDRB ADHB Menurut Kategori Lapangan Usaha di Kota Tangerang (persen).....	III-39
Gambar 3.2.	Pertumbuhan Ekonomi kategori Industri Pengolahan pada PDRB ADHK Kota Tangerang 2012-2016.....	III-39
Gambar 3.3.	Perkembangan Indeks Pendidikan Kota Tangerang	III-40
Gambar 3.4.	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Tangerang	III-41
Gambar 3.5.	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kota Tangerang	III-42

Gambar 3.6. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Tangerang	III-45
Gambar 3.7. Analisis Derajat Kesehatan (Konsep Henrik L. Blum).....	III-46
Gambar 3.8. Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Kelahiran yang Terakhir di Kota Tangerang Tahun 2015.....	III-49
Gambar 3.9. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Tangerang	III-50
Gambar 3.10. Peta perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Tangerang	III-52
Gambar 3.11. Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Tangerang 2012-2016.....	III-54
Gambar 3.12. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tangerang Tahun 2014-2017	III-57
Gambar 3.13. Titik banjir dan genangan di kota Tangerang pada tahun 2016	III-68
Gambar 3.14. Jumlah Lokasi Titik Macet di Kota Tangerang (82 Titik)	III-77
Gambar 3.15. Jumlah Lokasi Titik Macet Yang Tertangani s,d 2017 (78 Titik).....	III-78
Gambar 3.16. Jumlah Lokasi Titik Macet Yang Tertangani Pada Tahun 2017 (5 Titik)	III-78
Gambar 3.17. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Tahun 2014-2017	III-90

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Kota Tangerang

Tahun 2017

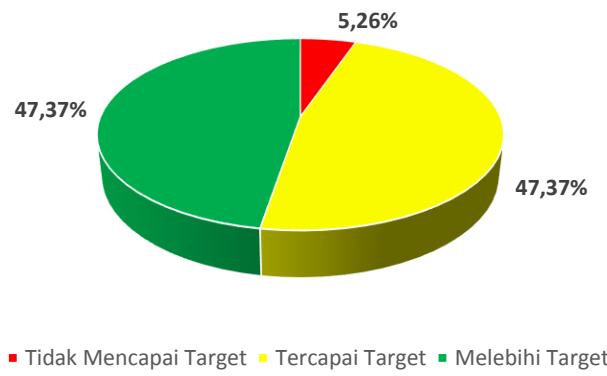
Pemerintah Kota Tangerang telah berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap SKPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2017 merupakan tahun keempat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018, dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 126 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2014 - 2018.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja utama dapat digambarkan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran strategis Pemerintah Kota Tangerang, 9 indikator melebihi target (47,37%), 9 indikator sesuai target (47,37%), dan 1 indikator tidak mencapai target (5,26%).



Dalam Tahun Anggaran 2017, untuk pencapaian kinerja 15 (lima belas) sasaran strategis pada RPJMD Kota Tangerang termasuk 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Tangerang yang dilaksanakan pada Badan, Dinas dan Kantor serta Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp3.147.259.638.089,38 dengan realisasi anggaran mencapai Rp2.371.341.237.591,00 atau 75,35% (data sebelum dilakukan audit oleh BPK).

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan dapat dikatakan berhasil jika mampu mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita yang diharapkan dengan menerapkan penyelenggaraan *good governance* yang didukung dengan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate. Agar “*good governance*” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, *private sector* dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya “*alignment*” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian penerapan konsep good governance penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama bagi masyarakat luas akan ketersediaan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan.

Konsep dasar akuntabilitas menekankan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada tiap lingkungan. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang



dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Berikutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden tersebut maka Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai, LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Bertitik tolak dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014 – 2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,



Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LKIP Tahun 2017 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tangerang yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Walikota kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKIP ini merupakan hasil pencapaian sasaran pada Tahun 2017.

Pelaksanaan penyusunan LKIP Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2017 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKIP, yaitu :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 10);
13. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 31).

I.2 KONDISI KOTA TANGERANG

I.2.1 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, wilayah Kota Tangerang terletak antara $6^{\circ}6'$ – $6^{\circ}13'$ Lintang Selatan (LS) dan $106^{\circ}36'$ – $106^{\circ}42'$ Bujur Timur (BT). Kota Tangerang berjarak ± 60 km dari Ibukota Provinsi Banten dan ± 27 km dari Ibukota Negara Republik Indonesia, DKI Jakarta. Hal ini menjadikan Kota Tangerang sedikit banyak mendapatkan dampak positif maupun negatif dari perkembangan Ibukota Negara. Pesatnya perkembangan Kota



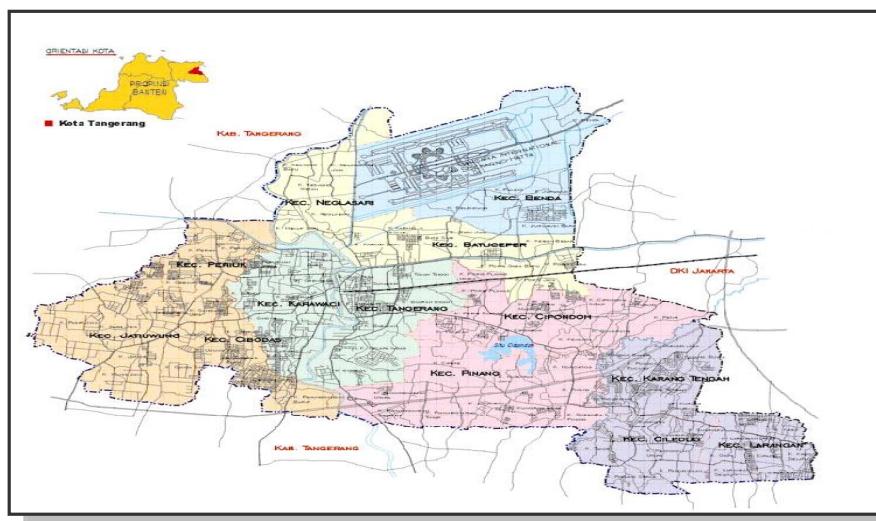
Tangerang didukung oleh tersedianya sistem jaringan transportasi terpadu dengan kawasan Jabodetabek, serta memiliki aksesibilitas yang baik terhadap simpul transportasi berskala nasional dan internasional, seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Pelabuhan Internasional Tanjung Priok, Pelabuhan Merak serta Pelabuhan Bojonegara. Letak geografis Kota Tangerang yang strategis tersebut telah mendorong pertumbuhan aktivitas industri, perdagangan dan jasa yang merupakan basis perekonomian Kota Tangerang saat ini.

I.2.2 Luas Dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kota Tangerang adalah 164,54 Km² (tidak termasuk luas Bandara Soekarno-Hatta sebesar 19,69 km²). Secara administrasi Kota Tangerang terdiri dari 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara* : Berbatasan dengan Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kosambi dan Kecamatan Sepatan Timur di Kabupaten Tangerang;
- Sebelah Selatan* : Berbatasan dengan Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua di Kabupaten Tangerang serta Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan Pondok Aren di Kota Tangerang Selatan;
- Sebelah Barat* : Berbatasan dengan Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Cikupa di Kabupaten Tangerang; dan
- Sebelah Timur* : Berbatasan dengan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan di Provinsi DKI Jakarta.

Gambar 1.1. Peta Kota Tangerang





I.2.3 Kondisi Topografi

Wilayah Kota Tangerang rata-rata berada pada ketinggian 10 – 18 meter di atas permukaan laut. Bagian Utara memiliki rata-rata ketinggian 10 meter di atas permukaan laut, sedangkan bagian Selatan memiliki ketinggian 18 meter di atas permukaan laut, seperti Kecamatan Ciledug dan Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Karang Tengah. Dilihat dari kemiringan tanahnya, sebagian besar Kota Tangerang mempunyai tingkat kemiringan tanah 0-3% dan hanya sebagian kecil di bagian Selatan kota kemiringan tanahnya antara 3-8%, yaitu berada di Kelurahan Parung Serab, Kelurahan Paninggilan Selatan dan Kelurahan Cipadu Jaya.

I.2.4 Aparat Pemerintah

Keadaan Aparat Pemerintah Kota Tangerang untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun 2017 sejumlah 8.458 orang, yang terdiri dari:

a. Jenis Kelamin

Laki-laki : 3.584 orang

Perempuan : 4.874 orang

b. Golongan

Golongan I : 158 orang

Golongan II : 1.580 orang

Golongan III : 4.528 orang

Golongan IV : 2.192 orang

c. Jabatan Struktural yang terdiri dari :

Esselon II : 33 orang

Esselon III : 164 orang

Esselon IV : 1067 orang

d. Jabatan fungsional yang terisi sebanyak 5.082 orang, terdiri atas :

1. Tenaga guru sebanyak 4.289 orang

2. Tenaga kesehatan sebanyak 593 orang

3. Analis Kepegawaian sebanyak 7 orang

4. Assessor SDM Aparatur sebanyak 6 orang

5. Auditor sebanyak 20 orang

6. P2UPD sebanyak 11 orang

7. Pengujji Kendaraan Bermotor sebanyak 8 orang

8. Perencana sebanyak 3 orang



9. Pranata Komputer sebanyak 21 orang
 10. Widyaishwara sebanyak 2 orang
 11. Pengawas Sekolah sebanyak 91 orang
 12. Penilik sebanyak 31 orang
- e. Tingkat Pendidikan :
- | | |
|------|---------------|
| SD | : 125 orang |
| SMP | : 143 orang |
| SLTA | : 1.176 orang |
| D1 | : 56 orang |
| D2 | : 450 orang |
| D3 | : 569 orang |
| D4 | : 76 orang |
| S1 | : 5.133 orang |
| S2 | : 719 orang |
| S3 | : 11 orang |

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Aparat Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan berbagai program melalui memberikan penghargaan, pendidikan, pelatihan teknis umum dan fungsional serta pemberian hukuman dan pembinaan.

- a. Pemberian penghargaan
- 1) Satyalancana dengan masa kerja 10, 20 tahun dan 30 tahun sejumlah 517 orang, yang terdiri dari :
 - ⇒ Satyalancana Karya Satya 30 Tahun sebanyak 165 orang.
 - ⇒ Satyalancana Karya Satya 20 Tahun sebanyak 101 orang.
 - ⇒ Satyalancana Karya Satya 10 Tahun sebanyak 251 orang.
 - 2) Pemberian Penghargaan Kenaikan Pangkat sejumlah 1.007 Orang
 - 3) Pemberian penghargaan Purna Tugas sebanyak 271 orang.
- b. Pendidikan Pelatihan yang meliputi :
- 1) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan sebanyak 0 orang.
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 92 orang, terdiri dari :
 - ⇒ Diklatpim II : 0 orang.
 - ⇒ Diklatpim III : 12 orang.
 - ⇒ Diklatpin IV : 80 Orang.



- 3) Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional melalui pengiriman pada lembaga pendidikan dan pelatihan sebanyak 1.744 orang, dengan rincian :
- ⇒ Pendidikan dan pelatihan teknis : 1.192 orang.
 - ⇒ Pendidikan dan pelatihan fungsional : 552 orang.

c. Pemberian Hukuman

Pelanggaran Disiplin Pegawai sebanyak 4 orang yang terdiri dari Pelanggaran disiplin pegawai tingkat ringan 0 orang, tingkat sedang 0 orang dan pelanggaran disiplin tingkat berat sebanyak 4 orang.

I.2.5 Perekonomian

I.2.5.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula. Nilai dan kontribusi sektoral (lapangan usaha) PDRB Kota Tangerang tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1. PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014-2016

Lapangan Usaha	2014		2015		2016	
	RpMilyar	%	RpMilyar	%	RpMilyar	%
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.533,55	1,39	1.736,20	1,39	1.904,07	1,40
B. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Industri Pengolahan	37.463,77	34,07	40.120,08	32,18	42.032,74	30,89
D. Pengadaan Listrik dan Gas	182,94	0,17	250,35	0,20	268,78	0,20
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	66,64	0,06	73,74	0,06	79,90	0,06
F. Konstruksi	7.855,12	7,14	8.643,22	6,93	9.266,13	6,81
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.379,28	11,26	13.099,18	10,51	13.640,58	10,02
H. Transportasi dan Pergudangan	28.532,18	25,95	36.417,97	29,21	42.102,75	30,94
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.499,67	1,36	1.691,12	1,36	1.856,20	1,36
J. Informasi dan Komunikasi	5.098,71	4,64	5.476,81	4,39	5.957,41	4,38
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.764,58	2,51	3.083,52	2,47	3.568,91	2,62
L. Real Estat	5.532,65	5,03	6.159,24	4,94	6.742,55	4,95
M,N. Jasa Perusahaan	1.045,63	0,95	1.216,57	0,98	1.349,04	0,99
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.254,78	1,14	1.443,11	1,16	1.609,43	1,18
P. Jasa Pendidikan	2.348,91	2,14	2.574,55	2,06	2.781,60	2,04



Lapangan Usaha	2014		2015		2016	
	RpMilyar	%	RpMilyar	%	RpMilyar	%
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	927,29	0,84	1.005,14	0,81	1.090,92	0,80
R,S,T,U. Jasa lainnya	1.470,37	1,34	1.685,93	1,35	1.834,42	1,35
PDRB ADHB Kota Tangerang	109.956,07	100,00	124.676,73	100,00	136.085,43	100,00

Sumber: BPS Kota Tangerang, 2017, *) angka sementara, **) angka sangat sementara

Tabel 1.2. PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014-2016

Lapangan Usaha	2014		2015		2016	
	RpMilyar	%	RpMilyar	%	RpMilyar	%
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.204,68	1,40	1.290,53	1,42	1.364,00	1,43
B. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Industri Pengolahan	34.007,79	39,46	35.049,96	38,60	36.037,67	37,69
D. Pengadaan Listrik dan Gas	158,71	0,18	157,08	0,17	174,62	0,18
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	66,99	0,08	70,48	0,08	75,39	0,08
F. Konstruksi	5.938,31	6,89	6.456,08	7,11	6.850,60	7,16
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.449,94	13,29	11.921,93	13,13	12.321,32	12,89
H. Transportasi dan Pergudangan	13.133,40	15,24	14.132,37	15,56	15.236,02	15,93
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.208,70	1,40	1.295,36	1,43	1.404,10	1,47
J. Informasi dan Komunikasi	6.083,28	7,06	6.666,41	7,34	7.243,73	7,58
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.228,70	2,59	2.409,29	2,65	2.707,06	2,83
L. Real Estat	5.312,63	6,16	5.615,61	6,18	6.051,16	6,33
M,N. Jasa Perusahaan	850,92	0,99	910,62	1,00	974,99	1,02
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	919,49	1,07	984,14	1,08	1.057,38	1,11
P. Jasa Pendidikan	1.769,86	2,05	1.891,04	2,08	2.028,28	2,12
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	767,46	0,89	796,83	0,88	847,99	0,89
R,S,T,U. Jasa lainnya	1.082,67	1,26	1.163,71	1,28	1.247,11	1,30
PDRB ADHK Kota Tangerang	86.183,53	100,00	90.811,44	100,00	95.621,42	100,00

Sumber: BPS Kota Tangerang, 2017, *) angka sementara, **) angka sangat sementara

Perkembangan pembangunan Kota Tangerang tidak terlepas dari peranan pemerintah yang menentukan prioritas pembangunannya sesuai dengan yang dimiliki Kota Tangerang. Dalam lingkup daerah, salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi yang diperlukan untuk evaluasi dan perencanaan ekonomi makro, dilihat dari pertumbuhan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).



Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari distribusi persentase PDRB kelompok lapangan usaha yang terdiri dari kelompok lapangan usaha primer, sekunder, dan tersier. Kelompok lapangan usaha primer terdiri dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian. Kelompok lapangan usaha sekunder terdiri dari lapangan usaha Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi. Dan Kelompok lapangan usaha tersier terdiri dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estat, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa lainnya

Tabel 1.3. Strukitur Perekonomian Kota Tangerang Berdasarkan Kelompok Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (Persen)

Kelompok	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
Primer	1,35	1,39	1,39	1,39	1,40
Sekunder	45,86	45,34	41,44	39,37	37,95
Tersier	52,79	53,27	57,16	59,24	60,65
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Tangerang, 2017, *) angka sementara, **) angka sangat sementara

Selama periode 2012-2016, perekonomian Kota Tangerang telah bergeser dari kelompok lapangan usaha sekunder ke kelompok lapangan usaha tersier yang terlihat dari kenaikan/penurunan peranan masing-masing kelompok lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Tangerang.

Pada tahun 2012, kelompok lapangan usaha sekunder memberikan sumbangan sebesar 45,86 persen, namun pada tahun 2016, menurun menjadi 37,95 persen. Sedangkan peningkatan kelompok lapangan usaha tersier, yang semula pada tahun 2012 berperan sebesar 52,79 persen, meningkat menjadi 60,65 persen pada tahun 2016. Kelompok lapangan usaha yang paling kecil peranannya dalam perekonomian Kota Tangerang adalah kelompok lapangan usaha primer.

I.2.5.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Kota Tangerang berusaha memaksimalkan potensi sumberdaya manusianya untuk mengolah potensi yang ada.



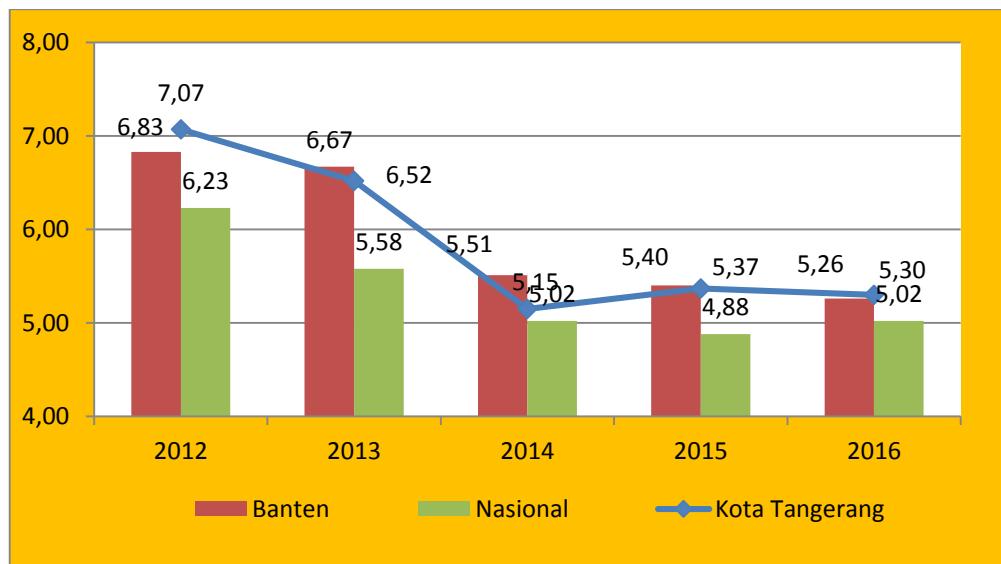
Pada tahun 2016 perekonomian Kota Tangerang mengalami perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini terlihat dari laju pertumbuhan PDRB Kota Tangerang tahun 2016 sebesar 5,30 persen, sedangkan tahun 2014 dan 2015 sebesar 5,15 persen dan 5,37 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 12,36 persen. Seluruh lapangan usaha ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2016 mencatat pertumbuhan yang positif.

Tabel 1.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2012 – 2016

Tahun	LPE (%)		
	Kota Tangerang	Provinsi Banten	Nasional
2012	7,07	6,83	6,23
2013	6,52	6,67	5,58
2014	5,15	5,51	5,02
2015	5,37	5,40	4,88
2016	5,30	5,26	5,02

Sumber: BPS, 2017

Gambar 1.2. Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang Tahun 2012 – 2016 dan Perbandingannya dengan Provinsi Banten dan Nasional



Sumber: BPS Kota Tangerang, Banten dan Pusat

Selama periode 2012-2016, laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Banten dan Tingkat Nasional. Hal ini



menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi makro secara regional Banten dan nasional.

Secara umum, pertumbuhan ekonominya cukup stabil terhadap gangguan/guncangan eksternal, baik dalam tataran global ataupun domestik. Pada tahun 2016, di tengah masih melemahnya perekonomian global dan domestik, Kota Tangerang tetap dapat mempertahankan LPE-nya di atas Provinsi Banten dan Nasional. Relatif stabilnya iklim perekonomian Kota Tangerang selama ini harus tetap dijaga dan dipelihara oleh semua pemangku kepentingan agar dapat mempertahankan laju pertumbuhan yang tinggi.

I.2.5.3 PDRB per Kapita

Untuk menunjukkan bagaimana suatu daerah memiliki potensi pembangunan dapat dilihat dari besaran pendapatan per kapitanya atau dalam hal ini diasumsikan sama dengan PDRB perkapita. Dengan mengetahui perubahan besaran PDRB per kapita ini maka suatu daerah dapat dikatakan menikmati hasil pembangunan untuk setiap penduduknya atau tidak. Dapat diartikan pula bila PDRB perkapita meningkat berarti pemerintah telah menjalankan fungsi pembangunannya dengan baik. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2016, secara agregat PDRB per kapita Kota Tangerang mencapai 65 juta rupiah, meningkat 6,72 persen bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 60,90 juta rupiah. Peningkatan tersebut tidak sebesar dengan peningkatan pada tahun sebelumnya, selama periode 2014-2015 berturut-turut sebesar 13,52 persen dan 10,77 persen.

Tabel 1.5. PDRB Kota Tangerang Tahun 2012 - 2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
PDRB per Kapita (Juta Rp)	43,92	48,43	54,98	60,90	65,00
Indeks Perkembangan PDRB per Kapita (2010=100)	118,69	130,89	148,58	164,59	175,65
Pertumbuhan PDRB per Kapita	7,70	10,28	13,52	10,77	6,72

Sumber: BPS Kota Tangerang, 2017, *) angka sementara, **) angka sangat sementara

I.2.5.4 Inflasi

Kota Tangerang selama periode 2014-2017 cenderung dapat mengendalikan tingkat inflasi tiap tahunnya. Pada tahun 2014, berada pada dua digit (10,03%), pada tahun selanjutnya 2015 sampai dengan 2017 Kota Tangerang dapat mengendalikan inflasi



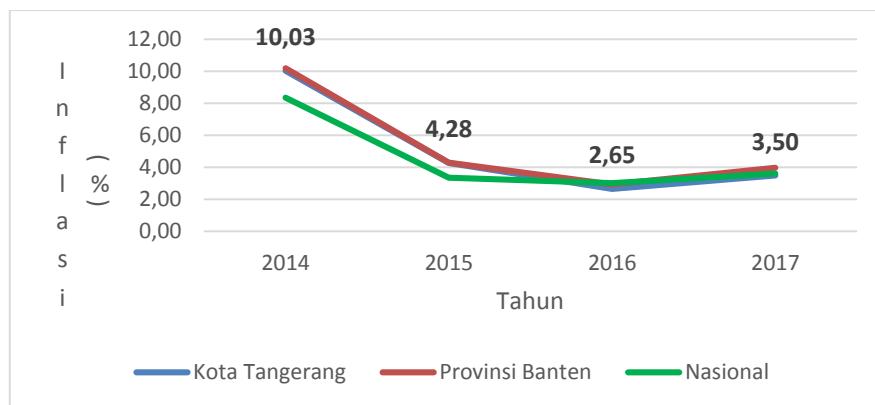
pada posisi satu digit, bahkan tingkat inflasi dibawah 5%. Inflasi sepanjang tahun 2017 dipengaruhi oleh harga-harga yang diatur pemerintah (*administered prices*), utamanya penyesuaian tarif listrik bagi golongan 900 Volt Ampere nonsubsidi. Rendahnya inflasi pada 2017 disebabkan upaya pemerintah dalam menjaga pergerakan harga pangan atau *volatile food*.

Tabel 1.6. Perkembangan Inflasi Tahunan Tingkat Kota Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Periode 2014-2017

Tahun	Inflasi (%)		
	Kota Tangerang	Provinsi Banten	Nasional
2014	10,03	10,20	8,36
2015	4,28	4,29	3,35
2016	2,65	2,94	3,02
2017	3,50	3,98	3,61

Sumber: BPS RI dan Provinsi Banten, 2017

Gambar 1.3. Grafik Perkembangan Inflasi Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2014-2017



I.2.6 Bidang Keuangan Daerah

Desentralisasi dipandang sebagai suatu usaha untuk melakukan reformasi dan revitalisasi baik ditingkat regional maupun ditingkat nasional. Salah satu dampak dari desentralisasi adalah adanya pengalihan tanggung jawab terhadap keuangan, administratif, pelayanan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga pertanggungjawaban atas pengelolaan potensi-potensi sumberdaya di daerah menjadi suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh seorang Kepala Daerah. Adanya penekanan terhadap aspek pertanggungjawaban (akuntabilitas) lebih ditegaskan dengan dikeluarkannya paket perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Salah satu azas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah aspek keterbukaan. Hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan akses



informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah seluas-luasnya kepada publik seperti menerbitkan laporan keuangan di media massa. Laporan keuangan yang memadai juga sangat dibutuhkan oleh para investor, baik investor asing maupun domestik. Laporan keuangan tersebut dapat menjadi sarana komunikasi bagi Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Belanja daerah Pemerintah Kota Tangerang pada tahun anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp4.491.146.524.148,69 dengan komposisi 29,92% belanja tidak langsung dan 70,08% belanja langsung sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.7. Komposisi Belanja Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

NO.	URAIAN	ANGGARAN BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	KOMPOSISI	
				ANGGARAN (%)	REALISASI (%)
1	Belanja Tidak Langsung	1.343.886.886.059,31	1.295.347.849.082,00	29,92	35,33
2	Belanja Langsung	3.147.259.638.089,38	2.371.341.237.591,00	70,08	64,67
	Jumlah	4.491.146.524.148,69	3.666.689.086.673,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2018

I.2.7 Bidang Sosial Budaya

I.2.7.1 Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk Kota Tangerang selama periode 2014-2016 cukup mengalami peningkatan yang signifikan. Jika pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Tangerang berjumlah 1.999.894 jiwa, kemudian mengalami peningkatan menjadi sebanyak 2.047.105 jiwa pada tahun 2015, atau mengalami perlambatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,36%. Pada tahun 2016, jumlah penduduk bertambah menjadi sebesar 2.093.706 jiwa, atau dengan laju pertumbuhan penduduk melambat menjadi 2,28%.

Tabel 1.8. Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Tangerang Tahun 2014-2016

URAIAN	2014	2015	2016	Peningkatan / Penurunan Periode 2015-2016 (%)
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.999.894	2.047.105	2.093.706	2,28
Rata-rata Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	12.154	12.441	12.724	2,27
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2,43	2,36	2,28	-0,08



URAIAN	2014	2015	2016	Peningkatan / Penurunan Periode 2015-2016 (%)
Komposisi Penduduk, menurut:				
a. Jenis Kelamin				
* Laki-laki (orang)	1.021.298	1.045.113	1.068.606	2,25
* Perempuan (orang)	978.596	1.001.992	1.025.100	2,31
b. Angkatan Kerja (orang)	1.001.174	992.091	1.065.744	7,42
* Jumlah yang bekerja (orang)	922.981	912.723	991.105	8,59
* Jumlah Pengangguran (orang)	78.193	79.368	74.639	-5,96
* Tingkat Pengangguran (%)	7,81	8,00	7,00	-1,00
c. Pendidikan (penduduk usia > 15 th dan Ijazah tertinggi)	922.981	1.527.560	1.584.512	3,73
* Tidak/Belum Tamat SD/sederajat (orang)	73.583	138.550	107.905	-22,12
* SD/MI/sederajat (orang)	137.249	272.364	280.934	3,15
* SLTP/MTs/sederajat (orang)	161.991	321.398	280.300	-12,79
* SLTA/sederajat (orang)	424.384	619.120	703.524	13,63
* Perguruan Tinggi (orang)	125.774	176.128	211.849	20,28

Sumber: BPS Kota Tangerang, 2017

Selain pertumbuhan penduduk secara alami (*fertilitas*), adanya migrasi masuk yang lebih besar dari migrasi keluar (migrasi netto positif) menyebabkan jumlah penduduk Kota Tangerang terus bertambah setiap tahun. Ditambah lagi peran Kota Tangerang sebagai penyangga ibukota DKI Jakarta menjadikan magnet bagi penduduk dari daerah lain untuk datang ke Kota Tangerang, baik yang bertujuan untuk menetap ataupun komuter. Penduduk yang semakin besar ini mendorong perubahan tatanan aspek-aspek kehidupan Kota Tangerang yang meliputi aspek sosial, ekonomi, spasial, pola demografis, dan sebagainya yang semakin kompleks. Besaran jumlah penduduk tersebut mendiami wilayah seluas 164,55 km², sehingga rata-rata kepadatan penduduk Kota Tangerang pada tahun 2016 adalah 12.724 jiwa per km². Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tangerang pada Tahun 2016 sebesar 2,28% atau mengalami perlambatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,08% jika dibandingkan dengan tahun 2015.

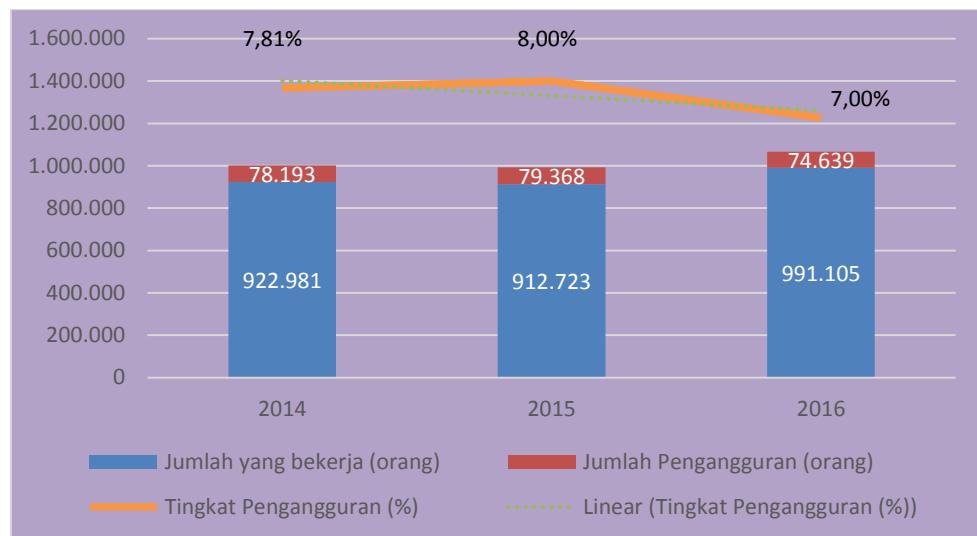
I.2.7.2 Tenaga Kerja

Jumlah angkatan kerja Kota Tangerang meningkat sebesar 7,42% selama periode tahun 2015-2016. Pada tahun 2015, angkatan kerja yang berada di Kota Tangerang tercatat sebanyak 992.091 orang dan meningkat menjadi 1.065.744 orang di tahun 2016. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka di Kota Tangerang di tahun 2015 yang sebesar



8%, mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi sebesar 7%. Pencapaian ini tentunya berkat kerjasama Pemerintah Kota Tangerang dan seluruh stakeholder terkait dalam meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan lapangan pekerjaan dalam rangka menurunkan pengangguran.

Gambar 1.4. Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Tangerang 2014-2016

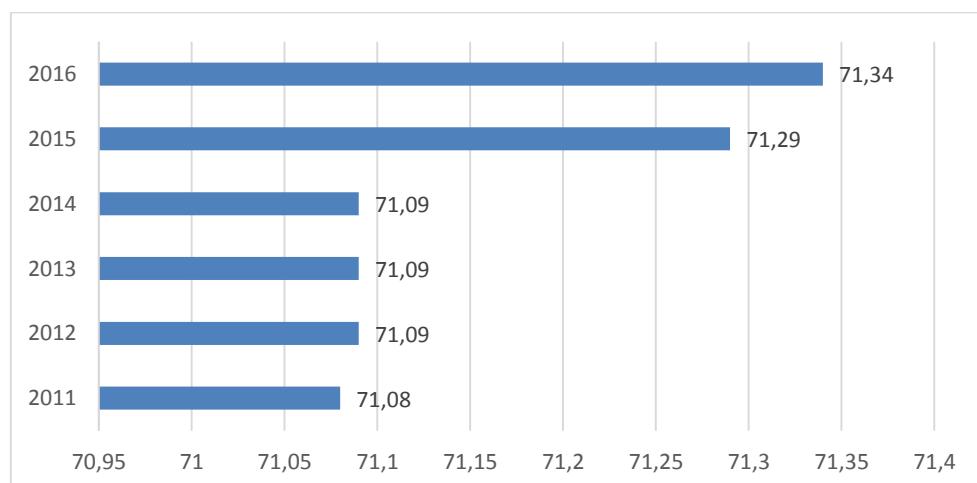


Sumber: BPS Kota Tangerang, 2017

I.2.7.3 Kesehatan

Aspek kesehatan merupakan unsur penting yang berkaitan dengan kapabilitas penduduk. Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari seberapa lama harapan hidup yang mampu dicapai. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya.

Gambar 1.5. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Tangerang Tahun 2011-2016



Sumber: BPS Kota Tangerang, 2017



Angka Harapan Hidup pada Tahun 2011 sebesar 71,08 tahun dan pada Tahun 2016 menjadi 71,34 tahun. Hal ini berarti menunjukkan penambahan sebesar 0,21 tahun atau terjadi peningkatan sebesar 36,58%.

I.2.7.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan daerah di Kota Tangerang diorientasikan untuk pembangunan manusia, yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar semua masyarakat Kota Tangerang memiliki kesejahteraan yang lebih baik dan memiliki pilihan yang lebih luas dalam menjalani kehidupan. Upaya tersebut dijabarkan melalui pelayanan dan fasilitasi akses yang lebih luas bagi penduduk untuk meningkatkan derajat kesehatan, memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, dan peluang untuk menaikkan taraf ekonomi rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan. Hasil upaya tersebut dapat tergambaran didalam perolehan Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut:

Tabel 1.9. Indikator IPM Kota Tangerang Tahun 2014-2016

No.	Uraian	2014	2015	2016
Komponen IPM				
1	Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,09	71,29	71,34
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,86	12,90	13,41
3	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	10,20	10,20	10,28
4	Pengeluaran per Kapita (Ribu Rp)	13.671	13.766	13.911
Indikator IPM				
1	Indeks Kesehatan	78,60	78,91	78,98
2	Indeks Pendidikan	69,72	69,83	71,52
3	Indeks Pengeluaran	79,69	79,90	80,22
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		75,87	76,08	76,81

Sumber: BPS Kota Tangerang, 2016

Perkembangan IPM Kota Tangerang selama ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2014 IPM Kota Tangerang sebesar 75,87, pada tahun 2015 meningkat menjadi 76,08, serta pada tahun 2016 meningkat lagi menjadi 76,81 poin. Hal ini berarti menunjukkan penambahan sebesar 0,94 poin atau terjadi peningkatan sebesar 1,24%. Peningkatan ini tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh stakeholder Kota Tangerang. Kenaikan IPM ini hendaknya menjadi pemacu peran serta yang nyata dari segenap komponen masyarakat Kota Tangerang agar diperoleh hasil yang lebih optimal lagi.



I.2.7.5 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

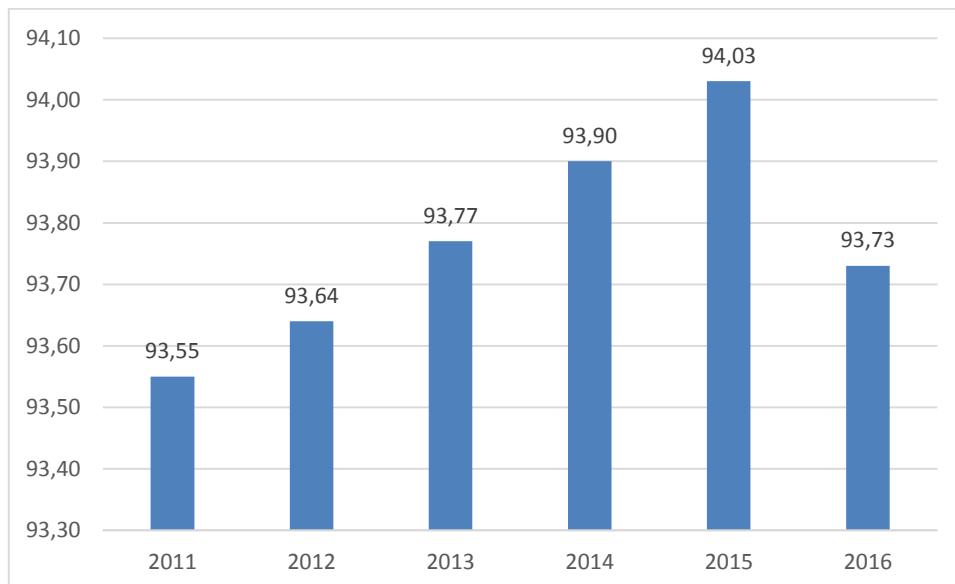
IPG mengukur ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kualitas hidup yang berbasis pada kapabilitas dasar. IPG merupakan indikator turunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipilah menurut laki-laki dan perempuan.

Titik berat pembangunan gender adalah pemberdayaan manusia tanpa membedakan gender sehingga mereka memiliki pilihan yang lebih luas dalam menjalani kehidupan.

Upaya tersebut dijabarkan melalui akses yang lebih luas bagi penduduk untuk meningkatkan derajat kesehatan, memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, dan peluang untuk menaikkan taraf ekonomi rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan.

Indeks Pembangunan Gender Kota Tangerang pada Tahun 2016 sebesar 93,73, mengalami penurunan dibanding tahun 2015. Nilai ini tergolong cukup baik, mendekati nilai ideal = 100. Artinya pencapaian pembangunan manusia di Kota Tangerang meskipun tinggi, namun masih terjadi ketidaksetaraan gender. Terdapat selisih 6,27 poin dari kondisi ideal. Berikut perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kota Tangerang.

Gambar 1.6. Grafik Perkembangan IPG Kota Tangerang Periode Tahun 2011-2016



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2017



I.3 KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN TUGAS POKOK SERTA STRUKTUR ORGANISASI

I.3.1 Kedudukan

Dengan diberlakukannya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih menekankan aspek desentralisasi yang diberikan dalam wujud otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Berkaitan dengan otonomi daerah dalam pelaksanaannya di Kota Tangerang dapat dijelaskan melalui 2 (dua) aspek, yaitu:

I.3.1.1 Aspek Politik

Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kota Tangerang dari aspek politik ditandai dengan program legislatif dalam membahas perubahan atas peraturan tentang struktur organisasi dan tata kerja dan kegiatan partai politik tingkat daerah dan DPRD sebagai mitra pemerintah daerah.

I.3.1.2 Aspek Administrasi/ Manajemen Pemerintah

Pemerintah Kota Tangerang dalam melaksanakan otonomi daerah secara administratif diawali dengan melakukan identifikasi kewenangan pemerintah daerah, penataan kelembagaan, penempatan personil, pengelolaan sumber keuangan daerah, pengelolaan sarana dan prasarana (aset daerah), dan manajemen pelayanan publik

I.3.2 Kewenangan

Kota Tangerang sebagai daerah otonomi, kewenangannya mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta konservasi dan standarisasi nasional.

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Tangerang menyelenggarakan 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 5 (lima) urusan pilihan untuk menyelenggarakan pengembangan sektor unggulan, serta menyelenggarakan Unsur penunjang Urusan Pemerintahan.



Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar:

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- 4) Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
- 5) Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
- 6) Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar:

- 1) Tenaga Kerja;
- 2) Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- 3) Pangan;
- 4) Pertanahan;
- 5) Lingkungan Hidup;
- 6) Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- 7) Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- 8) Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- 9) Perhubungan;
- 10) Komunikasi Dan Informatika;
- 11) Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah;
- 12) Penanaman Modal;
- 13) Kepemudaan Dan Olah Raga;
- 14) Statistik;
- 15) Persandian;
- 16) Kebudayaan;
- 17) Perpustakaan; Dan
- 18) Kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan:

- 1) Pertanian;
- 2) Pariwisata;
- 3) Kelautan Dan Perikanan;
- 4) Perdagangan; dan
- 5) Perindustrian.

Unsur penunjang Urusan Pemerintahan

- 1) Perencanaan;



- 2) Keuangan;
- 3) Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan; dan
- 4) Penelitian Dan Pengembangan.

I.3.3 Tugas Pokok

Pemerintah Kota Tangerang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud masyarakat Kota Tangerang yang maju, mandiri, dinamis, dan sejahtera, yang berakhlakul karimah.

I.3.4 Struktur Organisasi

Kota Tangerang sebagai salah satu daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Banten, secara yuridis formil didasarkan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Pada Tahun 2016 telah dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mengatur tentang pembentukan dan struktur organisasi serta tugas, pokok dan fungsi dari SKPD di Pemerintah Kota Tangerang. Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tersebut menjadi dasar pembentukan dan struktur organisasi, serta kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta rincian tugas SKPD. Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 terdiri atas:

A. Walikota dan Wakil Walikota

Kepala Daerah Kota Tangerang Periode Tahun 2013 – 2018 dipimpin oleh Walikota H. Arief R. Wismansyah dan Wakil Walikota H. Sachrudin.

Perangkat Daerah Kota Tangerang terdiri atas:

- B. Sekretariat Daerah
 - C. Sekretariat DPRD
 - D. Inspektorat
- E. Dinas Daerah, terdiri dari:

- 1) Dinas Pendidikan
- 2) Dinas Kesehatan
- 3) Dinas Pekerjaan Umum
- 4) Dinas Perumahan dan Permukiman
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja
- 6) Dinas Sosial
- 7) Dinas Ketenagakerjaan



-
- 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 9) Dinas Ketahanan Pangan
 - 10) Dinas Pertanahan
 - 11) Dinas Lingkungan Hidup
 - 12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 13) Dinas Perhubungan
 - 14) Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 15) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - 16) Dinas Koperasi dan UKM
 - 17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 18) Dinas Pemuda dan Olahraga
 - 19) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - 20) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
- F. Badan, terdiri dari:
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2) Badan Pengelola Keuangan Daerah
 - 3) Badan Pendapatan Daerah
 - 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- G. Perangkat Daerah lain, terdiri dari
- 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 2) Rumah Sakit Umum Daerah
 - 3) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- H. Kecamatan dan Kelurahan, terdiri dari:
- 1) Tangerang dengan 8 Kelurahan
 - 2) Jatiuwung dengan 6 Kelurahan
 - 3) Batuceper dengan 7 Kelurahan
 - 4) Benda dengan 5 Kelurahan
 - 5) Cipondoh dengan 10 Kelurahan
 - 6) Ciledug dengan 8 Kelurahan
 - 7) Karawaci dengan 16 Kelurahan
 - 8) Periuk dengan 5 Kelurahan
 - 9) Cibodas dengan 6 Kelurahan
 - 10) Neglasari dengan 7 Kelurahan



- 11) Pinang dengan 11 Kelurahan
- 12) Karang Tengah dengan 7 Kelurahan, dan
- 13) Larangan dengan 8 Kelurahan.

I.4 SISTEMATIKA LKIP 2017

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Pemerintah Kota Tangerang selama Tahun 2017. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2017 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Tangerang Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF, pada bagian ini menyajikan tujuan dan sasaran utama yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis maupun penetapan kinerja yang berpedoman pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014-2018, serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan hal-hal umum tentang organisasi,dasar hukum terbentuknya organisasi, tujuan terbentuknya organisasi, aspek strategis organisasi serta uraian singkat mandat apa yang dibebankan kepada organisasi (gambaran umum tupoksi) serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi dan potensi organisasi yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja, Pada bab ini menyajikan gambaran singkat mengenai: Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014-2018 dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran utama (yang menggambarkan fungsi utama organisasi) yang ingin diraih organisasi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi organisasi.



Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menyajikan uraian

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kota Tangerang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis/pembangunan daerah sesuai dengan hasil pengukuran organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi/penyerapan anggaran organisasi/OPD yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pemerintah Kota Tangerang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV – Penutup, menyajikan simpulan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa/tahun mendatang.

Lampiran – Lampiran, penjelasan lebih lanjut yang tidak diuraikan dalam badan teks laporan.



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

II.1 RENCANA STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena demikian, pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dalam bab ini menyajikan secara singkat mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014-2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2017, termasuk menyajikan gambaran singkat sasaran utama (yang menggambarkan fungsi utama organisasi) yang ingin diraih organisasi pada tahun yang bersangkutan serta kaitannya dengan capaian visi dan misi organisasi.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), RPJM merupakan rencana strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Hal ini memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain, yang diharapkan akan dapat memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan dan dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun global.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistik dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran



keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi, dan strategi tersebut, diharapkan instansi pemerintah akan selaras dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi.

II.2 VISI

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah.

Berdasarkan kondisi Kota Tangerang pada saat ini, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki serta berpedoman pada Visi Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2005-2025 yang termuat dalam RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005 - 2025 yaitu:

“KOTA INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA YANG MAJU DAN LESTARI BERLANDASKAN AKHLAKUL KARIMAH”, dengan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Maju dan Berdaya Saing.
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing.
3. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Asri dan Lestari.
4. Mewujudkan Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kota yang Memadai dan Berdaya Saing.
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Walikota dan Wakil Walikota Tangerang periode 2014-2018 mempunyai visi sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA KOTA TANGERANG YANG MAJU, MANDIRI,
DINAMIS, DAN SEJAHTERA, DENGAN MASYARAKAT YANG
BERAKHLAKUL KARIMAH”**

Pernyataan visi di atas mempunyai makna sebagai berikut:

Terwujudnya Kota Tangerang Yang Maju

Terwujudnya Kota Tangerang yang maju dalam berbagai hal, melalui pemberian pelayanan terbaik dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan tata kelola perkotaan yang berorientasi lingkungan.



Terwujudnya Kota Tangerang Yang Mandiri

Terwujudnya Kota Tangerang yang mandiri, melalui pembangunan yang dilakukan dengan memaksimalkan segenap potensi daerah yang dimiliki untuk mendorong tumbuhnya rasa percaya diri pada segenap masyarakat dan seluruh stakeholder untuk bersama-sama dan ikut bertanggung jawab dalam kelangsungan pembangunan daerah.

Terwujudnya Kota Tangerang Yang Dinamis

Terwujudnya Kota Tangerang yang dinamis yaitu kehidupan yang berkesinambungan dengan mengikuti era perkembangan jaman dengan tetap menjaga mencerminkan kehidupan masyarakat Kota Tangerang yang meskipun berbeda latar belakang etnis dan budaya, namun memiliki semangat kebersamaan dan nasionalisme berbasis kedaerahan, tenggang rasa dan tanggung jawab, sikap toleransi yang universal dalam membangun Kota Tangerang.

Terwujudnya Kota Tangerang Yang Sejahtera

Terwujudnya Kota Tangerang yang sejahtera, melalui perwujudan masyarakat Kota Tangerang yang sejahtera yaitu memiliki tatanan kehidupan yang baik dan berkualitas sehingga terbentuk kehidupan masyarakat yang makmur dan berkeadilan, dan menjadikan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan daerah.

Terwujudnya Masyarakat Yang Berakhhlakul karimah

Terwujudnya masyarakat Kota Tangerang yang memiliki akhlakul karimah, yaitu terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap dan perilaku akhlak mulia yang dicerminkan melalui kualitas hubungan antar manusia dengan Tuhan dan hubungan antar manusia itu sendiri, dan menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat yang religius, demokratis, mandiri, berkualitas sehat jasmani dan rohani, serta tercukupi kebutuhan material spiritual, sehingga mampu mewujudkan sebuah masyarakat madani (madaniyyah) dan hidup menuju negeri yang adil, makmur, dan diberkati (*baldatun toyibatun warabbun ghafur*).

II.3 MISI

Misi pembangunan daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Untuk pencapaian visi sebagaimana telah dikemukakan tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) pernyataan misi Pemerintah Kota Tangerang. Misi tersebut sekaligus merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Tangerang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi



pemerintahan. Misi pembangunan Kota Tangerang Tahun 2014-2018 berdasarkan misi Walikota dan Wakil Walikota Tangerang yang terpilih adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional

Pelaksanaan pembangunan akan berjalan dengan optimal apabila ditunjang oleh tata pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan. Perwujudan tata pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan didukung dengan struktur birokrasi aparatur yang profesional, kompetensi, berkualitas, transparansi, objektifitas, dan bebas dari intervensi politik dan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) berintegritas, kompeten, dan professional. Melalui Tangerang LIVE yang salah satunya adalah E-CITY, pengembangan Kota Tangerang sebagai E-CITY terus dilakukan secara bertahap. Mulai dari pembuatan aplikasi, website hingga penerapan kepada pegawai Kota Tangerang seperti E-Government, E-Kesehatan, E-Pendidikan, E-Logistik dan E-Pengadaan, E-SPTPD, Akta Kelahiran Online, Pencaker Online, ATCS Dishub, Simpati RSUD dll. Dengan dibuatnya Tangerang Live Room (TLR) yang menghimpun seluruh aplikasi yang ada, maka pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat lagi.

Misi 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat kemajuan Kota Tangerang, yang dilakukan dengan memajukan kegiatan ekonomi yang menjadi sektor unggulan, seperti perdagangan dan jasa, industry, dan memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM) sehingga mampu bersaing, serta memperluas kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, dan mengentaskan kemiskinan. Apalagi dengan adanya program *Investable (kota layak investasi)* diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Berbagai kemudahan terus diberikan Pemerintah Kota Tangerang untuk menarik investor menanamkan modalnya di Kota Tangerang yang sedang bertransformasi menjadi Kota Seribu Industri-Sejuta Jasa. Program-program yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang untuk mendukung kearah itu seperti layanan BPHTB Online, SIUP dan TDP Online. Kemudahan perijinan merupakan salah satu point dasar dalam menarik investor kesuatu daerah. Bila selama ini izin investasi harus menunggu waktu lama, tetapi hal itu tak berlaku lagi di Kota Tangerang. Birokrasi yang rumit dan lama akan berdampak pada malasnya investor menanamkan modalnya di suatu daerah.



Misi 3 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing diera globalisasi

Pengembangan kualitas pendidikan dan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan masyarakat yang berdaya saing, kualitas kehidupan masyarakat Kota Tangerang yang ditunjang dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan sumber daya manusia, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan, serta faktor pendukung lainnya. Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, Pemerintah Kota Tangerang menyediakan layanan informasi mengenai pendidikan dan kesehatan secara online.

Misi 4 : Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas

Penyediaan dan peningkatan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas mutlak diperlukan sekaligus dapat untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dalam rangka mendukung berlangsungnya kegiatan ekonomi dan investasi secara produktif. Sarana perkotaan merupakan faktor penunjang bagi kegiatan ekonomi Kota Tangerang.

Misi 5 : Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman

Peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan untuk mendukung dalam rangka melaksanakan salah satu pilar pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman serta seimbang antara lain dapat mengintegrasikan faktor lingkungan hidup dengan ekonomi dan sosial budaya, dapat menciptakan kondisi kemajuan yang seimbang antara peningkatan aspek sosial dan ekonomi dengan kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah Kota Tangerang dalam mewujudkan Kota Sehat, bersih dan nyaman telah mengalokasikan anggaran disetiap OPD untuk enam tatanan menuju Kota yang sehat, bersih dan nyaman yaitu : pertama untuk sarana dan prasarana (urusan Pekerjaan Umum, LH dan Kebersihan), kedua tatanan kehidupan masyarakat sehat dan mandiri (urusan perbaikan gizi, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan lainnya), ketiga ketahanan pangan dan gizi (urusan ketahanan pangan, kesehatan, pertanian, perikanan dan perkebunan), keempat kehidupan sosial yang sehat (urusan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, pembinaan penyandang cacat dan trauma), kelima yaitu kawasan



tertib lalu lintas dan pelayanan transportasi yang berkaitan dengan perhubungan dan pekerjaan, keenam yakni industri dan perkantoran sehat.

II.4 TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA TANGERANG

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut dilakukan perubahan atas tujuan dan sasaran strategis RPJMD Kota Tangerang 2014-2018 dan menetapkan sebanyak 7 (tujuh) tujuan dan 34 (tiga puluh empat) sasaran. Berikut rincian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tangerang 2014-2018

Misi		Tujuan		Sasaran	
1	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional	1.1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, inovatif, dan akuntabel (good governance)	1.1.1	Terwujudnya penataan pertanahan
				1.1.2	Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
				1.1.3	Terwujudnya sistem dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik
				1.1.4	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
				1.1.5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi
				1.1.6	Terwujudnya aparatur yang profesional
				1.1.7	Terwujudnya statistik dan persandian yang berkualitas
				1.1.8	Terwujudnya perencanaan serta penelitian dan pengembangan pembangunan yang berkualitas
				1.1.9	Terwujudnya kearsipan yang berkualitas
		1.2	Mengembangkan e-government berbasis teknologi informasi sebagai pendukung pelaksanaan sistem penyelenggaraan, pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik	1.2.1	Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi
2	Meningkatkan pertumbuhan	2.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	2.1.1	Terwujudnya keberdayaan UMKM dan Koperasi sebagai pendukung perekonomian



Misi	Tujuan	Sasaran		
	ekonomi yang berdaya saing tinggi	dengan memantapkan sinergitas antar sektor perekonomian	2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6	Terwujudnya peningkatan investasi dan kemudahan perijinan Terwujudnya ketahanan pangan yang memadai dan berkualitas Meningkatnya kepariwisataan Terwujudnya perdagangan yang berkualitas serta peningkatan perlindungan konsumen Terwujudnya industri yang maju
3	Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi	3.1 Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan beserta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya yang layak, memadai, dan berkualitas	3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10 3.1.11	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan Meningkatnya aksesibilitas kesehatan Terwujudnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Terwujudnya keluarga sejahtera melalui keluarga berencana Terwujudnya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial Terwujudnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja Terwujudnya peningkatan pengelolaan dan pelestarian kebudayaan daerah Terwujudnya kepemudaan dan keolahragaan yang mandiri dan berprestasi Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepolitikan dan hukum Terwujudnya peningkatan keberdayaan masyarakat Terwujudnya peningkatan kesadaran dan kegemaran membaca masyarakat
4	Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas	4.1 Meningkatkan sistem pengendalian banjir yang memadai 4.2 Mengembangkan sistem transportasi perkotaan yang modern dan terpadu	4.1.1 4.2.1 4.2.2	Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan Terwujudnya jaringan jalan dan sarana pendukungnya yang mantap Terwujudnya pelayanan tansportasi perkotaan terpadu
5	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang	5.1 Meningkatkan kualitas penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup dan	5.1.1 5.1.2 5.1.3	Terwujudnya peningkatan penanggulangan bencana Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak Terwujudnya penataan ruang wilayah yang berkualitas



Misi	Tujuan		Sasaran	
bersih, sehat, dan nyaman		penanggulangan bencana	5.1.4	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup

II.5 SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN RPJMD

No.	Sasaran	Indikator Sasaran		
		Uraian		Satuan
1.1.1	Terwujudnya penataan pertanahan	1	Persentase luas lahan bersertifikat	%
		2	Persentase kasus tanah pemda/negara yang diselesaikan	% per tahun
1.1.2	Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1	Persentase penerbitan kartu keluarga	%
		2	Persentase penerbitan kartu tanda penduduk	%
		3	Persentase penerbitan kutipan akta kelahiran	%
		4	Persentase penerbitan kutipan akta kematian	%
		5	Persentase Pasangan Suami-Isteri Ber-Akta Nikah	%
1.1.3	Terwujudnya sistem dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Poin
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada SKPD pelayanan Publik	Poin
		3	Persentase Raperda yang disetujui DPRD	%
1.1.4	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	1	Jumlah pendapatan daerah	Rp. Triliun
		2	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)	Rp. Triliun
		3	Persentase pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	%
1.1.5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	1	Persentase Hasil temuan yang ditindak lanjuti	%
		2	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP/ WDP/ TMP
		3	Nilai evaluasi AKIP pemerintah daerah	A, BB, B, CC, C, D
		4	Persentase SKPD yang memiliki nilai "B" hasil evaluasi SAKIP	%
1.1.6	Terwujudnya aparatur yang profesional	1	Persentase Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) diatas 75	%
		2	Jumlah Pegawai yang terkena hukuman disiplin	Orang
1.1.7		1	Persentase publikasi data statistik daerah berbasis website	%



No.	Sasaran	Indikator Sasaran	
		Uraian	Satuan
	Terwujudnya statistik dan persandian yang berkualitas	2 Persentase penggunaan persandian untuk pengamanan aplikasi	%
1.1.8	Terwujudnya perencanaan serta penelitian dan pengembangan pembangunan yang berkualitas	1 Persentase output kegiatan yang tercapai	%
		2 Persentase indikator sasaran yang tercapai	%
		3 Persentase Keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD	%
		4 Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	%
		5 Persentase Keselarasan Renja SKPD dan RKPD	%
		6 Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir (RKPD)	%
		7 Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan strategis dalam perencanaan pembangunan	% per tahun
1.1.9	Terwujudnya kearsipan yang berkualitas	1 Persentase SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku	%
1.2.1	Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	1 Persentase penyediaan aplikasi perijinan online	%
		2 Persentase integrasi aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah	%
2.1.1	Terwujudnya keberdayaan UMKM dan Koperasi sebagai pendukung perekonomian	1 Jumlah UMKM yang melakukan kegiatan usaha	Unit
		2 Persentase koperasi yang melakukan kegiatan usaha	%
2.1.2	Terwujudnya peningkatan investasi dan kemudahan perijinan	1 Jumlah penanaman modal (investasi)	Rp. Triliun
		2 Persentase perizinan tepat waktu	%
2.1.3	Terwujudnya ketahanan pangan yang memadai dan berkualitas	1 Jumlah Cadangan Pangan	Ton
		2 Produksi padi	Kw
		3 Produksi sayuran	Kw
		4 Produksi Buah-buahan	Kw
		5 Produksi tanaman bio farmaka	kg
		6 Produksi Daging	Ton
2.1.4	Meningkatnya kepariwisataan	1 Jumlah kunjungan wisatawan	Orang
		2 Rata-rata lama kunjungan wisatawan (Rata-rata lama menginap di hotel)	Hari
2.1.5	Terwujudnya perdagangan yang berkualitas serta peningkatan perlindungan konsumen	1 Persentase Alat Ukur yang terstandar	%
		2 Persentase pasar tradisional yang bersih	%



No.	Sasaran	Indikator Sasaran	
		Uraian	Satuan
2.1.6	Terwujudnya industri yang maju	1	Persentase industri yang memiliki standar
		2	Nilai PDRB sektor industri (ADHK)
		3	Persentase IKM memiliki produk sertifikasi halal
3.1.1	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	1	Indeks pendidikan
		2	Harapan lama sekolah
		3	Rata-rata lama sekolah
		4	Angka melek huruf penduduk usia >15 tahun
3.1.2	Meningkatnya aksesibilitas kesehatan	1	Indeks kesehatan
		2	Angka harapan hidup
		3	Jumlah Kematian Ibu
		4	Jumlah Kematian Bayi
		5	Prevalensi Penyakit (Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru Tuberkolosis)
		6	Persentase balita gizi buruk (BB/TB)
3.1.3	Terwujudnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1	Indeks pembangunan gender
		2	Indeks pemberdayaan gender
		3	Jumlah kekerasan terhadap anak
3.1.4	Terwujudnya keluarga sejahtera melalui keluarga berencana	1	Persentase pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif
		2	Persentase posyandu yang melaksanakan kegiatan sebulan sekali
3.1.5	Terwujudnya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial	1	Persentase penurunan PMKS
		2	Persentase Penanganan PMKS
3.1.6	Terwujudnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja	1	Tingkat Pengangguran Terbuka
		2	Jumlah lowongan kerja
3.1.7	Terwujudnya peningkatan pengelolaan dan pelestarian kebudayaan daerah	1	Persentase pelestarian cagar budaya daerah
		2	Jumlah pagelaran budaya kota.
3.1.8	Terwujudnya kepemudaan dan keolahragaan yang mandiri dan berprestasi	1	Persentase organisasi pemuda yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi kepemudaan
		2	Persentase organisasi olahraga yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi keolahragaan
		3	Jumlah atlet berprestasi tingkat Provinsi
3.1.9	Terwujudnya peningkatan kesadaran	1	Persentase penyelesaian konflik Suku, Agama, Ras dan Adat (SARA)



No.	Sasaran	Indikator Sasaran	
		Uraian	Satuan
	masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepoltikan dan hukum	2 Persentase penyelesaian penegakan perda	%
3.1.10	Terwujudnya peningkatan keberdayaan masyarakat	1 Persentase kelompok masyarakat aktif	%
3.1.11	Terwujudnya peningkatan kesadaran dan kegemaran membaca masyarakat	1 Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah	Orang
4.1.1	Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan	1 Luas genangan dan banjir	Ha
4.2.1	Terwujudnya jaringan jalan dan sarana pendukungnya yang mantap	1 Persentase kondisi jalan kota yang mantap	%
		2 Persentase keterhubungan pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat produksi di wilayah kota	%
4.2.2	Terwujudnya pelayanan tansportasi perkotaan terpadu	1 Persentase kemacetan yang tertangani	%
		2 Jumlah koridor angkutan umum masal yang beroperasi	Koridor
5.1.1	Terwujudnya peningkatan penanggulangan bencana	1 Persentase penanggulan bencana	%
		2 Jumlah penanganan korban bencana	Orang
5.1.2	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak	1 Backlog rumah	%
		2 Persentase rumah layak huni	%
		3 Luas lingkungan permukiman kumuh	Ha
		4 Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih	%
		5 Persentase penduduk yang terlayani jaringan air limbah	%
5.1.3	Terwujudnya penataan ruang wilayah yang berkualitas	1 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%
5.1.4	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	U,SB,B,C,K,SK,W
		2 Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%
		3 Persentase pengurangan sampah di perkotaan	%



II.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pelaksanaan penyelarasan terhadap sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Tangerang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan terutama indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kota Tangerang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota Tangerang Nomor 126 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2014 - 2018, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang

Misi 1: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan professional

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
1	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)	Rp. Triliun	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD) yang diterima oleh Pemerintah Kota Tangerang.	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) dan Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP/ WDP/ TMP	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD)	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
		Nilai evaluasi AKIP pemerintah daerah	A, BB, B, CC, C, D	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kota Tangerang	Sekretariat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Kota Tangerang diukur sesuai dengan Permenpan No. 25/2012 tentang Pedoman atas Implementasi SAKIP serta perubahannya
3	Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	Persentase integrasi aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah	%	Jumlah sistem informasi dan aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah terintegrasi dibagi Jumlah sistem informasi dan aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang ada	Dinas Komunikasi dan Informatika	Integrasi sistem merupakan proses membangun suatu kesatuan sistem informasi dari komponen-komponen perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan yang berbeda

Misi 2: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
4	Terwujudnya peningkatan investasi dan kemudahan perijinan	Jumlah penanaman modal (investasi)	Rp. Triliun	Jumlah nilai penanaman modal (investasi) PMA dan PMDN	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP)	
		Persentase perizinan tepat waktu	%	Jumlah perijinan yang diterbitkan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku dibagi Jumlah permohonan perijinan yang memenuhi syarat lengkap sesuai peraturan berlaku	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP)	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) menargetkan seluruh pelayanan izin sesuai waktu sehingga target yang harus dicapai adalah 100%
5	Meningkatnya kepariwisataan	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Tangerang	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Kunjungan Wisatawan terdiri dari Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
		Rata-rata lama kunjungan wisatawan (Rata-rata lama menginap di hotel)	Hari	Jumlah lamanya hari tamu yang menginap di hotel (hari) dibagi Jumlah tamu yang menginap di hotel (orang)	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	
6	Terwujudnya industri yang maju	Nilai PDRB sektor industri (ADHK)	Rp. Milyar	Nilai PDRB Atas Harga Konstan 2010 pada sektor industri pengolahan	BPS, Dinas Perindustrian dan, Perdagangan	Sektor industri pengolahan merupakan lapangan usaha terbesar yang berperan dalam perekonomian Kota Tangerang.

Misi 3: Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
7	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	Indeks pendidikan	Point	Indeks pendidikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indeks Pendidikan atau Indeks Pengetahuan adalah penggabungan dua indikator pendidikan, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
8	Meningkatnya aksesibilitas kesehatan	Indeks kesehatan	Point	Indeks Kesehatan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	BPS, Dinas Kesehatan	Indeks Kesehatan atau Indeks harapan hidup didapat dari angka harapan hidup, digunakan untuk mengukur pembangunan di bidang kesehatan. Meningkatnya angka harapan hidup dapat berarti adanya perbaikan pembangunan di bidang kesehatan



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
9	Terwujudnya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial	Persentase penurunan PMKS	%	Jumlah PMKS tahun n dikurang Jumlah PMKS tahun n-1 dibagi Jumlah PMKS tahun n-1 kali 100 persen	Dinas Sosial	Berdasarkan Permenses RI No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
		Persentase penduduk miskin	%	Jumlah penduduk miskin (berdasarkan garis kemiskinan) dibagi jumlah penduduk Kota Tangerang kali 100 persen	BPS, Dinas Sosial	Garis Kemiskinan Kota Tangerang sebesar Rp455.228 per kapita/ bulan
10	Terwujudnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	Jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan dibagi jumlah angkatan kerja kali 100 persen	BPS, Dinas Ketenagakerjaan	Angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan adalah mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja, atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
11	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepoltikan dan hukum	Persentase penyelesaian konflik Suku, Agama, Ras dan Adat (SARA)	%	Jumlah penyelesaian konflik SARA yang difasilitasi dibagi Jumlah konflik SARA yang terjadi	Kantor Kesbang dan Politik Dalam Negeri	

Misi 4: Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
12	Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan	Luas genangan dan Banjir	Ha	Luas genangan dan banjir di wilayah Kota Tangerang	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya air	Penanganan banjir sampai tuntas sehingga luas genangan dan banjir di wilayah Kota Tangerang akan berkurang
13	Terwujudnya pelayanan transportasi perkotaan terpadu	Persentase kemacetan yang tertangani	%	Jumlah titik kemacetan yang ditangani dibagi jumlah titik kemacetan di ruas jalan Kota Tangerang kali 100 persen	Dinas Perhubungan	Semakin banyak titik kemacetan yang tertangani maka kondisi lalu lintas semakin lancar

Misi 5: Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
14	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak	Persentase rumah layak huni	%	Jumlah rumah layak huni dibagi Total jumlah rumah yang ada	Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang	Permendagri 54 Tahun 2010
15	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	(U, SB, B, C, K, SK, W)	Nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Badan Lingkungan Hidup	ukuran utama untuk Sasaran Pokok Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019 dan RPJMD Kota Tangerang 2014-2018

II.7 PERJANJIAN KINERJA KOTA TANGERANG TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk



menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Tanerang Tahun 2017 mengacu pada dokumen RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2017, dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2017. Pemerintah Kota Tangerang telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2017

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Misi 1				
1	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)	Rp. Triliun	1,633
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP/ WDP/ TMP	WTP
		Nilai evaluasi AKIP pemerintah daerah	A, BB, B, CC, C, D	CC
3	Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	Persentase integrasi aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah	%	81,72

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Misi 2				
4	Terwujudnya peningkatan investasi dan kemudahan perijinan	Jumlah penanaman modal (investasi)	Rp. Triliun	6,13
		Persentase perizinan tepat waktu	%	100,00
5	Meningkatnya kepariwisataan	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	354.773
		Rata-rata lama kunjungan wisatawan (Rata-rata lama menginap di hotel)	Hari	1,95
6	Terwujudnya industri yang maju	Nilai PDRB sektor industri (ADHK)	Rp Miliar	38.931,05

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Misi 3				
7	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	Indeks pendidikan	Point	70,25
8	Meningkatnya aksesibilitas kesehatan	Indeks kesehatan	Point	79,04



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
9	Terwujudnya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial	Persentase penurunan PMKS	%	3,11
		Persentase penduduk miskin	%	4,91
10	Terwujudnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,27
11	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepolitikan dan hukum	Persentase penyelesaian konflik Suku, Agama, Ras dan Adat (SARA)	%	100,00

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Misi 4				
12	Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan	Luas genangan dan Banjir	Ha	230
13	Terwujudnya pelayanan tansportasi perkotaan terpadu	Persentase kemacetan yang tertangani	%	93,00

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Misi 5				
14	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak	Persentase rumah layak huni	%	99,42
15	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	(U, SB, B, C, K, SK, W)	SK

II.8 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2017

Selama tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kota Tangerang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang yang berada pada SKPD kinerja yang diperjanjikan oleh Walikota Tangerang, dengan total belanja langsung sebesar Rp3.147.259.638.089,38.

Anggaran Belanja Langsung merupakan bagian dari APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017, komposisi belanja APBD Kota Tangerang, sebagai berikut:

No	Uraian	Rencana Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.343.886.886.059,31	29,92
2	Belanja Langsung	3.147.259.638.089,38	70,08
	Jumlah	4.491.146.524.148,69	100,00

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kota Tangerang selaku pengembang amanah masyarakat Kota Tangerang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Tangerang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2014-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahun 2017, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Prosentase	Predikat
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai/Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target



III.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Metodologi dalam Pengukuran kinerja mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pmerintah.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *Core Area* Kota Tangerang sebagai kota industri serta pusat pelayanan jasa terpadu di bidang perdagangan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam pengukuran capaian kinerja sasaran bisa jadi ditemui kinerja sasaran tidak tercapai secara maksimal. Dalam pengukuran sasaran, bagi kepentingan manajemen dilakukan penghitungan rata-rata atas setiap capaian indikator sasaran.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- 1) Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Tingkat Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Tingkat Pencapaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan pengukuran kinerjanya, maka untuk menggambarkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini, ditetapkan suatu skala pengukuran ordinal pencapaian kinerja berdasarkan kriteria yang tercantum dalam Tabel VII-C Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:



Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1. $91\% \leq 100\%$ atau lebih	: Sangat Tinggi
2. $76\% \leq 90,99\%$: Tinggi
3. $66\% \leq 75,99\%$: Sedang
4. $51\% \leq 65,99\%$: Rendah
5. $\leq 50,99\%$: Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

➤ Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), dan hasil (outcomes).

➤ Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.



III.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA TANGERANG TAHUN 2017

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2017 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Tangerang berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Tangerang Tahun 2017

MISI 1 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2017		
			Target	Realisasi	%
1	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)	Rp. Triliun	1,63	1,86	113,90
2	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP/ WDP/ TMP	WTP	WTP	100,00
3	Nilai evaluasi AKIP pemerintah daerah	A, BB, B, CC, C, D	CC	B	133,33
4	Persentase integrasi aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah	%	81,72	86,67	106,06

MISI 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2017		
			Target	Realisasi	%
5	Jumlah penanaman modal (investasi)	Rp. Triliun	6,13	7,68	125,29
6	Persentase perizinan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00
7	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	354.773	1.088.700	306,87
8	Rata-rata lama kunjungan wisatawan (Rata-rata lama menginap di hotel)	Hari	1,95	1,96	100,51
9	Nilai PDRB sektor industri (ADHK*)	Rp Miliar	37.400,57	36.037,67	96,20

*) Target dan Realisasi Tahun 2016



MISI 3 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing diera globalisasi

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2017		
			Target	Realisasi	%
10	Indeks pendidikan*)	Point	70,04	71,51	102,11
11	Indeks kesehatan*)	Point	78,98	78,98	100,00
12	Persentase penurunan PMKS	%	3,11	3,11	100,00
13	Persentase penduduk miskin*)	%	4,94	4,94	100,00
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,27	7,16	101,51
15	Persentase penyelesaian konflik Suku, Agama, Ras dan Adat (SARA)	%	100,00	100,00	100,00

*) Target dan Realisasi Tahun 2016

MISI 4 : Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2017		
			Target	Realisasi	%
16	Luas genangan dan Banjir	Ha	230	230	100,00
17	Persentase kemacetan yang tertangani	%	93,00	95,12	102,28

MISI 5 : Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2017		
			Target	Realisasi	%
18	Persentase rumah layak huni	%	99,42	99,42	100,00
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	(U, SB, B, C, K, SK, W)	SK	SK	100,00

Hasil dari capaian tersebut didukung pula dengan program prioritas daerah di Kota Tangerang yang telah ditetapkan dan merupakan kesinambungan substansi program-program yang sudah berjalan pada periode sebelumnya serta mempertimbangkan janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota Tangerang.

Program-program pembangunan lima tahunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Tangerang 2014-2018, yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri



Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pencapaian kinerja terhadap Janji Walikota dan Wakil Walikota diuraikan dalam sub bab pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang relevan.

III.3 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Pembahasan capaian kinerja kebijakan dan strategi Pemerintah Kota Tangerang untuk mewujudkan pencapaian Misi secara terukur sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014-2018, lebih lanjut diuraikan berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2017.

Dalam laporan ini, Pemerintah Kota Tangerang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2014-2018 maupun RKPD Tahun 2017. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Tangerang Tahun 2017, RPJMD Perubahan Tahun 2014-2018 dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 126 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2014-2018, telah ditetapkan 15 (lima belas) sasaran dengan 19 (Sembilan belas) indikator kinerja (*out comes*) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2. Ketercapaian Indikator Sasaran Terhadap Target Tahun 2017

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Keterangan
Misi 1. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Akuntabel, Dan Transparan, Didukung Dengan Struktur Birokrasi Yang Berintegras, Kompeten, Dan Profesional				
1	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	1	124,00	Melebihi Target
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	2	116,67	1 Melebihi Target dan 1 Tercapai Target

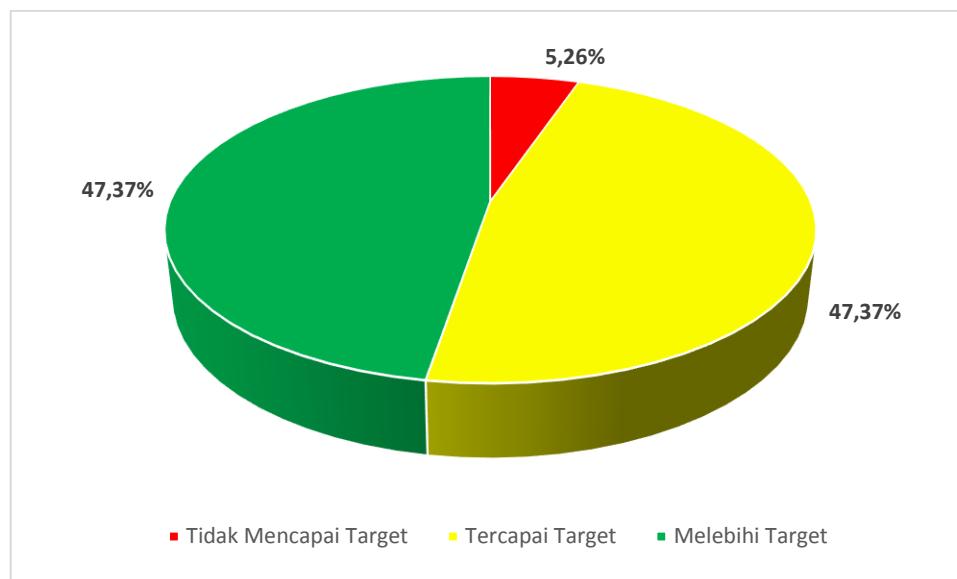


No.	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Keterangan
3	Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	1	106,06	Melebihi Target
Misi 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berdaya Saing Tinggi				
4	Terwujudnya peningkatan investasi dan kemudahan perijinan	2	112,64	1 Melebihi Target dan 1 Tercapai Target
5	Meningkatnya kepariwisataan	2	191,90	2 Melebihi Target
6	Terwujudnya industri yang maju	1	96,20	Tidak Mencapai Target
Misi 3 : Mengembangkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Dan Kesejahteraan Sosial Demi Terwujudnya Masyarakat Yang Berdaya Saing Di Era Globalisasi				
7	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	1	102,11	Melebihi Target
8	Meningkatnya aksesibilitas kesehatan	1	100,00	Tercapai Target
9	Terwujudnya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial	2	100,00	2 Tercapai Target
10	Terwujudnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja	1	101,51	Melebihi Target
11	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepoltikan dan hukum	1	100,00	Tercapai Target
Misi 4 : Meningkatkan Pembangunan Sarana Perkotaan Yang Memadai Dan Berkualitas				
12	Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan	1	100,00	Tercapai Target
13	Terwujudnya pelayanan tansportasi perkotaan terpadu	1	102,28	Melebihi Target
Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Yang Bersih, Sehat, Nyaman				
14	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak	1	100,00	Tercapai Target
15	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	1	100,00	Tercapai Target



Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran di atas dapat digambarkan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran strategis Pemerintah Kota Tangerang, 9 indikator melebihi target (47,37%), 9 indikator sesuai target (47,37%), dan 1 indikator tidak mencapai target (5,26%).

Gambar 3.1. Capaian IKU Kota Tangerang Tahun 2017



Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2017 yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran adalah sebagai berikut:

III.3.1 SASARAN 1

Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			2017			2018 (Akhir RPJMD)	
		2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	Target	%
Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)	Rp. Triliun	1,26	1,47	1,59	1,63	1,86	113,90	1,53	111,58



Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan dalam wilayah Kota Tangerang, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD memegang peranan yang sangat penting dalam membiayai program pembangunan Pemerintah Kota Tangerang.

Peningkatan PAD mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang agar mampu membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya dapat menjadi mandiri.

Pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan, terdiri atas:

- A. Pajak daerah;
- B. Retribusi daerah;
- C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- D. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah.

Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dikenakan pajak. Pajak daerah berkontribusi paling besar tehadap PAD, tahun 2014 sebesar 83,33%, tahun 2015 sebesar 79,59%, tahun 2016 sebesar 82,39% dan tahun 2017 sebesar 84,11%.

Pajak daerah yang merupakan sumber penerimaan yang menjadi tumpuan Pemerintah Kota Tangerang, pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah..

Pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Tangerang meliputi 9 jenis pajak, yaitu:

- a) Pajak Hotel;
- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan;
- d) Pajak Reklame;



- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Parkir;
- g) Pajak Air Tanah;
- h) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan; dan
- i) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Objek retribusi :

- a. Jasa umum;
- b. Jasa usaha; dan
- c. Perizinan tertentu.

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jenis Retribusi Jasa Umum yang dikelola Pemerintah Kota Tangerang adalah:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- e) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha yang dikelola Pemerintah Kota Tangerang adalah:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b) Retribusi Terminal;



- c) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- d) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus: dan
- e) Retribusi Rumah Potong Hewan.

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dikelola Pemerintah Kota Tangerang adalah:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b) Retribusi Izin Gangguan/Keramaian;
- c) Retribusi Izin Trayek; dan
- d) Retribusi Izin Mempekerjakan Tanaga Asing.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, yaitu Deviden Bank BJB, Deviden PDAM dan Deviden PD Pasar.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b) penerimaan jasa giro;
- c) Pendapatan bunga deposito;
- d) Tuntutan ganti kerugian daerah;
- e) pendapatan denda pajak;
- f) Penerimaan lain-lain;
- g) Dana Kapitasi JKN; dan
- h) Pendapatan dari BLUD.



Tabel 3.4. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2017 (RpTrilyun)

PAD	2014		2015		2016		2017	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pajak Daerah	0,95	1,05	1,06	1,17	1,2	1,31	1,26	1,56
Retribusi Daerah	0,07	0,07	0,08	0,09	0,07	0,07	0,06	0,07
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Lain-lain PAD yang Sah	0,12	0,12	0,14	0,2	0,16	0,2	0,31	0,20.
Jumlah	1,16	1,26	1,29	1,47	1,44	1,59	1,64	1,84

Sumber: BPKD Kota Tangerang, 2018

PAD selama 4 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup baik, dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terlihat pada tahun 2014 sebesar Rp1,26 trilyun, tahun 2015 sebesar Rp1,47 trilyun, tahun 2016 sebesar Rp1,59 trilyun, dan tahun 2017 sebesar Rp1,84 trilyun. Dengan kata lain selama kurun waktu 4 tahun telah mengalami peningkatan atau bertambah sebesar Rp0,58 trilyun atau meningkat sebesar 46,03%.

Upaya yang telah dilakukan

- a) Pendataan potensi wajib pajak baru;
- b) Penurunan reklame kain yang belum membayar pajak;
- c) Penempelan stiker/baliho segel terhadap media reklame yang belum berizin dan membayar pajak;
- d) Penyampaian surat teguran belum menyampaikan laporan omzet;
- e) Pemuthakhiran data wajib pajak (checker);
- f) Pemeriksaan pajak daerah;
- g) Penagihan tunggakan pajak daerah;
- h) Penyegelan terhadap wajib pajak daerah yang belum membayar pajak;
- i) Penempelan stiker lunas pajak reklame.



Permasalahan

- a) Belum optimalnya intensifikasi pemungutan pajak daerah khususnya pemeriksaan pajak daerah karena kurangnya tenaga pemeriksa pajak;
- b) Belum tersedianya tenaga IT untuk melaksanakan pemeliharaan aplikasi sistem pajak daerah.

Upaya yang akan dilakukan

- a) Optimalisasi pemungutan Pajak Daerah, yang dilaksanakan melalui:
 1. Pendataan potensi wajib pajak baru;
 2. Penurunan reklame kain yang belum membayar pajak;
 3. Penempelan stiker/baliho segel terhadap media reklame yang belum berizin dan membayar pajak;
 4. Penyampaian surat teguran belum menyampaikan laporan omzet;
 5. Pemuthakhiran data wajib pajak (checker);
 6. Pemeriksaan pajak daerah;
 7. Penagihan tunggakan pajak daerah;
 8. Penyegelan terhadap wajib pajak daerah yang belum membayar pajak;
 9. Penempelan stiker lunas pajak reklame;
 10. Pemeliharaan Sistem Pajak Daerah untuk meningkatkan aplikasi sistem pajak online;
 11. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak;
 12. Peningkatan pelayanan pajak online berupa laporan omzet secara online dan pembayaran secara online;
 13. Melakukan rapat koordinasi terkait pajak penerangan jalan dengan PT. PLN Disjaya dan PT. PLN Disbanten per triwulan.
- b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan pajak daerah.

Tabel 3.5. Pendapatan Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2016

Pendapatan Daerah	2014		2015		2016		2017			
	Rp Triliyun	Kontri busi	Rp Triliyun	Kontri busi	Rp Triliyun	Kontri busi	Target		Realisasi	
							Rp Triliyun	Kontri busi	Rp Triliyun	Kontri busi
PAD	1,26	41,72	1,47	43,49	1,59	46,9	1,65	45,45	1,86	49,08



Pendapatan Daerah	2014		2015		2016		2017			
	Rp Trilyun	Kontri busi	Rp Trilyun	Kontri busi	Rp Trilyun	Kontri busi	Target		Realisasi	
							Rp Trilyun	Kontri busi	Rp Trilyun	Kontri busi
Dana Perimbangan	1,09	36,09	1,06	31,36	1,25	36,87	1,35	37,19	1,32	34,83
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,67	22,19	0,85	25,15	0,55	16,22	0,63	17,36	0,61	16,09
Jumlah	3,02	100	3,38	100	3,39	100	3,63	100	3,79	100

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2018

Dilihat dari struktur Pendapatan Daerah selama 4 tahun terakhir menunjukkan bahwa kontribusi paling besar dalam pembentuk Pendapatan Daerah Kota Tangerang adalah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada Tahun 2016, kontribusi PAD sebesar 46,90%; disusul Dana Perimbangan sebesar 36,87%; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 16,22%. Kemudian jika ditelusuri lebih lanjut, kontribusi PAD mengalami tren peningkatan; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah relatif stabil. Hal ini tentunya berimplikasi pada menurunnya kontribusi Dana Perimbangan, dari 45,88% pada tahun 2013, dan terus menurun hingga 36,87% pada tahun 2016.

III.3.2 SASARAN 2

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6. Capaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			2017			2018 (Akhir RPJMD)	
		2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	Target	%
Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP/ WDP/ TMP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	WTP	100,00



Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			2017			2018 (Akhir RPJMD)	
		2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai evaluasi AKIP pemerintah daerah	A, BB, B, CC, C, D	CC	CC	CC	CC	B	133,33	B	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran							116,67		100,00

Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2017, melalui 2 indikator kinerja adalah sebesar 116,67%, dengan kategori **Sangat Tinggi**, telah tercapai kinerja sampai akhir RPJMD Tahun 2018.

Beberapa informasi penting setiap indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

III.3.2.1 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang merupakan target kinerja yang harus dicapai berdasarkan amanat dari RPJPD Kota Tangerang. Sasaran meningkatkannya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dengan indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Tahun 2017 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara, BPK bertanggung jawab pada pernyataan pendapat/opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan secara independen dan dengan integritas tinggi, sedangkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan merupakan tanggung jawab entitas. Empat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK yaitu sebagai berikut:

Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion)

Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau biasa disingkat WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada



kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Selain opini WTP ada pula opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan atau biasa disingkat WTP-DPP. Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkannya paragraf penjelasan, misalnya adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi. Selain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal.

Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion)

Opini Wajar dengan pengecualian atau biasa disingkat WDP adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Tidak wajar (adverse opinion)

Opini Tidak Wajar atau biasa disebut TW adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer of opinion)

Opini Tidak Menyatakan Pendapat atau biasa disebut TMP diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa



jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW.

Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak.

Dalam rangka pemenuhan target indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan akuntabilitas SKPD, dilakukan kuatifikasi pengukuran dengan formulasi sebagai berikut :

- ❖ Apabila mendapatkan “Tidak Memberikan Pendapat (TMP)”, diberikan nilai 1 (satu);
- ❖ Apabila mendapatkan opini “Disclaimer”, maka nilainya adalah 2 (dua);
- ❖ Apabila mendapatkan opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP), maka nilainya 3 (tiga); dan
- ❖ Apabila mendapatkan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP), maka nilainya adalah 4 (empat).

Berdasarkan press release BPK-RI Perwakilan Provinsi Banten, tanggal 31 Mei 2017, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2016 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang merupakan opini WTP yang kesembilan kali secara berturut-turut diperoleh Pemerintah Kota Tangerang.

Pemberian opini WTP tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Banten dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 di Kantor Perwakilan BPK-RI Provinsi Banten pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017. Sebagaimana diketahui opini WTP merupakan penghargaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia. Sehingga penghargaan yang diraih untuk kesembilan kalinya tanpa putus tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Tangerang dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Apalagi Pemerintah Kota Tangerang menjadi satu-satunya pemerintah daerah yang telah mendapat opini WTP berbasis akrual tiga kali secara berturut-turut di Provinsi Banten, setelah Pandeglang yang juga telah menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual sejak tahun 2014 dengan



mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Tahun Anggaran 2015 dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Tahun Anggaran 2016.

Tabel 3.7. Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2007-2016

No.	Pemda	Opini Tahun									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Prov. Banten	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	TMP	TMP	WDP	WTP
2.	Kab. Lebak	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
3.	Kab. Pandeglang	WDP	WDP	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP	TMP	WDP	WTP
4.	Kab. Serang	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	Kab. Tangerang	WDP	WTP								
6.	Kota Cilegon	WDP	WDP	WDP	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	Kota Serang	-	WDP								
8.	Kota Tangerang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	Kota Tangerang Selatan	-	-	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP

Pada Tahun 2017, target yang ditetapkan Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah WTP atau nilai 4 (empat). Realisasi capaian target kinerja Pemerintah Kota Tangerang untuk opini BPK-RI atas LKPD Tahun 2016 mendapatkan opini WTP atau mendapatkan point (4) sesuai dengan LHP No.20c/LHP/XVIII.SRG/05/2017 dari BPK-RI. Sehingga penghitungan pencapaian target untuk indikator dimaksud adalah : WTP (4) / WTP (4) x 100% atau sama dengan 100%, artinya capaian target indikator kinerja dimaksud dapat tercapai%.

Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Tangerang tetap menargetkan untuk bisa memperoleh opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017, sehingga dapat mempertahankan sampai dengan sebelas kali berturut-turut.

Upaya yang telah dilakukan

- Memberikan pemahaman dan meningkatkan kuantitas maupun kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah;



- b) Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah serta mengintegrasikan dengan aplikasi lainnya yang terkait.

Permasalahan

- a) Pengelolaan dan pengisian dokumen sumber belum seluruhkan dilaksanakan dengan tertib;
- b) Pengelolaan data transaksi aset dan keuangan belum seluruhkan dilaksanakan dengan tertib;
- c) Pemahaman akan pentingnya menjaga konsistensi data belum sepenuhnya terbangun;
- d) Pemahaman sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah belum merata;
- e) Perbedaan pengaturan dalam pelaksanaan keuangan daerah oleh pemerintah pusat menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan.

Upaya yang akan dilakukan

Memberikan pemahaman dan meningkatkan kuantitas maupun kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah.

III.3.2.2 Nilai Evaluasi AKIP Pemerintah Daerah

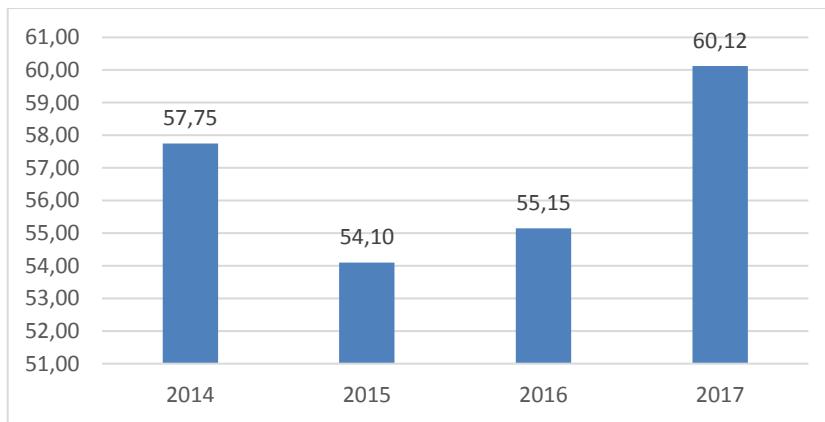
Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Nilai Evaluasi AKIP Kota diukur sesuai dengan Permenpan No. 12/2015 tentang Pedoman Atas Implementasi SAKIP.

Dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Tangerang tahun 2017 adalah 60,12 atau kategori B telah melebihi target target RPJMD pada tahun 2017 adalah CC dan target B merupakan target akhir RPJMD Tahun 2018. Atas capaian tersebut maka kinerja akuntabilitas Kota Tangerang tahun 2016 adalah melebihi target. Capaian tersebut naik sebesar 4,96 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Tangerang sudah menunjukkan hasil yang baik.

Gambar 3.2. Capaian Nilai AKIP Kota Tangerang



Sumber: Bappeda Kota Tangerang, 2018

Untuk melihat perkembangan capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Tangerang sejak tahun 2014 meliputi meliputi 5 komponen AKIP sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.8. Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tangerang 2014-2017

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	2014	Bobot	2015	2016	2017	
							Nilai	% Kinerja Komponen Berdasarkan Bobot
a.	Perencanaan Kinerja	35	19,07	30	19,83	19,83	21,39	71,30
b.	Pengukuran Kinerja	20	12,11	25	10,96	11,35	14,32	57,28
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,02	15	9,08	9,42	9,00	60,00
d.	Evaluasi Internal	10	5,90	10	4,31	3,75	4,96	49,60
e.	Capaian Kinerja	20	11,65	20	9,92	10,81	10,45	52,25
	Nilai Hasil Evaluasi		57,75		54,10	55,16	60,12	
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC		CC	CC	B	

Sumber: Bappeda Kota Tangerang, 2018



Dari data tersebut di atas diperoleh gambaran hasil evaluasi LKIP Kota Tangerang Tahun 2017, secara umum terdapat peningkatan pada seluruh komponen SAKIP dibandingkan tahun 2016, kecuali komponen Pelaporan Kinerja yang mengalami penurunan. Sedangkan, Komponen Evaluasi Internal menempati posisi kinerja terendah sebesar 49,60% dan kinerja tertinggi pada komponen perencanaan kinerja sebesar 71,30%.

Hasil evaluasi tersebut menunjukan:

- a) Pemerintah Kota Tangerang di Tahun 2017 telah mulai memperbaiki sistem manajemen kinerja, yang ditunjukkan dengan komitmen pemimpin daerah bersama dengan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memperbaiki Indikator Kinerja Utama (IKU), Renstra, dan Perjanjian Kinerja pada level Kota dan OPD.
- b) Penjabaran sasaran strategis dan indikator kinerja telah dilakukan sampai level eselon IV namun belum merata di seluruh OPD dan penjabarannya belum seluruhnya didasarkan pada kinerja organisasi dan level diatasnya. Indikator kinerja level eselon III dan IV juga belum seluruhnya terukur dan mendukung tercapainya sasaran pada unit organisasi diatasnya.
- c) Pengukuran kinerja instansi dan OPD belum menggunakan aplikasi manajemen kinerja untuk memudahkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian target kinerja.
- d) Evaluasi atas program yang dilakukan oleh Bappeda baru sebatas pelaksanaan program dan penyerapan anggarannya dan belum kepada hasil program. Sehingga masih dijumpai ketidakselarasan antara kegiatan dan hasil program dengan peran yang diemban oleh OPD.

Rekomendasi / Upaya Perbaikan

- a) Melanjutkan penyempurnaan pada kualitas IKU di seluruh OPD dan menjabarkan kinerja (*cascade down*) dari level Walikota sampai ke individu pegawai.
- b) Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU. Hasil reviu ini harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan.



- c) Menggunakan aplikasi manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi oleh pimpinan, dan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.

III.3.3 SASARAN 3

Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi

Tabel 3.9. Capaian Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			2017			2018 (Akhir RPJMD)	
		2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase integrasi aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah	%	28,28	45,52	71,00	81,72	86,67	106,06	100,00	86,67

Pemerintah Kota Tangerang terus melakukan berbagai inovasi dalam pengembangan integrasi aplikasi, keberadaan aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat serta dalam rangka meningkatkan Pemerintahan yang bersih dan transparan salah satunya adalah tercapainya Smartcity.

Jumlah aplikasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang telah terbangun tahun 2017 sebanyak 170 aplikasi (sumber : aplikasi.tangerangkota.go.id). Dari 5 (lima) kelompok integrasi aplikasi yang terdiri dari e-Pemerintahan (10 aplikasi), e-Pendidikan (1 aplikasi), e-Kesehatan (1 aplikasi), e-Pengadaan (2 aplikasi) dan e-Logistik (1 aplikasi), sudah terlaksana 13 (tiga belas) aplikasi terintegrasi, yaitu :

1. e-Planning;
2. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD);
3. Sistem Informasi Evaluasi dan Pelaporan (SIEVLAP);
4. Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah (SIPBD);
5. Sistem Informasi Kepegawaian Daerah (SIKDA);
6. Sistem Informasi Petugas Lapangan (SIGAP);
7. Aplikasi Portal eGov;
8. Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan (SIAP);
9. Aplikasi e-Office;



10. Dashboard LIVE;
11. Sistem Informasi Statistik Daerah (SISTAD);
12. Sistem Pengelolaan, Penatausahaan, dan Pelaporan Keuangan Kota Tangerang (SP3KTRA);
13. Aplikasi e-Audit.

Gambar 3.3. Aplikasi Tangerang LIVE versi Android



Permasalahan

- a) Aplikasi yang ada dibangun dengan menggunakan platform teknologi yang berbeda;
- b) Belum adanya tenaga ahli yang profesional dalam bidang integrasi multi platform;
- c) Masih adanya aplikasi yang belum terintegrasi.

Upaya yang telah dilakukan

- a) Melakukan pemetaan terhadap platform aplikasi yang berbeda;
- b) Melakukan integrasi terhadap beberapa aplikasi.

Upaya yang akan dilakukan

- a) Menyusun regulasi tentang standarisasi platform aplikasi;
- b) Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya ASN di bidang TIK;
- c) Melakukan Re-Desain aplikasi;



- d) Melakukan Kegiatan Integrasi Aplikasi dan Database e-Government dan Layanan Publik, untuk mempercepat lintas sektoral antar OPD yang satu dengan yang lain.

III.3.4 SASARAN 4

Terwujudnya peningkatan investasi dan kemudahan perijinan

Tabel 3.10. Capaian Kinerja Sasaran 4

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			2017			2018 (Akhir RPJMD)	
		2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	Target	%
Jumlah penanaman modal (investasi)	Rp. Triliun	4,28	5,07	6,86	6,13	7,68	125,29	6,90	111,30
Persentase perizinan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran							112,64		105,65

Rata-rata capaian kinerja sasaran 4 melalui 2 indikator kinerja Tahun 2017 adalah sebesar 112,64%, dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Beberapa informasi penting setiap indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

III.3.4.1 Jumlah Penanaman Modal (Investasi)

Kinerja sasaran dari indikator kinerja jumlah penanaman modal (investasi) yaitu terwujudnya peningkatan realisasi penanaman modal (investasi), perijinan serta iklim investasi yang kondusif tercapai melalui dua indikator yaitu: Jumlah penanaman modal (investasi) dengan target sebesar Rp6,13 triliun dan terrealisasi sebesar Rp7,68 triliun atau 125,29% dari target, menunjukkan bahwa realisasi dari Penanaman Modal pada tahun 2017 melebihi target. Pencapaian target indikator jumlah penanaman modal (investasi) terdiri dari Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Izin Usaha Penanaman Modal Asing (PMA).

Proyek penanaman modal dikategorikan PMA jika terdapat saham warga negara asing, atau badan usaha asing atau pemerintah asing walaupun hanya 1 (satu) lembar saham. Pada tahun 2014, Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai 51 izin dan PMDN 38 izin, realisasi penanaman modal mencapai Rp 10,57 triliun tetapi pada tahun 2015 mengalami



penurunan realisasi penanaman Modal yaitu Rp 4,06 triliun. Hal ini salah satu dampak dari kondisi perekonomian. Kinerja penanaman modal dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi PMDA dan PMDN.

Tabel 3.11. Realisasi Investasi PMDN dan PMDA Berdasarkan Izin Usaha

Tahun	Data Hasil IU PMDN		Data Hasil IU PMDA		
	Jumlah Izin	Jumlah Investasi Rp (Jutaan)	Jumlah Izin	Nilai Dalam USD (Ribuan)	Dalam Jutaan Rp (Kurs 1 USD = Rp. 12.500,-)
2014	38	3.837.046,7	48	538.854,8	6.735.685,0
2015	30	1.994.319,4	47	133.772,4	1.672.155,0
2016	35	3.652.727,1	51	239.514,8	6.735.685,0
2017	1.287	5.594.922,8	51	157.414,2	7.688.531,7

Sumber Data : Business Inteligence (BI) BKPM RI (DIOLAH)

Kurs 1 USD = Rp. 13,400 (sampai dengan tanggal 21 Desember 2017)

Berdasarkan data realisasi penanaman modal tahun 2017, beberapa perusahaan dari total realisasi penanaman modal meningkat karena adanya perluasan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang menanamkan modalnya dapat mengembangkan usahanya. Meningkatnya penanaman modal sejalan dengan meningkatnya kepercayaan penanaman modal terhadap perekonomian Indonesia, antara lain juga didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal. Memudahkan para investor dan melayani lebih baik lagi investor untuk penanaman modal. Berikut dalam tabel rekapitulasi Izin Usaha PMDN dan PMDA pada tahun 2017.

Tabel 3.12. Rekapitulasi Izin Usaha Tahun 2017

No	Bulan	PMDN			PMA					JUMLAH PMDN + PMA				
		Jumlah Proyek	Nilai Investasi Dalam Jutaan Rupiah (Rp)	Karyawan		Jumlah Proyek	Nilai Investasi Dalam Ribuan USD (US\$)	Nilai Investasi Dalam Jutaan Rupiah (Rp) 1 USD = Rp.13.300,-	Karyawan		Jumlah Proyek	Nilai Investasi Dalam Jutaan Rupiah (Rp)	Karyawan	
				WNI	WNA				WNI	WNA			WNI	WNA
1	Januari	112	173.519,0	279	0	4	40.578,5	539.694,1	2536	1	116	713.213,1	2.815	1
2	Februari	84	503.076,1	1.159	0	3	12.197,7	162.229,4	5433	1	87	665.305,5	6.592	1
3	Maret	138	1.602.418,2	1.353	0	1	907,4	12.068,4	600	2	139	1.614.486,6	1.953	2
4	April	122	515.424,8	642	5	3	9.678,6	128.725,4	256	2	125	644.150,2	898	7
5	Mei	118	242.812,8	662	0	3	10.520,0	139.916,0	384	1	121	382.728,8	1.046	1
6	Juni	80	76.671,5	235	0	3	12.179,0	161.980,7	185	0	83	238.652,2	420	0
7	Juli	101	478.663,3	597	0	5	17.858,0	237.511,4	541	5	106	716.174,7	1138	5
8	Agustus	120	446.438,4	485	0	8	23.409,6	311.347,7	524	5	128	757.786,1	1009	5
9	September	113	453.468,3	704	0	5	5.127,8	68.199,7	42	6	118	521.668,0	746	6
10	Oktober	120	690.276,7	2334	0	7	8.703,1	115.751,2	158	2	127	806.027,9	2492	2
11	November	117	301.095,0	512	0	6	10.270,9	136.603,0	124	3	123	437.698,0	636	3
12	Desember	62	111.058,7	1052	0	3	5.983,6	79.581,9	39	3	65	190.640,6	1091	3
Jumlah		1.287	5.594.922,8	10.014	5	51	157.414,2	2.093.608,9	10.822	31	1.338	7.688.531,7	20.836	36

Sumber: DPMPTSP, 2018

BAB 3 – Akuntabilitas Kinerja



Upaya yang telah dilakukan

- a) Penyelenggaraan Pameran Investasi yang dilaksanakan 4 kali yaitu 2 kali pameran keluar Daerah, 1 kali Tangerang Expo dan 1 kali Festival Cisadane.
- b) Sosialisasi LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang dilaksanakan dengan mengundang 400 perusahaan PMA dan PMDN.
- c) Sosialisasi Pelayanan Perijinan diikuti 400 masyarakat, Banner yang terpasang di Keluarahan dan Kecamatan, Jasa Publikasi Iklan 23 kali tayang.
- d) Rapat-Rapat Koordinasi Bidang Pembangunan dengan melaksanakan rapat pertimbangan untuk mengeluarkan izin mendirikan bangunan yang berdampak skala besar terhadap investasi dan lingkungan.
- e) Pengadaan sarana dan prasarana promosi melalui penyediaan media promosi (Leaflet, CD, Souvenir, Banner), pemeliharaan Billboard/Baliho dan Belanja Jasa Publikasi dalam Majalah.

Permasalahan

- a) Masih banyaknya Perusahaaan PMA dan PMDN yang belum melaporkan (Laporan Kegiatan Penanaman Modal). Padahal setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal sesuai Undang-Undang No.25 Tahun 2007. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal. LKPM ditujukan untuk memantau realisasi investasi dan produksi. LKPM mencakup kegiatan penanaman modal yang dilakukan perusahaan di setiap lokasi dan bidang usaha investasi, kecuali bidang usaha perdagangan. Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan penanaman modal di bidang usaha perdagangan, LKPM cukup berdasarkan lokasi yang telah dinyatakan pada Izin Prinsip. Masih banyak perusahaan yang tidak melaporkan LKPM.

Upaya yang akan dilakukan

- a) Membuat kajian tentang penanaman investasi daerah.
- b) Sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dengan mengundang 200 perusahaan.
- c) Mengikuti Pameran investasi.



III.3.4.2 Persentase perizinan tepat waktu

Kinerja Sasaran terwujudnya peningkatan penanaman modal (investasi) perijinan serta iklim investasi yang kondusif dicapai melalui indikator tingkat pelayanan waktu pengurusan perizinan tepat waktu dengan target tahun 2017 sebesar 100.00% dan direalisasikan sebesar 100.00% dengan rumus perhitungan pembilang yaitu Jumlah perizinan yang diterbitkan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku dan penyebut yaitu Jumlah permohonan perizinan yang memenuhi syarat lengkap sesuai peraturan berlaku.

Realisasi Perizinan tahun 2017 DPMPTSP telah melayani 85 jenis perijinan dengan total jumlah ijin untuk Bidang Pembangunan sebanyak 3.234 Izin, untuk Bidang Pemkes sebanyak 3.551 izin, untuk Bidang Penanaman Modal sebanyak 10.871 Izin. Secara keseluruhan izin yang selesai dilaksanakan di DPMPTSP sebanyak 17.666 Izin.

Tabel 3.13. Jenis Perizinan di Kota Tangerang

No	SK IZIN	Jumlah
I	Bidang Pembangunan	3.234
1	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)	788
2	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1.904
3	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan	527
4	Akta Pertelaan;	3
5	Sertifikat Laik fungsi	3
6	Izin Lokasi	9

No	SK IZIN	Jumlah
II	Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan	680
1	Izin Trayek (Pembaharuan SK KP, PK/BN, Peremajaan/ Penggantian Kendaraan)	569
2	Izin Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia	7
3	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	8
4	Izin Gangguan (HO)	83
5	Izin Perparkiran	13
III	Bidang Pelayanan Perizinan Kesra	2.871
1	Izin Pendirian Sekolah	3
2	Sekolah Menengah Pertama	11



No	SK IZIN	Jumlah
3	Izin Pendirian Kursus	22
4	Izin Laboratorium Klinik Pratama	5
5	Izin Optik	4
6	Izin Toko Obat	11
7	Izin Apotek	124
8	Izin Klinik Utama	0
9	Izin Klinik Pratama	52
10	Izin Operasional dan Klarifikasi RS Kelas C	8
11	Izin Operasional dan Klarifikasi RS Kelas D	0
12	Izin Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	31
	Surat Izin Praktek	
13	Bidan	450
14	Apoteker	336
15	Dokter Umum	675
16	Dokter Gigi	201
17	Dokter Spesialis	429
18	Perawat	230
19	Fisioterapis	1
20	Radiografer	3
21	Okupasi Terapis	4
22	Terapis Wicara	4
23	Tenaga Teknis Kefarmasian	32
24	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	1
25	Tanaga Sanitarian	1
26	Penata Anestesi	0
27	Tenaga Gizi	3
28	Refraksionis Optisien	0
29	Terapis Gigi dan Mulut	0
30	Oprtosis Prostetis	0
31	Perekam Medis	2
32	Tenaga Elektrokromedis	0
33	Transfusi Darah	0
34	Tenaga Kesehatan Tradisional	0
	Penghentian Praktek/Kerja	



No	SK IZIN	Jumlah
	Bidan	0
	Apoteker	44
	Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis	161
	Penutupan Apotek	16
	Penutupan Klinik	1
35	Izin Praktek Dokter Hewan Praktik Mandiri/Bersama	3
36	Izin Praktik Tenaga Paramedik Veteriner	0
37	Izin Penyelenggaraan Radiologi Diagnostik	0
38	Izin Penyelenggaraan Klinik Hemodialisa	0
39	Izin Penyelenggaraan Unit Pelayanan Dialisis di RS	0
40	Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat	0
41	Surat Tanda Terdaftar Penyehat Tradisional	0
42	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional	0
43	Sertifikat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Tertentu	0
44	Izin Operasional Pengendalian Vektor	0
45	Izin Toko Alat Kesehatan	0
46	Sertifikat Hygiene Sanitasi Rumah Makan/Restoran	0
47	Sertifikat Hygiene Sanitasi Jasa Boga/Catering	0
48	Sertifikat Laik Sehat Hotel	0
49	Sertifikat Hygiene Sanitasi Depot Air Minum	0
50	Surat Izin Praktik Dokter Hewan Tenaga Asing	0
51	Izin Depo/Toko Obat Hewan	0
52	Izin Klinik Hewan	0
53	Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi Cabang	1
54	Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan Cabang	0
55	Rekomendasi Perluasan Gudang PBF Cabang	0
56	Rekomendasi Perluasan Gudang PAK Cabang	0
57	Rekomendasi Pergantian PJ Teknis PBF Cabang	0
58	Rekomendasi Pergantian PJ Teknis PAK Cabang	1
59	Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Lab Klinik Madya	0
60	Rekomendasi Pergantian Kepala Cabang PBF Cabang	0
61	Rekomendasi Pergantian Kepala Cabang PAK Cabang	0
62	Rekomendasi Pengendalian Vektor	0
63	Rekomendasi Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	1



No	SK IZIN	Jumlah
64	Izin Pembuangan Air Limbah	10

No	SK IZIN	Jumlah
IV	Bidang Pelayanan Penanaman Modal	10.871
1	Izin Industri (Izin Usaha Industri, Izin Tanda Daftar Industri, Izin Perluasan)	52
2	Izin Penanaman Modal (Izin Prinsip) dan Izin Usaha	
	a. Izin Prinsip	52
	b. Izin Usaha	20
3	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3.059
4	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3.029
5	Izin Reklame	4.162
6	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	16
7	Izin Usaha Toko Modern	14
8	Izin Usaha Jasa Kontruksi	178
9	Tanda Daftar Gudang	28
10	Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)	279

Upaya yang telah dilakukan

- a) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui Bimbingan Teknis Pelayanan Prima dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- b) Melaksanakan Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Pembuatan izin SIUP dan TDP secara online.
- c) Melaksanakan Kegiatan Penataan Ruang untuk memberikan kenyamanan kepada Masyarakat dalam mengurus proses perizinan.
- d) Mengadakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk memberikan fasilitas kepada Masyarakat dalam mengurus proses perizinan.

Permasalahan

- a) SDM yang Kurang professional
- b) Masih kurangnya pengetahuan Masyarakat dalam pengurusan perizinan



Upaya yang akan dilakukan

- a) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan Prima dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- b) Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pelayanan perizinan di Kecamatan.
- c) Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Pembuatan 21 jenis perizinan secara online dan pemuktahiran website SKPD.
- d) Melaksanakan pelayanan 7 hari kerja.
- e) Penyampaian Izin Via Pos.
- f) Call Center Perizinan.

III.3.5 SASARAN 5

Meningkatnya Kepariwisataan

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.14. Capaian Kinerja Sasaran 5

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			2017			2018 (Akhir RPJMD)	
		2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	Target	%
Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	478.715	500.493	536.963	354.773	1.088.700	306,87	540.000	201,61
Rata-rata lama kunjungan wisatawan (Rata-rata lama menginap di hotel)	Hari	1,33	1,55	1,80	1,95	1,96	100,51	2,15	91,16
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran							203,69		146,39

Rata-rata capaian kinerja Tahun 2017 pada sasaran 5 melalui 2 indikator adalah sebesar 203,69%, dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Beberapa informasi penting setiap indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:



III.3.5.1 Jumlah kunjungan wisatawan

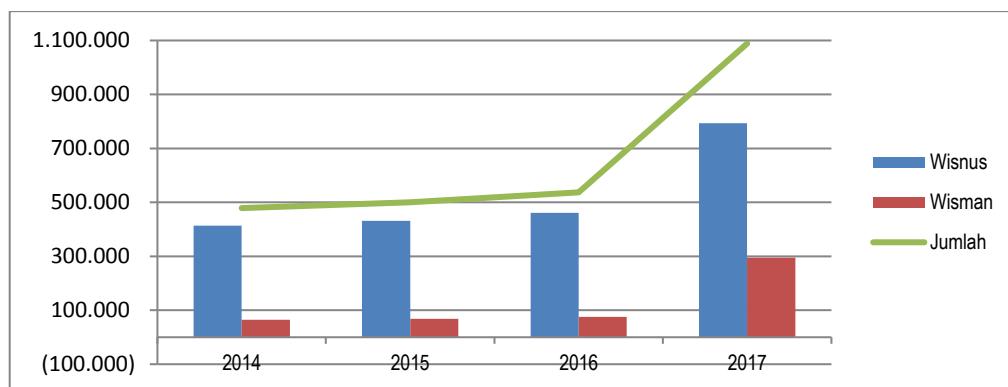
Sasaran meningkatnya kepariwisataan diukur melalui indikator jumlah kunjungan wisatawan dengan target tahun 2017 sebanyak 354.773 orang. Indikator tersebut direalisasikan sebanyak 1.088.700 orang atau 306,87%. Jumlah tersebut meningkat 50,68% dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 536.963 orang sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.15. Realisasi dan Capaian Jumlah Kunjungan Wisatawan

Kategori Wisatawan	2014	2015	2016	2017		
				Target	Realisasi	Capaian
Wisnus	413.743	431.743	461.502	300.000	793.390	264,46
Wisman	64.972	68.750	75.461	54.733	295.357	539,63
Jumlah	478.715	500.493	536.963	354.733	1.088.700	306,91

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2018

Gambar 3.4. Perkembangan Realisasi Kunjungan Wisatawan Tahun 2014-2017



Pencapaian jumlah tersebut tercatat sebagai rekor tertinggi dalam empat tahun terakhir. Faktor penyebab meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Tangerang adalah terselenggaranya beberapa event skala nasional dan internasional, serta pembangunan infrastruktur berupa sarana rekreasi dan taman kota. Event-event yang digelar adalah Culinary Night yang rutin diselenggarakan tiap bulan di kawasan pasar lama, Lomba Masakan Khas Kota Tangerang yang pesertanya juru masak hotel, Festival Budaya Nusantara yang diikuti oleh 11 (sebelas) kabupaten Kota seluruh Indonesia, Festival Cisadane (termasuk di dalamnya lomba dayung tingkat nasional dan internasional), dan event-event lain yang diselenggarakan oleh instansi lain atau lembaga swasta seperti Festival Al Azdom, Tangerang Expo dan Lomba Lari 10K. Sedangkan, sarana rekreasi dan taman-taman kota diantaranya Flying Deck, Taman Gajah Tunggal, Taman Potret, Kampung Bekelir, Taman Kunci, Taman Kupu-Kupu dan Kelinci, Taman



Burung dan sebagainya. Data rata-rata jumlah pengunjung pada saat event dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.16. Jumlah Pengunjung pada Event di Kota Tangerang

NO	NAMA EVENT	JUMLAH PENGUNJUNG
1	Festival Cisadane	8.000
2	Festival Budaya Nusantara	24.000
3	Culinary Night	37.000
4	Festival yang diselenggaran instansi/lembaga lain	-
	TOTAL	69.000

Upaya yang telah dilakukan

- a) Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu promosi pariwisata ke beberapa daerah di nusantara (Medan, NTB dan Yogyakarta), culinary night sebanyak 11 kali dalam setahun dan mengundang para blogger nasional untuk mengekspos objek-objek wisata daerah melalui media social (*blogger farmtrip*).
- b) Promosi pariwisata yang dilakukan ke beberapa daerah di Nusantara di samping bertujuan untuk menarik perhatian wisatawan luar daerah dan memperkenalkan objek-objek wisata Kota Tangerang, juga untuk mempromosikan produk ekonomi kreatif lokal seperti batik Tangerang, kecap benteng, dodol dan tas magelo.
- c) Culinary Night, bertujuan untuk memperkenalkan aneka makanan khas Kota Tangerang kepada masyarakat lokal dan masyarakat luar dan sekaligus sebagai media promosi wisata kuliner. Rata-rata pengunjung yang datang sebanyak 3000 orang. Kegiatan culinary night yang setiap bulannya dibuatkan tema yang berbeda dan unik, selain berisi sajian aneka kuliner, juga berisi tampilan hiburan mulai dari kesenian tradisional lokal hingga tampilan musik profesional, sehingga membuat para pengunjung terhibur sambil menikmati aneka makanan khas Kota Tangerang.

Tabel 3.17. Data Kunjungan Culinary Night Tahun 2017

NO.	TANGGAL PELAKSANAAN	JUMLAH PENGUNJUNG
1	11 Februari 2017	2.500
2	18 Februari 2017	4.000
3	18 Maret 2017	3.000
4	22 April 2017	2.000
5	6 Mei 2017	4.500
6	8 Juli 2017	2.500
7	12 Agustus 2017	5.000
8	2 Oktober 2017	3.500
9	9 September 2017	3.000



NO.	TANGGAL PELAKSANAAN	JUMLAH PENGUNJUNG
1	11 Februari 2017	2.500
10	11 Nopember 2017	2.000
11	16 Desember 2017	5.000
Jumlah		37.000

- d) Selain promosi keluar daerah dan culinary night, promosi dilakukan dengan mengundang sejumlah blogger nasional untuk mengekspos objek wisata Kota Tangerang. Para blogger diminta menulis dan mengambil gambar setiap objek wisata di Kota Tangerang kemudian dimuat dan diupload ke dalam blog, instagram, facebook dan tweeter mereka masiang-masing,. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan wisata Kota Tangerang di media sosial dengan harapan wisatawan mendapatkan informasi tentang Kota Tangerang dengan mudah melalui akun-akun media sosial.
- e) Penyelenggaran festival cisadane yang berisi berbagai lomba berskala Internasional dan Tampilan Seni Budaya sebagai mana terlihat pada gambar foster di bawah ini.

Gambar 3.5. Agenda Festival Cisadane Tahun 2017



Kegiatan ini berhasil menarik 8000 pengunjung dari target 5000 pengunjung. Selain itu, diselenggarakan pula pameran yang menampilkan hasil-hasil kerajinan lokal dan produk-produk hasil ekonomi kreatif serta informasi-informasi mengenai pelayanan publik yang ada di Kota Tangerang.



- f) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu: Pengadaan Dermaga Apung, Penataan Sungai Cisadane Jl. Berhias, Penataan sungai cisadane jl. Benteng Jaya, dan Penataan Kampung Bekelir.
- g) Pengadaan dermaga apung merupakan lanjutan pengadaan dermaga apung tahun sebelumnya (2016) yang hanya seluas 36 M2. Pada Tahun 2017 luasnya bertambah menjadi 100 M2 ditambah dengan jembatan apung dengan rallingnya sepanjang 10 meter.
- h) Penataan sungai cisadane jalan berhias berupa pembangunan payung dan kursi hias yang tujuannya untuk digunakan para pengunjung menikmati keindahan suasana malam sungai cisadane. Sedangkan penataan sungai cisadane jalan banteng jaya berupa pembangunan pilar-pilar, kursi-kursi dan pot-pot tanaman hias.
- i) Penataan Kampung Bekelir yang menghabiskan dana APBD dan didukung oleh Program Corporate Social Responsibility (CSR) salah satu perusahaan produsen cat di Kota Tangerang telah berhasil mengubah kampung yang sebelumnya kumuh dan kotor menjadi kawasan destinasi wisata baru di Kota Tangerang yang berhasil menarik wisatawan dari dalam dan luar negeri.

Gambar 3.6. Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata



Flying Deck



Dermaga Terapung



Kampung Berkilir



Taman Burung



Permasalahan

- a) Belum memadainya infrastruktur yang mendukung aktivitas wisatawan di setiap objek wisata.
- b) Sulitnya wisatawan dalam mengakses informasi pariwisata Kota Tangerang yang memadai;
- c) Rendahnya kesiapan masyarakat dalam menerima kunjungan wisatawan.
- d) Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Pariwisata dalam pengembangan kepariwisataan di Kota Tangerang terutama terkait strategi dalam memberikan penawaran kepada wisatawan nusantara dan mancanegara untuk berkunjung ke Kota Tangerang.
- e) Masih minimnya organisasi/lembaga tingkat kota yang menjadi mitra pemerintah Kota Tangerang dalam pengembangan kepariwisataan.

Upaya yang akan dilakukan

- a) Melaksanakan pembangunan objek wisata unggulan. Objek wisata unggulan yang dimaksud adalah sungai cisadane yang merupakan kebanggaan Kota Tangerang, bahkan dengan keunikannya sungai cisadane yang sarat dengan keragaman festival-festivalnya telah menjadi bagian dari *Seven Wonderful Banten*. Pembangunan tersebut berupa Flying Deck lanjutan sepanjang 140 m di bantaran Sungai Cisadane.
- b) Melakukan kampanye tentang objek-objek wisata di media sosial melalui kegiatan pembuatan media promosi berupa spanduk/banner dan mengundang para blogger ternama untuk mengeksplosi objek wisata di Kota Tangerang melalui *social media campaign (blogger farmtrip)*.
- c) Melanjutkan program sosialisasi sadar wisata kepada masyarakat di sekitar objek-wisata 180 orang di 6 (enam) lokasi, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.18. Lokasi dan Jumlah Sosdarwis

No	Lokasi	Jumlah
1	Pasar Lama	30 orang
2	Bantaran Sungai Cisadane Jl. Benteng Jaya	30 orang
3	Babakan (taman potret dan taman gajah)	30 orang
4	Situ Bulakan	30 orang
5	Situ Cipondoh	30 orang
6	Kampung Bekelir	30 orang
Jumlah		180 orang



- d) Mengadakan pelatihan SDM kepariwisataan. Pelatihan ini diberikan kepada 200 pekerja bidang usaha jasa pariwisata, meliputi hotel, restoran, rumah makan, hiburan dan travel. Diharapkan SDM kepariwisataan setelah dilatih dapat turut berpartisipasi mensukseskan prioritas pembangunan yang diselenggarakan Kota Tangerang pada sektor pariwisata.
- e) Pembentukan ASITA Kota Tangerang sebagai upaya pengembangan kepariwisataan. Dengan terbentuknya ASITA, diharapkan dapat menjadi mitra dalam pengembangan kepariwisataan di Kota Tangerang.

III.3.5.2 Rata-Rata Lama Kunjungan Wisatawan (Rata-Rata Lama Menginap Di Hotel)

Indikator meningkatnya kepariwisataan dicapai melalui indikator rata-rata lama kunjungan wisatawan (rata-rata lama menginap di hotel) dengan target di tahun 2017 selama 1,95 hari dan direalisasikan selama 1,96 hari atau 100,51%. Realisasi rata-rata lama menginap di hotel tahun 2017 mengalami kenaikan 100,51% atau 0,01 poin dari target 1,95 hari. Kenaikan ini tidak begitu signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya (2016) 1,80 hari atau 102,86% dan atau naik 0,05 poin dari target 1,75 hari.

Faktor penyebabnya adalah wisatawan lebih banyak memanfaatkan waktu *weekend* untuk menginap di hotel, dan untuk hari-hari di luar weekend wisatawan bertemu ke hotel sekedar transit. Faktor lainnya adalah jumlah hotel dari tahun ke tahun bertambah, tahun sebelumnya (2016) berjumlah 56 hotel dan di tahun 2017 bertambah menjadi 60 hotel. Perkembangan jumlah hotel dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.19. Jumlah Hotel dan Kelas Hotel di Kota Tangerang

Kelas Hotel	Jumlah			Keterangan
	2015	2016	2017	
Bintang 1	1	1	1	Terdaftar
Bintang 2	9	9	9	Terdaftar
Bintang 3	5	8	10	Terdaftar
Bintang 4	6	7	8	Terdaftar
Bintang 5	1	1	1	Terdaftar
Non Bintang	29	30	31	Terdaftar
Jumlah	51	56	60	



Upaya yang telah dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian target indikator ialah melalui kegiatan Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Laporan Jasa Pariwisata. Kegiatan ini berisi pembinaan dan pengawasan terhadap 100 usaha jasa pariwisata yang meliputi hotel, penginapan, restoran dan jasa hiburan dengan tujuan selain untuk mendapatkan data kunjungan hotel, juga untuk mengetahui tingkat kepatuhan pengusaha jasa pariwisata terhadap peraturan yang berlaku terutama pada hari-hari besar keagamaan dan bulan suci Ramadhan..

Permasalahan

- a) Tidak adanya agenda tetap tahunan tentang festival yang diselenggarakan, sehingga wisatawan nusantara dan mancanegara lebih memilih berkunjung ke daerah-daerah lain yang telah memiliki agenda tetap tahunan.
- b) Banyaknya usaha jasa pariwisata yang belum memiliki standar usaha jasa pariwisata.
- c) Lemahnya peran duta-duta pariwisata dalam pengembangan pariwisata yang disebabkan minimnya tindaklanjut pembinaan yang diberikan kepada para duta pariwisata terpilih.
- d) Terbatasnya jangkauan promosi pariwisata kota Tangerang ke daerah-daerah lain di nusantara.
- e) Mahalnya tarif parkir dan harga makanan/minuman di kawasan objek wisata atau pada saat penyelenggaraan festival sehingga wisatawan enggan berkunjung bahkan tidak berkunjung lagi.

Upaya yang akan dilakukan

- a) Menyusun agenda tahunan tentang event-event dan festival-festival;
- b) Melaksanakan kegiatan Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi dengan sasaran adalah para pelaku usaha jasa pariwisata sehingga mereka memiliki standar pelayanan yang memadai.
- c) Mengadakan kegiatan Pemilihan Duta Pariwisata Kang Dan Nong dengan yang diilanjutkan dengan kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata sehingga diharapkan Duta Wisata yang terpilih mampu berpartisipasi aktif dalam pengembangan dan promosi pariwisata di Kota Tangerang. Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya



meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan tapi juga lama menginap di Kota Tangerang.

- d) Melaksanakan promosi pariwisata daerah. Tujuan promosi ke Palembang, Semarang dan Banjarmasin. Bentuk kegiatannya adalah memperromosikan objek-objek wisata dan produk-produk ekonomi kreatif daerah Kota Tangerang. Selain kegiatan promosi, juga menyeleggarakan kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival-Festival Pada Objek Wisata Daerah yang berlokasi di Sungai Cisadane selama 10 (sepuluh) hari. Kegiatan ini berisi lomba kesenian daerah, pementasan di atas air, lomba dayung tingkat internasional dan pameran produk ekonomi kreatif daerah yang melibatkan stakeholders terkait, sehingga diharapkan dapat meningkatkan jangkauan promosi dan variasi terhadap destinasi periwisata di Kota Tangerang.
- e) Kegiatan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan yang diharapkan dapat memberikan umpan balik positif bagi penyelenggaraan festival selanjutnya dan bagi pelaku usaha pariwisata.

III.3.6 SASARAN 6

Terwujudnya Industri Yang Maju

Pencapaian sasaran 6 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

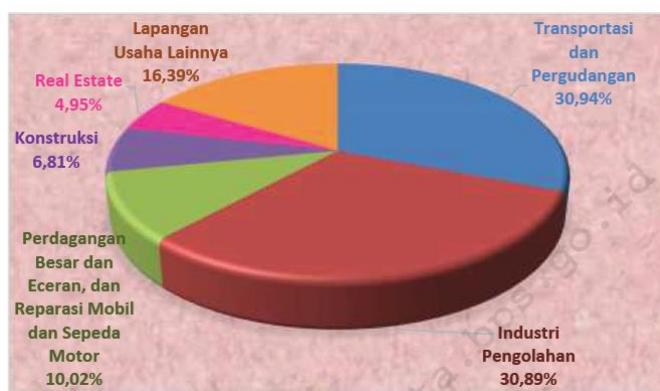
Tabel 3.20. Capaian Kinerja Sasaran 6

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			2017			2018 (Akhir RPJMD)	
		2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai PDRB sektor industri (ADHK)	Rp Milyar	34.007,79	35.049,96	36.037,67	37.460,57	36.037,67	96,20	40.967,26	87,97

Indikator sasaran Nilai PDRB sektor industri, menggunakan data tahun 2016, dikarenakan Nilai PDRB tahun 2017 belum di publish oleh BPS. Dan pencapaian indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2016, walaupun pencapaiannya masih pada kategori sangat tinggi.

Kategori Industri Pengolahan merupakan lapangan usaha terbesar kedua yang berperan dalam perekonomian Kota Tangerang. Pada tahun 2016, kontribusi Kategori Industri Pengolahan turun menjadi peringkat kedua setelah Kategori Transportasi dan Perdagangan. Kontribusi Industri Pengolahan sebesar 30,89 persen, dengan sub lapangan usaha yang menyumbang paling tinggi adalah industri barang dari logam, computer, barang elektronik, optic dan peralatan listrik. Lapangan usaha ini, mencakup pembuatan produk logam “murni” (seperti suku cadang, container/wadah dan struktur), pembuatan perlengkapan senjata dan amunisi, pembuatan computer, perlengkapan computer, peralatan komunikasi, dan barang-barang elektronik sejenis, termasuk pembuatan komponennya, pembuatan produk yang membangkitkan, mendistribusikan dan menggunakan tenaga listrik, dengan kontribusi sebesar 7,49 persen.

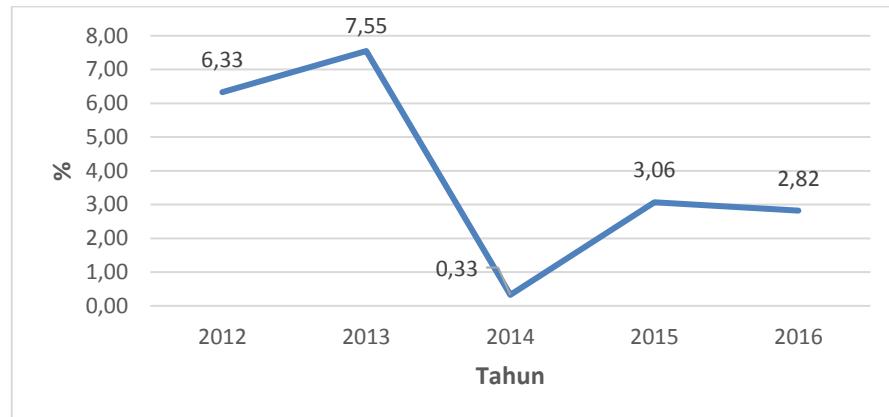
Gambar 3.1.Kontribusi PDRB ADHB Menurut Kategori Lapangan Usaha di Kota Tangerang (persen)



Laju pertumbuhan kategori Industri Pengolahan pada tahun 2016 adalah sebesar 2,82 persen. Sub lapangan usaha yang mencatatkan laju pertumbuhan terbesar adalah Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik yaitu sebesar 6,98 persen, kemudian diikuti oleh Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman dan Industri Alat Angkutan yaitu masing-masing pertumbuhannya sebesar 4,55 persen dan 4,26 persen..



Gambar 3.2. Pertumbuhan Ekonomi kategori Industri Pengolahan pada PDRB ADHK Kota Tangerang 2012-2016



III.3.7 SASARAN 7

Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan

Pencapaian sasaran 7 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.21. Capaian Kinerja Sasaran 7

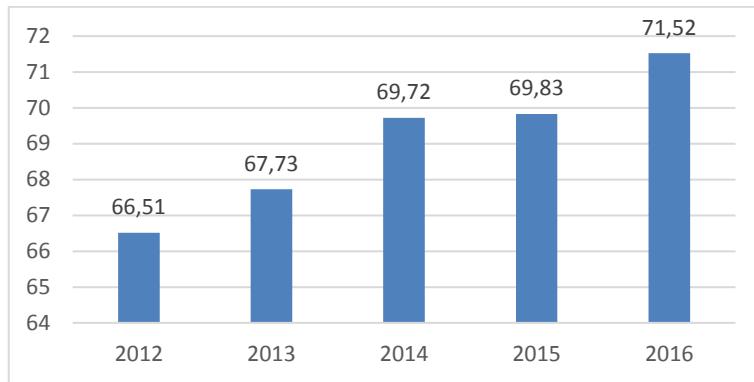
Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			2017			2018 (Akhir RPJMD)	
		2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	Target	%
Indeks pendidikan	Point	69,71	69,83	71,52	70,04	71,52	102,11	70,45	101,52

Indikator sasaran Indeks pendidikan, menggunakan data tahun 2016, dikarenakan Laporan Pembangunan Manusia tahun 2017 belum di publish oleh BPS. Dan pencapaian indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2017.

Indeks Pengetahuan atau Indeks Pendidikan Kota Tangerang tahun 2016 adalah 71,52. Angka ini meningkat sebesar 1,69 poin dari tahun 2015. Namun dari angka indeks ini masih jauh dari angka maksimalnya (100), sehingga dapat dikatakan pencapaian indikator pengetahuan di Kota Tangerang masih perlu ditingkatkan sehingga masyarakat mempunyai kesempatan dan kemauan untuk menempuh pendidikan lebih tinggi.



Gambar 3.3. Perkembangan Indeks Pendidikan Kota Tangerang



Sumber: Laporan Pembangunan Manusia Kota Tangerang, 2017

Pencapaian pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk menilai kemajuan suatu masyarakat. Hal ini karena masyarakat yang berpendidikan akan lebih mudah menyerap informasi-informasi kemajuan peradaban, sehingga dapat meningkatkan kualitas penduduk daerah yang bersangkutan. Pendidikan juga mempunyai korelasi yang kuat dengan berbagai aspek sosial ekonomi. Berbagai penelitian menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan berkaitan erat dengan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat. Oleh karena itu pembangunan pendidikan sangat penting untuk mencetak generasi yang memiliki kemampuan dan berkualitas unggul bagi kemajuan suatu bangsa.

Pada dasarnya pembangunan pendidikan difokuskan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, juga untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dengan perkembangan dunia usaha.

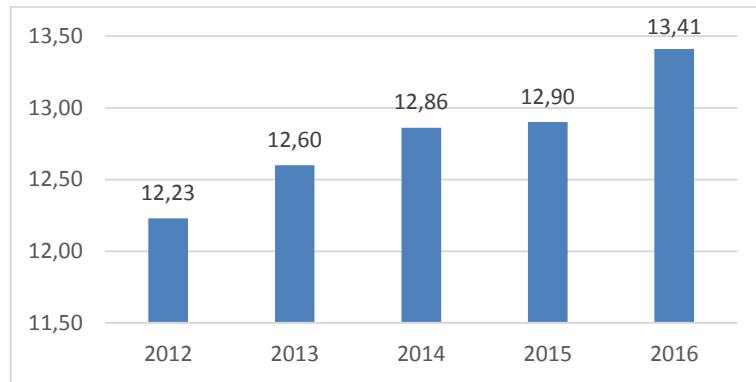
Peningkatan partisipasi masyarakat dan perluasan kesempatan dalam bidang pendidikan, dapat dilihat dari indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk. Kedua indikator ini dalam pembangunan manusia mewakili aspek pengetahuan, yang keberhasilannya memerlukan dukungan kuat dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Harapan lama sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Tangerang pada tahun 2016 adalah 13,41 tahun, berarti setiap penduduk Kota Tangerang yang berusia 7 tahun pada tahun 2016, dapat berharap untuk bersekolah selama 13 tahun lebih, atau kuliah sampai semester II.



Gambar 3.4. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Tangerang



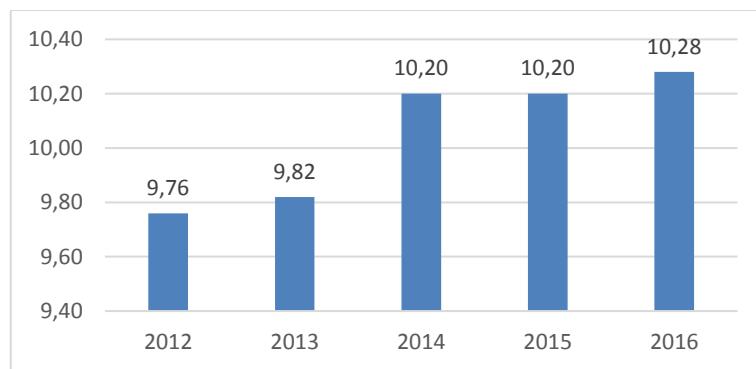
Sumber: Laporan Pembangunan Manusia Kota Tangerang, 2017

Rata-rata lama sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yaitu jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, dengan cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Angka RLS yang dicapai Kota Tangerang pada tahun 2016 adalah 10,28 tahun, artinya rata-rata penduduk Kota Tangerang yang berumur 25 tahun ke atas, bersekolah hingga setara kelas II SMU.

Gambar 3.5. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kota Tangerang



Sumber: Laporan Pembangunan Manusia Kota Tangerang, 2017

Peningkatan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah mengindikasikan adanya perbaikan dalam hal sarana dan prasarana pendidikan serta partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan. Adapun perbaikannya ini juga menjadi penanda bahwa sistem pendidikan di Kota Tangerang selama ini sudah berjalan pada arah yang benar.



Upaya yang telah dilakukan

- a) Pembiayaan Tangerang Cerdas SD pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.137.875.000,- kegiatan ini bertujuan menurunkan angka putus sekolah dan rawan putus sekolah bagi siswa tidak mampu pada jenjang pendidikan dasar yang berjumlah 10.400-siswa tidak mampu sesuai data hasil verifikasi dengan memberikan bantuan pembiayaan pendidikan Biaya Personal Siswa dan SPP bagi siswa tidak mampu penduduk Kota Tangerang sebesar Rp.80.000,-/siswa/bln.
- b) Pembiayaan Tangerang Cerdas SMP pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.562.700.000,- Kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan angka putus sekolah dan rawan putus sekolah bagi siswa tidak mampu pada jenjang pendidikan menengah yang berjumlah 2.633-siswa tidak mampu sesuai data hasil verifikasi dengan memberikan bantuan pembiayaan pendidikan Biaya Personal Siswa dan SPP bagi siswa tidak mampu penduduk Kota Tangerang sebesar Rp.100.000,-/siswa/bln.
- c) Biaya Operasional Pendidikan SD/MI Negeri dan Swasta pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 105.321.600.000,- Kegiatan ini bertujuan untuk pembiayaan penyelenggaraan operasional pendidikan 340-SD/MI Negeri dan 135-SD Swasta dengan perhitungan jumlah siswa sebesar Rp.50.000,-/siswa/bln.
- d) Biaya Operasional Pendidikan SMP/MTs Negeri dan Swasta pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan alokasi anggaran sebesar Rp.52.617.980.000,- Kegiatan ini bertujuan untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pada 35-SMP/MTs Negeri dan 164-SMP Swasta dengan perhitungan jumlah siswa sebesar Rp.105.000,-/siswa/bln.
- e) Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal (Paket A, B dan C) pada Program Pendidikan Non Formal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 725.779.000,- Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bantuan operasional pendidikan lembaga PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dalam rangka menuntaskan angka putus sekolah melalui kesetaraan Paket A, B dan C sebanyak 30-Lembaga PKBM.



Permasalahan

Pencapaian Indeks Pendidikan, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf penduduk usia > 15 Tahun yang merupakan Indeks Komposit IPM belum optimal, perlu peningkatan disemua sektor pendukung khususnya pada Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan Program pendidikan non formal.

Upaya yang akan dilakukan

- a) Pembiayaan Tangerang Cerdas SD pada Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan anggaran Rp. 8.106.125.000,- untuk 8.600-siswa tidak mampu.
- b) Pembiayaan Tangerang Cerdas SMP pada Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan anggaran Rp.1.812.700.000,-untuk 1.457 siswa tidak mampu.
- c) Biaya Operasional Pendidikan SD/MI Negeri dan Swasta pada Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan anggaran Rp. 101.943.168.000,- untuk 340-SD/MI Negeri, 77-SD dan 96-MI Swasta.
- d) Biaya Operasional Pendidikan SMP/MTs Negeri dan Swasta pada Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan anggaran Rp.69.015.030.000,- untuk 35-SMP/MTs Negeri dan 150-SMP/MTs Swasta
- e) Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal (Paket A, B dan C) Program pendidikan non formal dengan anggaran Rp. 725.779.000,-untuk 30-Lembaga PKBM.

III.3.8 SASARAN 8

Meningkatnya Aksesibilitas Kesehatan

Pencapaian sasaran 8 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.22. Capaian Kinerja Sasaran 8

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			2017			2018 (Akhir RPJMD)	
		2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	Target	%
Indeks kesehatan	Point	78,60	78,91	78,98	78,98	78,98	100,00	79,11	99,84



Indikator sasaran Indeks kesehatan, menggunakan data tahun 2016, dikarenakan Laporan Pembangunan Manusia tahun 2017 belum di publish oleh BPS. Dan pencapaian indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2016.

Indeks Kesehatan atau Indeks harapan hidup merupakan turunan dari Angka Harapan Hidup yang telah dicapai dibanding kondisi 'ideal' sesuai standar UNDP yaitu 85 tahun (100 persen). Indikator harapan hidup digunakan untuk mengukur pembangunan di bidang kesehatan. Meningkatnya angka harapan hidup dapat berarti adanya perbaikan pembangunan di bidang kesehatan. Yang biasanya ditandai dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk, membaiknya kesehatan lingkungan dan lain sebagainya. Pada tahun 2016 Indeks harapan hidup masyarakat di Kota Tangerang mencapai 78,98. Tersedianya sarana kesehatan yang cukup dan sarana transportasi yang lancar sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan yang ada sangat membantu masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang tinggi, tetapi yang tak kalah penting adalah mengingatkan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

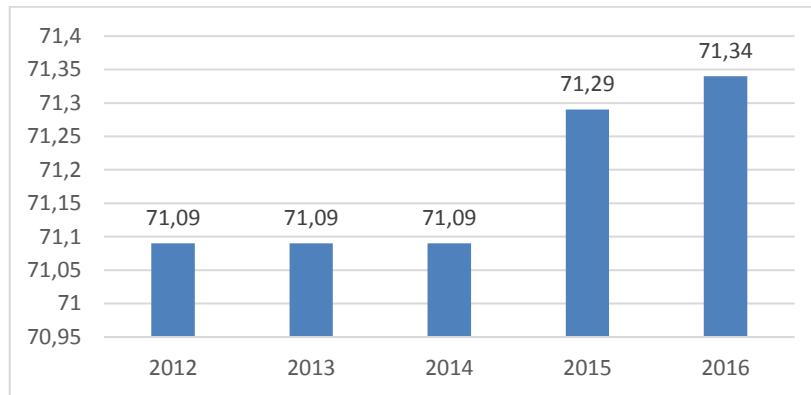
Angka harapan hidup

Angka harapan hidup dapat menggambarkan tingkat kesehatan yang telah dicapai masyarakat. Semakin baik tingkat kesehatan masyarakat diharapkan kesempatan untuk hidupnya cenderung semakin besar/lama. Sebaliknya tingkat kesehatan yang buruk akan cenderung memperpendek usia hidup. Angka harapan hidup berbanding terbalik dengan tingkat kematian bayi, artinya semakin tinggi angka kematian bayi maka angka harapan hidup cenderung semakin pendek, demikian pula sebaliknya.

Angka harapan hidup di Kota Tangerang selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu dari 71,09 tahun pada tahun 2012 menjadi 71,34 tahun pada tahun 2016. Angka harapan hidup sebesar 71,34 tahun dapat diartikan bahwa peluang hidup bayi yang lahir di Kota Tangerang pada tahun 2016 diharapkan dapat hidup sampai usia sekitar 71 tahun.



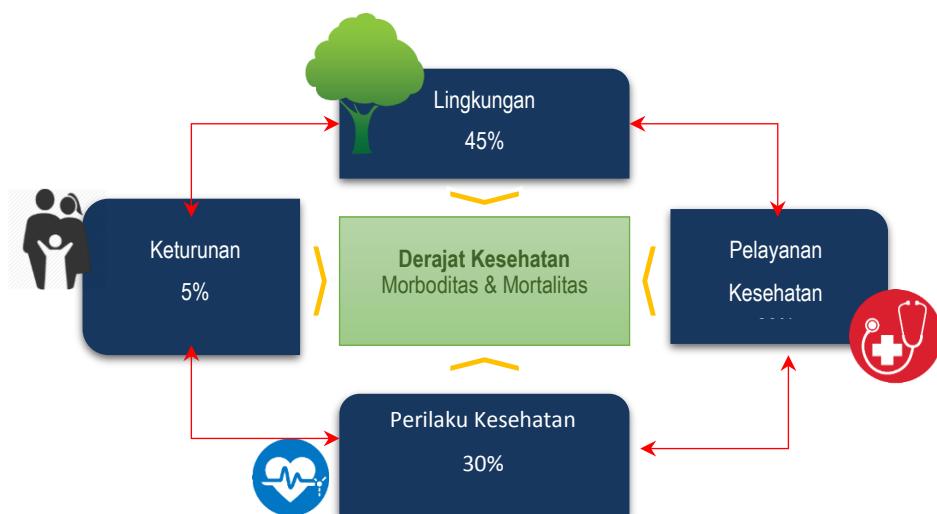
Gambar 3.6. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Tangerang



Sumber: Laporan Pembangunan Manusia Kota Tangerang, 2017

Salah satu komponen dalam penentuan kualitas hidup manusia selain pendidikan adalah kesehatan. Kualitas hidup manusia sangat tergantung dari derajat kesehatannya. Berdasarkan Teori Henrik L. Blum (Notoadmodjo, 2007), derajat kesehatan penduduk dapat diukur dari angka kematian (*mortalitas*) dan angka kesakitan (*morbiditas*). Tingkat mortalitas dan morbiditas penduduk yang merupakan ukuran dari derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh empat faktor penentu yaitu faktor lingkungan, perilaku kesehatan, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Lingkungan mempunyai pengaruh yang paling besar yaitu 45 persen. Sedangkan perilaku kesehatan sebesar 30 persen, pelayanan kesehatan sebesar 20 persen, dan kependudukan/keturunan sebesar 5 persen. Berikut ilustrasi mengenai konsep Henrik L. Blum mengenai hubungan antara derajat kesehatan dengan keempat faktor determinannya.

Gambar 3.7. Analisis Derajat Kesehatan (Konsep Henrik L. Blum)





Berdasarkan konsep derajat kesehatan yang dikemukakan oleh Blum, faktor terbesar yang memengaruhi derajat kesehatan seseorang yaitu faktor lingkungan. Beberapa indikator yang menunjukkan kondisi lingkungan dalam mendukung derajat kesehatan antara lain adalah kepemilikan tempat buang air besar, kondisi sanitasi, dan akses terhadap air bersih, dan jenis lantai terluas.

Berdasarkan data Susenas tahun 2015 menunjukkan bahwa terdapat 99,37 persen rumah tangga di Kota Tangerang yang sudah memiliki tempat buang air besar. Dengan kata lain masih ada 0,63 persen rumah tangga di Kota Tangerang yang tidak memiliki tempat buang air besar. Indikator lain adalah akses sanitasi layak yang merupakan fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan (dilengkapi dengan kloset leher angsa dan dengan tempat pembuangan tangki septik). Faktor sanitasi sangat penting karena masyarakat membutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika sanitasi layak tidak terpenuhi, maka fasilitas tersebut akan rentan dalam menularkan dan menumbuhkan penyakit. Pada tahun 2015 di Kota Tangerang sebanyak 96,45 persen rumah tangga sudah menggunakan kloset leher angsa. Walaupun demikian hanya sekitar 64,80 persen rumah tangga saja yang menggunakan kloset leher angsa dengan dilengkapi tempat pembuangan akhir tangki septik. Dengan kata lain masih ada sebanyak 35,20 persen rumah tangga di Kota Tangerang yang belum menggunakan fasilitas buang air dengan sanitasi layak.

Tabel 3.23. Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Tempat Buang Air Besar, Sumber Air Minum Utama, , dan Jenis Lantai Terluas di Kota Tangerang Tahun 2015

Indikator	2015
Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Tempat Buang Air Besar:	
Ø Leher Angsa	96,45
Ø Plengsengan dengan tutup dan tanpa tutup	2,42
Ø Cemplung/Cubluk	0,5
Ø Tidak Pakai	0,63
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama:	
Ø Air Kemasan Bermerk	41,07
Ø Air Isi Ulang	30,18
Ø Ledeng Meteran dan Eceran	7,56
Ø Sumur Terlindung dan Tak Terlindung	21,19
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas:	
Ø Keramik	84,18
Ø Marmer/Granit	1,77



Indikator	2015
Ø Ubin/Tegel/Teraso	4,63
Ø Kayu/Papan Kualitas Tinggi	0,5
Ø Semen/Bata Merah	7,72
Ø Tanah	1,04
Ø Lainnya	0,16

Sementara itu akses terhadap air bersih merupakan salah satu indikator yang juga berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat. Sumber air minum layak adalah air yang digunakan untuk minum/mandi/cuci yang meliputi air ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung yang jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat lebih dari 10 meter. Sedangkan rumah tangga yang menggunakan air kemasan bermerk dan air isi ulang dikategorikan sebagai tidak ada akses terhadap air minum layak.

Pada tahun 2015 di Kota Tangerang ada sebanyak 71,25 persen rumah tangga tidak ada akses terhadap air bersih, 20,79 persen rumah Tangga memiliki akses terhadap air minum layak dan masih terdapat 7,96 persen rumah tangga tidak memiliki air minum yang layak. Oleh sebab itu menjadi tanggung jawab bagi pemerintah untuk memberikan penyuluhan mengenai penggunaan air bersih oleh masyarakat, sekaligus juga memberikan fasilitas air bersih yang dapat digunakan oleh masyarakat.

Selain beberapa indikator lingkungan diatas, jenis lantai rumah juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Kriteria lantai yang baik adalah yang berasal dari keramik, marmer, ubin, kayu atau semen, bukan dari tanah, karena tanah cenderung lembab dan tidak memenuhi kriteria tersebut. Pada tahun 2015 sudah 98,80 persen rumah tangga di Kota Tangerang memiliki lantai rumah terluas dengan kriteria baik. Namun demikian yang perlu diperhatikan pemerintah Kota Tangerang adalah masih terdapat sekitar 1,20 persen rumah tangga yang jenis lantai terluasnya adalah tanah/lainnya.

Salah satu faktor penentu untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk lainnya adalah pelayanan kesehatan. Indikator yang dapat mengukur pelayanan kesehatan adalah ketersediaan fasilitas dan sarana kesehatan. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang, sampai dengan tahun 2015 di Kota Tangerang telah tersedia 28 unit rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta, 72 unit puskesmas dan puskesmas pembantu, serta 1.075 unit posyandu.

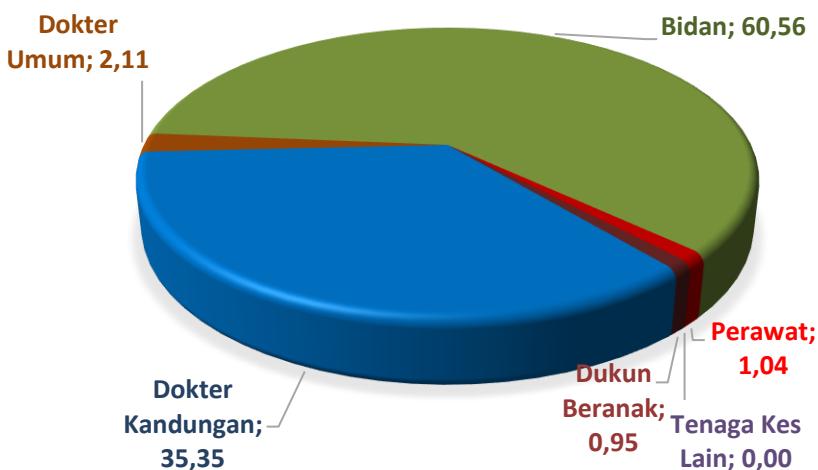


Salah satu indikator dalam upaya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan bagi kesehatan ibu dan bayi adalah persalinan yang dilakukan oleh tenaga medis (dokter, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya). Hal ini diupayakan dalam rangka kesehatan reproduksi agar persalinan yang telah dilakukan oleh tenaga medis lebih aman dibandingkan oleh selain tenaga medis. Praktek persalinan yang aman menjadi salah satu faktor penentu keselamatan ibu dan bayi hingga pada akhirnya akan menurunkan resiko kematian keduanya.

Ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai merupakan salah satu penunjang dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Menurut data Kementerian Kesehatan tahun 2014, rasio puskesmas per 30.000 penduduk di Kota Tangerang sebesar 0,48. Dengan estimasi jumlah penduduk Kota Tangerang tahun 2015 sebesar 2.047.105 dan jumlah puskesmas sebanyak 33, maka 1 Puskesmas dapat melayani sebesar 62.033 penduduk. Sementara rasio dokter umum di Kota Tangerang 14,4 per 100.000 penduduk.

Berdasarkan target kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2014 (Kepmenkokesra No. 54 tahun 2013) rasio dokter umum yang disarankan adalah 40 per 100.000 penduduk. Rasio dokter gigi di Kota Tangerang yaitu 4,2 per 100.000 penduduk. Target kebutuhan tenaga kesehatan yang dianjurkan untuk rasio dokter gigi adalah 12 per 100.000 penduduk. Rasio perawat per 100.000 penduduk di Kota Tangerang adalah 74,7 per 100.000 penduduk. Dengan target yang dianjurkan untuk rasio perawat adalah 158 per 100.000 penduduk. Rasio bidan per 100.000 penduduk di Kota Tangerang adalah 22,9 per 100.000 penduduk. Dengan target yang dianjurkan untuk rasio bidan adalah 100 per 100.000 penduduk. Dapat disimpulkan bahwa jumlah pelayanan kesehatan yang ada di Kota Tangerang secara umum belum memenuhi target. Hal ini menjadi salah satu program yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendistribusian tenaga kesehatan yang memadai di setiap wilayah yang masih kekurangan tenaga medis.

Gambar 3.8. Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Kelahiran yang Terakhir di Kota Tangerang Tahun 2015



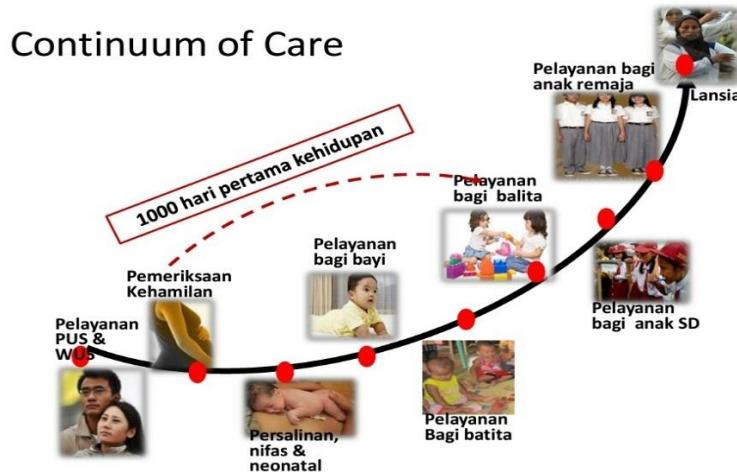
Pada tahun 2015 di Kota Tangerang sudah 95,91 persen wanita usia 15-49 tahun yang pernah kawin melakukan persalinan dengan pertolongan tenaga medis, dalam hal ini dengan bantuan dokter kandungan dan bidan. Selain itu ada juga wanita usia 15-49 tahun pernah kawin yang melakukan persalinan dengan bantuan dokter umum, perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Yang perlu mendapat perhatian adalah masih terdapat 0,95 persen persalinan yang dilakukan bukan dengan tenaga medis, melainkan dengan dukun beranak.

Untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang adalah meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat berkelanjutan mulai dari bayi belum lahir (intervensi kepada ibu hamil) sampai dengan kelompok lanjut usia, antara lain:

- a) perencanaan kehamilan pada pelayanan kesehatan ibu hamil,
- b) pola makan dan pola hidup sehat bagi seluruh kelompok usia melalui pelayanan gizi,
- c) pelayanan kesehatan penyakit tidak menular melalui pelayanan Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis), serta
- d) pelayanan kesehatan para kelompok usia lanjut di Puskesmas, Posbindu, maupun kegiatan homecare.



Gambar 3.9. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Tangerang



III.3.9 SASARAN 9

Terwujudnya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial

Pencapaian sasaran 9 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.24. Capaian Kinerja Sasaran 9

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			2017			2018 (Akhir RPJMD)	
		2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase penurunan PMKS	%	3,36	3,71	3,90	3,11	3,11	100,00	2,97	95,29
Persentase penduduk miskin	%	4,91	5,04	4,94	4,94	4,94	100,00	4,66	93,99
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran							100,00		94,64

Rata-rata capaian kinerja sasaran 9 Tahun 2016 melalui 2 indikator kinerja adalah sebesar 100,00%, dengan kriteria **Sangat Tinggi**, masih menyisakan 5,36% terhadap target akhir RPJMD Tahun 2018.

Beberapa informasi penting setiap indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

III.3.9.1 Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Kinerja Sasaran terwujudnya peningkatan pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial dicapai melalui indikator persentase penurunan PMKS dengan target



tahun 2017 sebesar 3,11% dan direalisasikan sebesar 3,00% sehingga capaian kinerja sebesar 103,67 %. Data jumlah PMKS per kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.25. Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Tangerang

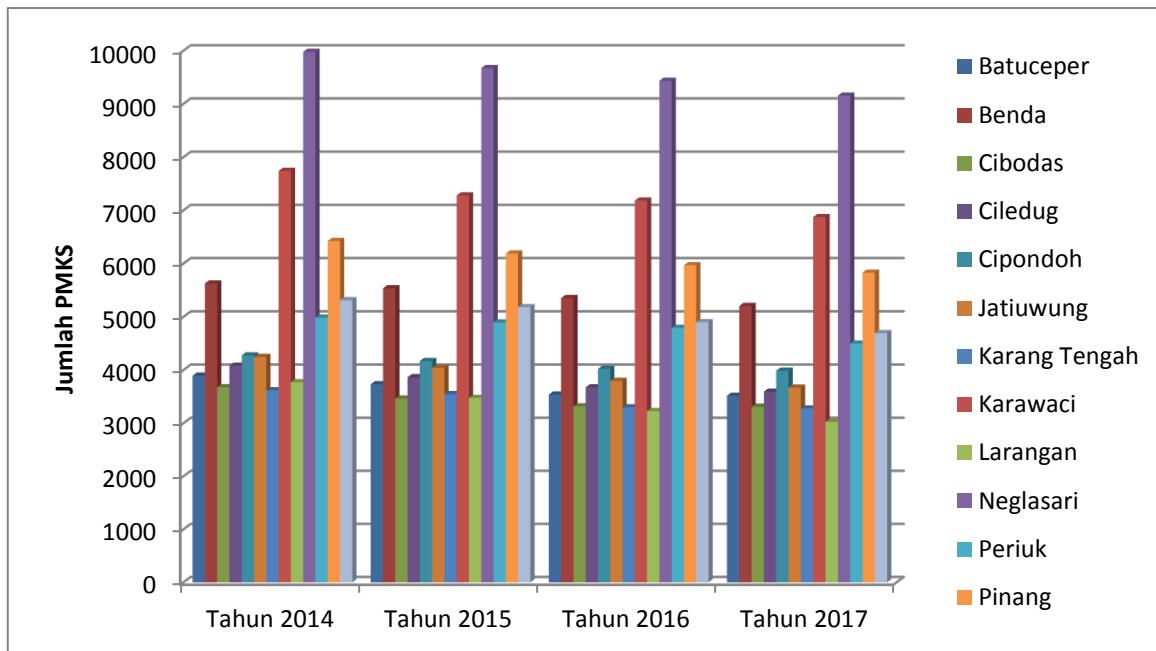
NO	KECAMATAN	JUMLAH PMKS			
		2014	2015	2016	2017
1	BATUCEPER	3.896	3.735	3.541	3.517
2	BENDA	5.628	5.536	5.353	5.205
3	CIBODAS	3.679	3.465	3.319	3.312
4	CILEDUG	4.083	3.867	3.676	3.595
5	CIPONDOH	4.276	4.171	4.023	3.989
6	JATIUWUNG	4.248	4.043	3.798	3.671
7	KARANG TENGAH	3.622	3.550	3.301	3.279
8	KARAWACI	7.743	7.282	7.185	6.875
9	LARANGAN	3.772	3.477	3.230	3.026
10	NEGLASARI	9.979	9.674	9.435	9.157
11	PERIUK	4.986	4.895	4.793	4.499
12	PINANG	6.426	6.191	5.971	5.830
13	TANGERANG	5.313	5.183	4.900	4.694
TOTAL		67.651	65.069	62.525	60.649

Sumber: Dinas Sosial, 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah PMKS Kota Tangerang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tahun 2016 jumlah PMKS mencapai 62.525 jiwa sedangkan tahun 2017 menjadi 60.649 jiwa sehingga dapat diketahui bahwa terjadi penurunan jumlah PMKS sebanyak 1.876 jiwa. Dari data tersebut dapat dihitung laju penurunan PMKS yaitu selisih jumlah PMKS dibagi jumlah PMKS tahun 2016 sebanyak 3,00%. Penurunan angka PMKS yang signifikan terjadi pada salah satu jenis PMKS yaitu angka fakir miskin, hal ini terjadi karena adanya kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang maupun kegiatan yang didanai oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi Banten berkaitan dengan peningkatan kemampuan dan pemberian bantuan modal bagi kelompok usaha bersama dan usaha ekonomi produktif. Grafik perkembangan jumlah PMKS per kecamatan dapat dilihat pada grafik di bawah ini



Gambar 3.10. Peta perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Tangerang



Upaya yang telah dilakukan

- Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi penumbuhan KUBE Keluarga Miskin sebanyak 280 orang yang tersebar di beberapa kecamatan.
- Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi sebanyak 130 orang yang tersebar di beberapa kecamatan.
- Pemberdayaan eks Penyandang Penyakit Sosial sebanyak 487 orang.

Permasalahan

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi untuk menurunkan PMKS seperti:

- Sulitnya mendapatkan data anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang valid, karena banyak diantara mereka yang merupakan warga diluar wilayah Kota Tangerang
- Belum adanya system informasi yang dapat digunakan untuk memperbaharui data PMKS, sehingga proses pemutakhiran data masih dilakukan secara manual
- Adanya beberapa jenis PMKS yang sifatnya tertutup, seperti Tuna Susila, Orang dengan HIV/AIDS, Kelompok Minoritas dan Korban Penyalahgunaan NAPZA sehingga menyulitkan para pendata untuk mendapatkan data yang valid



Upaya yang akan dilakukan

- a) Melakukan kerjasama dengan dinas terkait yakni Dinas Kominfo mengenai pembuatan aplikasi pemutakhiran data PMKS yang dapat digunakan oleh mitra Dinas Sosial sehingga data yang disajikan dapat lebih akurat.
- b) Melakukan kerjasama dengan dinas terkait mengenai permintaan data yang sulit didapatkan oleh mitra Dinas Sosial (TKSK dan PSM) terkait PMKS yang sifatnya tertutup, seperti ke Dinas Kesehatan, Satuan Polisi PP, dan Lembaga Pemasyarakatan (LP).
- c) Selain itu, Dinas Sosial tetap melaksanakan program dan kegiatan yang telah dilakukan tahun sebelumnya dalam upaya penurunan angka PMKS.

III.3.9.2 Persentase Penduduk Miskin

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun, termasuk Indonesia. Masalah mendasar (kemiskinan) tidak hanya menyangkut jumlah/persentase atau identifikasi penduduk miskin yang layak mendapat bantuan saja, juga menyangkut masalah definisi kemiskinan itu sendiri. Perbedaan definisi ini akan mengakibatkan perbedaan dalam mengukur tingkat kemiskinan dan perbedaan dalam persepsi atas hasil dan implementasinya.

Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Standar minimal kehidupan ini berbeda antara suatu daerah dengan daerah lain, karena sangat tergantung kebiasaan/adat/budaya, fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografinya. Kemiskinan di suatu wilayah terjadi karena beberapa faktor antara lain yaitu laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingginya angka ketergantungan antara penduduk yang bekerja dan pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah dan distribusi pendapatan dan pembangunan yang tidak merata. Disamping itu, ketimpangan pendapatan yang ekstrim dapat menyebabkan *in efficiency economic*, terdapat alokasi asset yang tidak efisien dan penekanan yang terlalu tinggi pada pendidikan tinggi dengan mengorbankan kualitas universal pendidikan dasar dan kemudian menyebabkan kesenjangan yang semakin melebar.

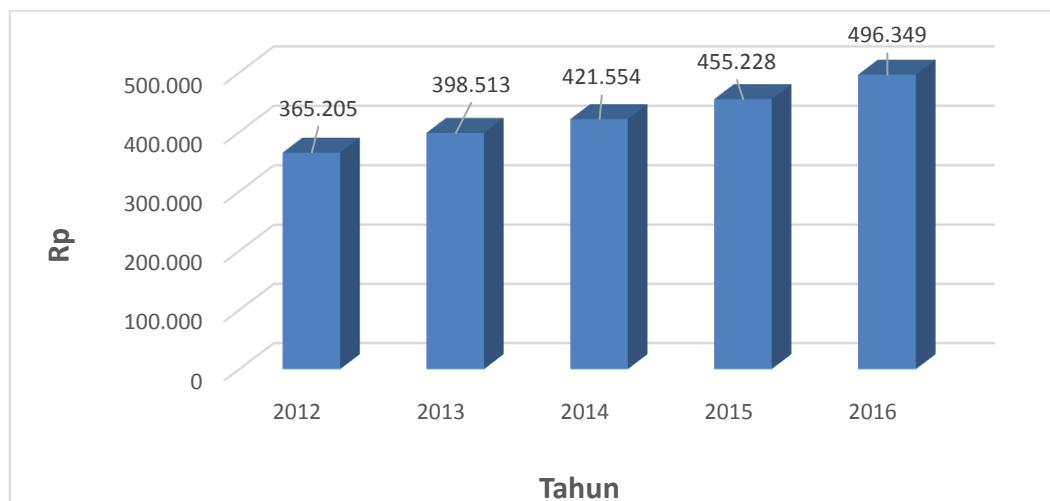
Kemiskinan absolut didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk



hidup layak. Masalah yang ditimbulkan oleh kemiskinan absolut sudah jelas dan tidak ada masyarakat yang dapat merasa nyaman dengan kondisi dimana rekan-rekan satu wilayahnya berada dalam kesengsaraan karena kemiskinan yang diderita mereka. Mungkin karena alasan itulah mengapa setiap agama menekankan pentingnya bekerja untuk menanggulangi kemiskinan dan juga merupakan salah satu alasan mengapa bantuan internasional untuk mengatasi kemiskinan selalu didukung secara universal oleh setiap bangsa yang demokratis. Seperti yang kita ketahui bahwa pengukuran tingkat kemiskinan didasarkan pada satu garis yang disebut sebagai garis kemiskinan. Garis kemiskinan ini terdiri dari 2 komponen yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan (GK) Kota Tangerang merupakan yang tertinggi diantara Kabupaten/Kota yang ada di Banten yaitu sebesar Rp455.228 pada tahun 2015 dan Rp496.349 pada tahun 2016 atau naik sebesar 9,01 persen.

Gambar 3.11. Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Tangerang 2012-2016



Tingginya Garis Kemiskinan Kota Tangerang dikarenakan tingginya harga komoditi makanan dan bukan makanan seperti perumahan, listrik, bensin, pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya berimbas pada konsumsi masyarakat kelompok marginal di Kota Tangerang. Kontribusi makanan (terutama beras) terhadap garis kemiskinan sangat tinggi yaitu sebesar 17,47 persen. Garis kemiskinan berasal dari makanan menyumbang sebesar 61,97% dan non makanan 38,02%.



Tabel 3.26. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan (Rupiah) Tahun 2011-2016

Tahun	Makanan	Bukan Makanan	Total
2011	377.062	438.666	815.728
2012	367.189	383.759	750.948
2013	497.673	636.888	1.134.561
2014	545.683	767.712	1.313.395
2015	588.960	765.752	1.354.712
2016	662.693	851.199	1.513.892

Tabel 3.26 menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk Kota Tangerang hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2011-2016. Rata-rata pengeluaran penduduk Kota Tangerang tahun 2015 sebesar Rp 1.354.712 naik menjadi Rp 1.513.892 pada tahun 2016, Apabila dibandingkan dengan garis Kemiskinan Kota Tangerang yang besarnya Rp 496.349 maka pengeluaran penduduk miskin kota tangerang besarnya hanya sepertiga dari pengeluaran rata-rata penduduk Kota Tangerang. Komposisi pengeluaran untuk makanan sebesar 43,77 persen jauh lebih kecil jika dibandingkan pengeluaran non makanan sebesar 56,23 persen. Data ini menunjukkan kebalikan dari pengeluaran pola konsumsi penduduk miskin dimana persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan 61,97 persen jauh lebih besar dibanding non makanan yang sebesar 38,02 persen.

Tabel 3.27. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tangerang

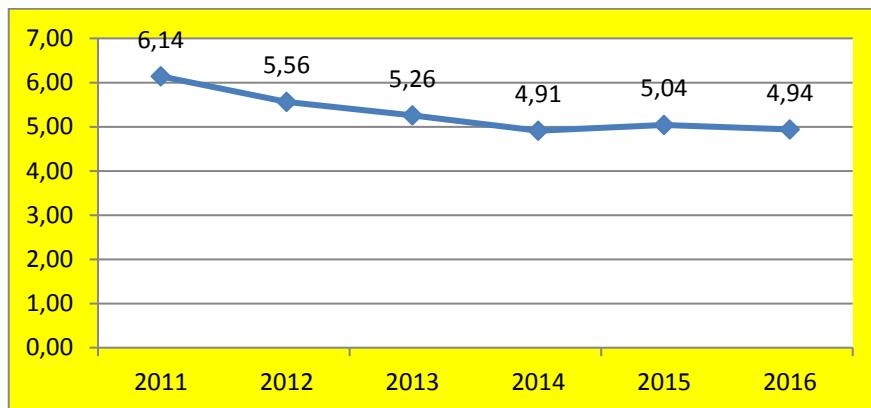
Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/ kapita/ bulan)	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2011	337.543	114.330	6,14
2012	365.205	106.500	5,56
2013	398.513	103.100	5,26
2014	421.554	98.800	4,91
2015	455.228	102.560	5,04
2016	496.349	102.880	4,94

Sumber: BPS Kota Tangerang

Tabel 3.27 menunjukkan perkembangan jumlah dan persentase Penduduk miskin Kota Tangerang dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 dimana selalu terjadi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin sampai tahun 2014 dan naik kembali di tahun 2015 dan kembali turun di tahun 2016.



Tabel 3.28. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kota Tangerang



Program kesehatan gratis, pendidikan melalui Program Tangerang Cerdas , infrastruktur dan subsidi pangan relatif tepat sasaran untuk mengentaskan kemiskinan bagi warga Kota Tangerang. Masyarakat dengan pendapatan sedikit diatas garis kemiskinan tidak tergolong miskin, tetapi sangat rentan terhadap kemiskinan biasanya hanya dengan sedikit goncangan masalah ekonomi mereka akan berubah menjadi miskin. Keadaan ini mengakibatkan banyak penduduk yang keluar masuk menjadi miskin. Oleh karenanya program - program pro kemiskinan tidak hanya ditujukan untuk mereka yang berada dibawah garis kemiskinan tetapi juga masyarakat yang rentan miskin yaitu masyarakat yang dengan mudah jatuh ke bawah garis kemiskinan.

III.3.10 SASARAN 10

Terwujudnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja

Pencapaian sasaran 10 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.29. Capaian Kinerja Sasaran 10

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			2017			2018	
		2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	Target	%
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,81	8,01	7,00	7,27	7,16	101,51	7,06	98,58

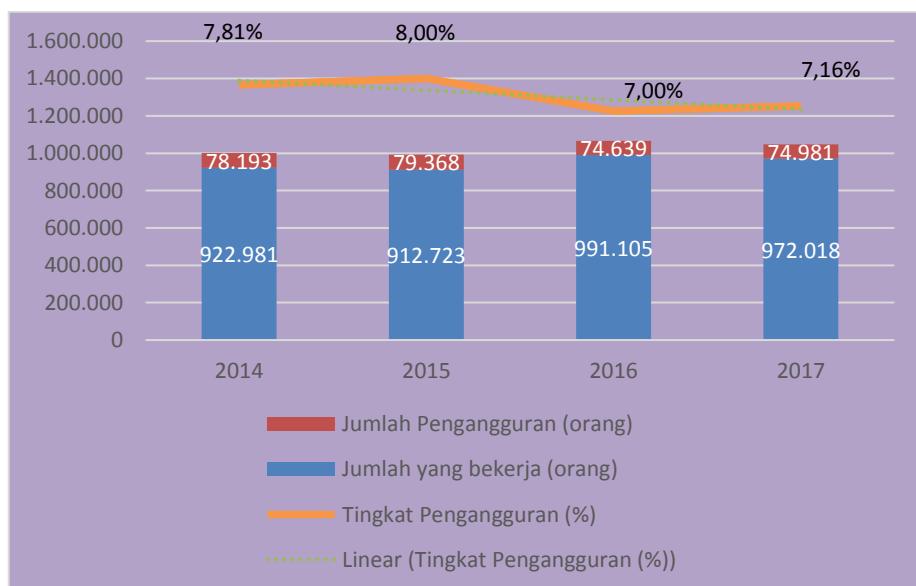
Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk



mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Indikator ini berfungsi sebagai acuan pemerintah daerah untuk pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan/kegagalan program dan kegiatan ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Secara formulasi, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dihitung melalui rasio antara jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan terhadap jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2017, jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan di Kota Tangerang sebanyak 74.981 orang, sedangkan jumlah angkatan kerjanya sebanyak 1.046.999 orang. Sehingga, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tangerang tahun 2017 sebesar 7,16%. Hal ini mengartikan bahwa diantara 100 orang yang termasuk ke dalam angkatan kerja terdapat sekitar 7 orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Jika dibandingkan dengan 4 tahun terakhir Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Tangerang cenderung stabil dikisaran 7 s.d 8 persen.

Gambar 3.12. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tangerang Tahun 2014-2017



Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2017

Upaya yang telah dilakukan

- Membentuk Bursa Kerja Khusus (BKK) di setiap SMK di Kota Tangerang. Dengan dibentuknya BKK, informasi kesempatan kerja langsung dapat diterima



oleh Siswa SMK atau calon Lulusan SMK untuk mempersiapkan memasuki dunia kerja/dunia usaha.

- b) Menyelenggarakan Bursa Kerja (*Job fair*) di Tingkat Kota sebanyak 1 (satu) kali dan di tingkat Kecamatan sebanyak 13 kali.
- c) Pembuatan/Pengembangan Aplikasi Siap Kerja untuk memudahkan masyarakat memperoleh ketersediaan lowongan kerja.
- d) Bursa kerja Online yang dikelola oleh Dinas Ketenagakerjaan.

Permasalahan

- a) Tidak semua pencari kerja terdaftar menginformasikan /melaporkan keberadaan mereka setelah mendapatkan pekerjaan atau menjadi wirausaha baru
- b) Perusahaan pemberi kerja sebagai peserta Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) tidak seluruhnya melaporkan hasil penempatan tenaga kerja
- c) Tidak Semua perusahaan (pemberi kerja) melaporkan lowongan kerja ke Dinas Ketenagakerjaan

Upaya yang akan dilakukan

- a) Pencari kerja terdaftar menginformasikan/melaporkan keberadaan mereka setelah mendapatkan pekerjaan atau menjadi wirausaha baru.
- b) Perusahaan peserta pameran kesempatan kerja (*job fair*), melaporkan hasil rekrutmennya secara berkala kepada Dinas Ketenagakerjaan.
- c) Lowongan kerja yang dilaporkan harus update dan intensitas perusahaan dalam menyampaikan lowongan kerja harus diperbanyak.
- d) Dinas Ketenagakerjaan harus memperbanyak fungsional pengantar kerja untuk pelaksanaan *job canvassing* (pencarian lowongan kerja) ke perusahaan / pemberi kerja.
- e) Angkatan kerja yang tidak bekerja (penganggur), yang merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, akan dilatih untuk menjadi wirausaha baru untuk mendapatkan penghasilan.

III.3.11 SASARAN 11

Persentase penyelesaian konflik Suku, Agama, Ras dan Adat (SARA)



Pencapaian sasaran 11 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.30. Capaian Kinerja Sasaran 11

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			2017			2018 (Akhir RPJMD)	
		2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase penyelesaian konflik Suku, Agama, Ras dan Adat (SARA)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tidak SARA. Tindakan ini mengebiri dan melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang melekat pada manusia. SARA dapat digolongkan dalam Tiga Kategori :

Kategori pertama yaitu **Individual**: merupakan tindakan Sara yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Termasuk di dalam katagori ini adalah tindakan maupun pernyataan yang bersifat menyerang, mengintimidasi, melecehkan dan menghina identitas diri maupun golongan.

Kategori kedua yaitu **Institusional** : merupakan tindakan Sara yang dilakukan oleh suatu institusi, termasuk negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja telah membuat peraturan diskriminatif dalam struktur organisasi maupun kebijakannya.

Kategori ke tiga yaitu **Kultural** : merupakan penyebaran mitos, tradisi dan ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat.

Dalam pengertian lain SARA dapat di sebut diskriminasi yang merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat manusia, ini disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan yang lain. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antar golongan, kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik lain yang diduga



merupakan dasar dari tindakan diskriminasi Diskriminasi langsung, terjadi saat hukum, peraturan atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, ras, dan sebagainya, dan menghambat adanya peluang yang sama. Diskriminasi tidak langsung, terjadi saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan.

Meningkatnya konflik yang bernaupa SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) yaitu suatu kekerasan yang dilatarbelakangi sentimental antar suku, agama, ras, atau golongan tertentu. Konflik SARA biasanya karena adanya egoisitas seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan dengan jalan kekerasan. Konflik tersebut bisa disebabkan hanya karena hal sepele, seperti tersinggung, diledek atau hal-hal yang sekiranya tidak perlu dibesar-besarkan. Bukan hanya fisik yang terkena dampaknya, psikis pun terganggu. Pasca konflik tersebut seseorang mungkin saja trauma akibat perlakuan yang tidak pernah dialami sebelumnya dan tidak mau mengalaminya lagi. Sedangkan primordialisme yaitu suatu paham yang menganggap bahwa kelompoknya lebih tinggi dan lebih hebat dari kelompok lain. Primordialisme tertuju kepada pemikiran suatu kelompok terhadap kelompok lain. Paham tersebut mengakibatkan anggota-anggotanya lebih menghormati kelompoknya sendiri dibandingkan dengan kelompok lain.

Tabel 3.31. Kejadian dan Penanganan Konflik di Kota Tangerang Tahun 2017

NO.	BULAN	JUMLAH KEJADIAN	PENANGANAN KONFLIK	PROSENTASE
1	JANUARI	12	12	100
2	FEBRUARI	16	16	100
3	MARET	13	13	100
4	APRIL	18	18	100
5	MEI	14	14	100
6	JUNI	18	18	100
7	JULI	15	15	100
8	AGUSTUS	14	14	100
9	SEPTEMBER	18	18	100
10	OKTOBER	15	15	100
11	NOVEMBER	12	12	100
12	DESEMBER	14	14	100
Jumlah		179	179	100



NO.	URAIAN	JUMLAH KONFLIK	JUMLAH PENANGANAN	PROSENTASE
1	KONFLIK BERDASARKAN SUKU	2	2	100
2	KONFLIK BERDASARKAN AGAMA	7	7	100
3	KONFLIK BERDASARKAN RAS	1	1	100
4	KONFLIK ANTAR GOLONGAN	169	169	100
	Jumlah	179	179	100

1. Konflik antar suku terjadi antara suku madura dan suku betawi serta suku ambon dan suku kupang.
2. Konflik Antar Agama terjadi karena adanya penyalahgunaan bangunan tempat tinggal maupun ruko menjadi tempat ibadah serta perbedaan aliran dalam agama dan kepercayaan tertentu yang diakui oleh pemerintah
3. Konflik antar ras terjadi akibat ekses Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta antara Ras atau Etnis Tionghoa dengan Ras Melayu
4. Konflik antar golongan yaitu terutama demonstrasi yang dilakukan oleh buruh maupun mahasiswa

Dari kejadian konflik diatas dapat ditangani dengan baik oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik bekerjasama dengan berbagai jajaran baik Kepolisian, TNI, BIN, Kejaksaan dan Tokoh Masyarakat agar tidak menimbulkan dampak yang meluas.

Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tindakan SARA. Tindakan ini mengebiri dan melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang melekat pada manusia.

Upaya yang telah dilakukan

- a) Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan.
- b) Penyusunan Database Rumah Ibadah dengan keluaran Buku Data Base Rumah Ibadah.
- c) Pengumpulan Bahan Keterangan Analisa (IPOLESBUDHANKAM-Agama) Analisa terkait dengan Masalah Gangguan Keamanan Wilayah Kota Tangerang yang dilaporkan kepada Walikota.



- d) Pengamanan Simbol Negara Daerah (Pejabat VVIP - VIP).
- e) Penanganan Konflik (IPOLESBUDHANKAM-Agama).
- f) Fasilitasi Tim Terpadu Dalam Penanganan Gangguan Keamanan Daerah dengan 4 kegiatan.
- g) Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat diikuti 300 orang peserta.
- h) Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara diikuti 300 Orang peserta.
- i) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama diikuti 300 Orang peserta.
- j) Pengawasan Organisasi yang Berafiliasi dengan Asing dan Membawa Anasir Anasir Ideologi di Luar Pancasila.
- k) Peningkatan Wawasan Kebangsaan diikuti 200 Orang peserta.
- l) Pelatihan Belanegara melalui Sosialisasi Terkait Peningkatan Wawasan Kebangsaan dikuti 104 Orang peserta.
- m) Operasi Penyalahgunaan Narkotika Wilayah Tangerang dengan 7 Kegiatan.
- n) Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan narkoba P4GN diikuti 2000 Orang peserta.
- o) Test Urine terhadap 1.200 Orang Pegawai.
- p) Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik diikuti 300 Orang peserta.
- q) Inventarisasi Data Ormas dan LSM Se-Kota Tangerang.
- r) Diskusi dan Seminar dan Partisipasi Perempuan Dalam Partai Politik diikuti 300 Orang peserta.
- s) Fasilitasi Pertemuan dan Kerjasama antar Lembaga Pemerintahan, Parpol, Ormas dan LSM diikuti 1.300 Orang peserta.
- t) Fasilitasi Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pusat di bidang Politik diikuti 300 Orang peserta.
- u) Verifikasi Bantuan Partai Politik selama 2 semester.
- v) Desk Pemilukada melalui Koordinasi Monitoring Pilkada.

Upaya yang dilakukan pada kerawanan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2018



- a) Melaksanakan Deklarasi Pilkada Damai dalam kegiatan Fasilitasi pertemuan dan kerjasama antar Lembaga Pemerintah, Ormas, LSM serta Partai Politik dengan peserta sebanyak 1000 orang dari unsur Lembaga Pemerintah, Ormas, LSM serta Partai Politik.
- b) Melaksanakan Kegiatan Desk Pemilukada yang melibatkan unsur Babinkamtibmas, Babinsa dan Lurah, unsur Kepala Polsek, Komandan Koramil dan Camat, serta Polres, Kodim dan Kantor Kesbangpol dalam rangka monitoring dan pelaporan kondisi wilayah pada saat kampanye, pencoblosan dan penghitungan serta pasca pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten
- c) Melakukan Apel bersama antara unsur Polres, Kodim, Satpol PP, Linmas, Ormas, Lurah dan Camat se-Kota Tangerang dalam rangka pengamanan pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten

Upaya yang dilakukan pada kejadian bentrokan antara Pengemudi Angkutan Online dengan Pengemudi Angkutan Umum

- a) Melaksanakan Kegiatan Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan, yaitu rapat bersama antara Tim Kominda yang diketuai oleh Wakil Walikota Tangerang dengan unsur tim intelijen dari Polres, Kodim, Kejaksaan, BIN, Tokoh Masyarakat, Satpol PP, Kasi Tramtib seKota Tangerang dan Tim Mitigasi Kesbangpol dalam rangka antisipasi dan cegah dini tindak kejahatan dan konflik sosial di masyarakat.
- b) Melaksanakan pertemuan Forkopimda antara Walikota, Kapolet, Dandim, Kajari dengan perwakilan pengemudi angkutan online dan pengemudi angkutan umum agar dicapai kesepakatan bersama untuk menjaga kondusifitas Kota Tangerang pasca bentoakan.
- c) Melaksanakan pawai bersama antara pengemudi angkutan online dan pengemudi angkutan umum yang dikawal oleh unsur Polres dan unsur Kodim dalam rangka mensosialisasikan kesepakatan damai bersama.

Upaya yang dilakukan pada Aksi Sweeping Ormas Islam sebelum perayaan hari besar agama

- a) Melaksanakan Kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama sebanyak 300 orang



- b) Melaksanakan kegiatan Fasilitasi Tim Terpadu Dalam Penanganan Gangguan Keamanan Daerah yang diketuai oleh Walikota Tangerang dengan para kepala SKPD terkait, unsur tim intelijen dari Polres, Kodim, Kejaksaan, BIN, Tokoh Masyarakat, Satpol PP, Kasi Tramtib seKota Tangerang dan Tim Mitigasi Kesbangpol.
- c) Melaksanakan pengamanan terhadap rumah ibadah dan objek vital lainnya bersama-sama antara unsur Polres, Kodim, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Trantib Kecamatan dan Organisasi Kemasyarakatan se Kota Tangerang
- d) Membuat edaran FKUB tentang Himbauan Penggunaan Atribut Keagamaan baik di sektor pemerintah maupun swasta dalam perayaan hari besar agama agar tidak memaksakan kepada para pegawai yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaannya memakai atribut keagamaan tertentu.

Upaya Yang dilakukan dalam Bentrokan antar Ormas yang sering terjadi adalah :

- a) Melakukan Kegiatan Fasilitasi pertemuan dan kerjasama antar Lembaga Pemerintah, Ormas, LSM serta Partai Politik sebanyak 300 Orang.
- b) Melaksanakan Deklarasi Pilkada Damai dalam kegiatan Fasilitasi pertemuan dan kerjasama antar Lembaga Pemerintah, Ormas, LSM serta Partai Politik dengan peserta sebanyak 1000 orang dari unsur Lembaga Pemerintah, Ormas, LSM serta Partai Politik.
- c) Melakukan Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Ormas dan LSM dengan peserta 300 orang.
- d) Dilaksanakan kegiatan Inventarisasi Data Ormas dan LSM.
- e) Pelaksanaan Pertemuan antar pengurus ormas yang bertikai dengan unsur Polres agar dikemudian hari jika terjadi pertikaian maka pengurus Ormas bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan tersebut secara hukum maupun moril

Upaya Yang dilakukan dalam Konflik Pendirian Rumah Ibadah adalah :

- a) Pembahasan Forum Kerukunan Umat Beragama agar Konflik Pendirian Rumah Ibadah dapat segera ditangani dengan baik.
- b) Melaksanakan Kegiatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan.
- c) Melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Penangan Konflik (IPOLESBUDHANKAM-Agama).
- d) Melakukan Kegiatan Pendataan Rumah Ibadah.



- e) Melakukan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.
- f) Melakukan Pertemuan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Meningkatkan Kerukunan Kehidupan Umat Beragama.

Upaya yang dilakukan Lunturnya Rasa Kebangsaan dan Rasa Solidaritas di kalangan Masyarakat adalah :

- a) Melaksanakan Kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat.
- b) Melaksanakan Kegiatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
- c) Memberikan Pembekalan sosialisasi Pemantapan Ideologi Pancasila.
- d) Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Bela Negara bagi Apartur dan Kalangan Masyarakat.
- e) Meningkatkan Nilai-nilai Kebangsaan dalam Aspek Pergaulan dikalangan Remaja.
- f) Menangkal Paham dan sifat keacuhan akan rasa solidaritas yang menjadi penyebab lunturnya kebudayaan kebangsaan yang terkenal dengan sifat bergotong royong.

Upaya yang dilakukan dengan maraknya Penyalahgunaan, Perederaan Gelap Narkoba di Kota Tangerang adalah :

- a) Memberikan Penyuluhan akan bahaya bagi pengguna narkoba dikalangan masyarakat.
- b) Melakukan Kegiatan Operasi Narkoba di Pemukiman, Tempat Hiburan, dan Perhotelan serta Sekolah Wilayah Kota Tangerang bekerjasama dengan Aparat Kepolisian khususnya dibagian Satuan Narkotika.
- c) Memperketat akan masuknya Narkotika ke wilayah Kota Tangerang dengan bekerjasama dengan pihak Bandara sebagai pintu masuknya narkotika ke Wilayah Kota Tangerang.

Upaya yang dilakukan pada terjadinya bentrok antar Kelompok Masyarakat yang mengatasnamakan Suku / Kelompok adalah :

- a) Mempertemukan terhadap Pimpinan Kelompok yang mengatasnamakan suku tertentu yang terjadi bentrok untuk dilaksanakan pembinaan di Kantor Kesbangpol Kota Tangerang.



- b) Memberdayakan Forum Pembauran Kebangsaan dengan memberikan Hibah keuangan dari Walikota Tangerang yang digunakan untuk melaksanakan pembinaan bagi para anggota kelompok/suku-suku yang ada Dikota Tangerang.
- c) Melaksanakan Deklarasi Antar Suku Untuk Menciptakan Kota Tangerang aman,damai dan sejahtera.

Permasalahan

- a) Kurangnya personil dalam penanganan konflik yang terjadi di wilayah karena luas wilayah dengan 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan hanya terdapat 14 Tenaga Mitigasi.
- b) Kurangnya peralatan keamanan dan intelijen bagi tenaga mitigasi
- c) Masih adanya bentrokan antar anggota organisasi kemasyarakatan yang berawal dari permasalahan individu
- d) Lunturnya nilai kebangsaan dan toleransi antar umat beragama dikalangan masyarakat sehingga memunculkan konflik terutama dalam pendirian rumah ibadah maupun perbedaan aliran dalam suatu agama dan kepercayaan tertentu.
- e) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Umum Legislatif maupun Pemilihan Presiden.
- f) Masih maraknya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
- g) Kurangnya upaya pemberdayaan forum-forum karena keterbatasan anggaran dan personil.
- h) Kurangnya peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam upaya meminimalisasi terjadinya konflik

Upaya yang akan dilakukan

- a) Optimalisasi Fasilitasi Penanganan Konflik (IPOLESBUDHANKAM-Agama) yang terdapat di Kelurahan dan Kecamatan setelah melalui Pendidikan Pelatihan Bela Negara
- b) Optimalisasi Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
- c) Optimalisasi Pemberdayaan Forum-Forum yang ada di Kota Tangerang dalam rangka antisipasi dan cegah dini terjadinya Konflik SARA.



- d) Perlunya sosialisasi dalam rangka penyelenggaraan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang secara luas sehingga tingkat partisipasi masyarakat lebih meningkat.
- e) Peningkatan Kerjasama dengan BNN Kota Tangerang, Polres Metro Tangerang Kota dan Polres Metro Bandara Soekarno Hatta serta Bea cukai Bandara dalam rangka Pencegahan dan Penindakan Peredaran Gelap Narkoba.
- f) Membentuk Kampung Bersih Narkoba (Bersinar).
- g) Pemberdayaan Forum-Forum melalui kegiatan Pengembangan Kemitraan Wawasan Kebangsaan

III.3.12 SASARAN 12

Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan

Pencapaian sasaran 12 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

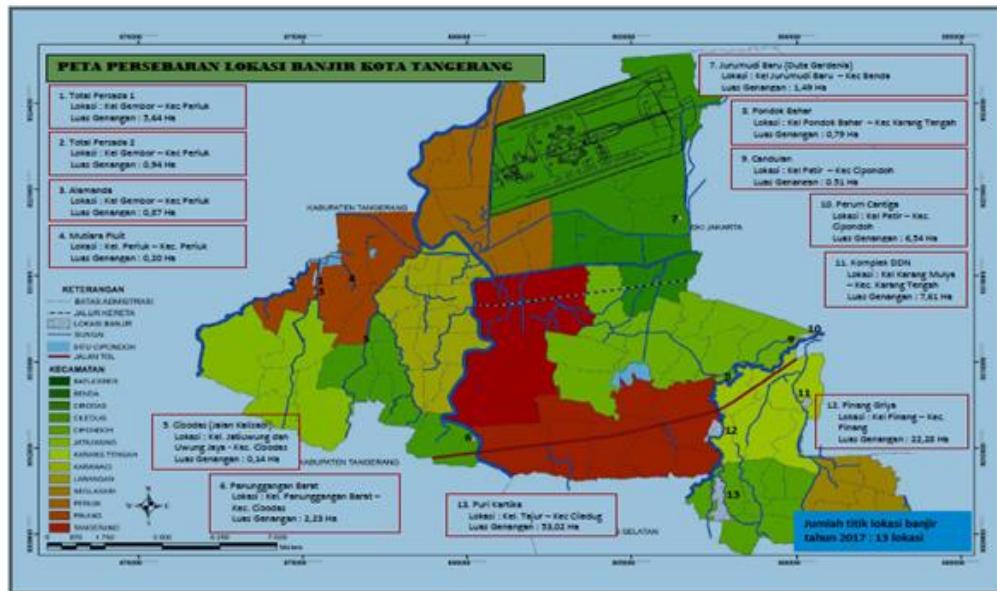
Tabel 3.32. Capaian Kinerja Sasaran 12

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			2017			2018 (Akhir RPJMD)	
		2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	Target	%
Luas genangan dan Banjir	Ha	245	240	235	230	230	100,00	225	97,78

Kinerja Sasaran terwujudnya pengendalian banjir dan genangan yang memadai dicapai melalui indikator luas genangan dan banjir dengan target tahun 2017 sebesar 230 ha dan direalisasikan sebesar 230 Ha atau 100 % dari target. Hal ini menunjukan adanya pengurangan luas banjir dan genangan seluas 5 Ha dari tahun sebelumnya (2016) seluas 235 Ha.



Gambar 3.13. Titik banjir dan genangan di kota Tangerang pada tahun 2016

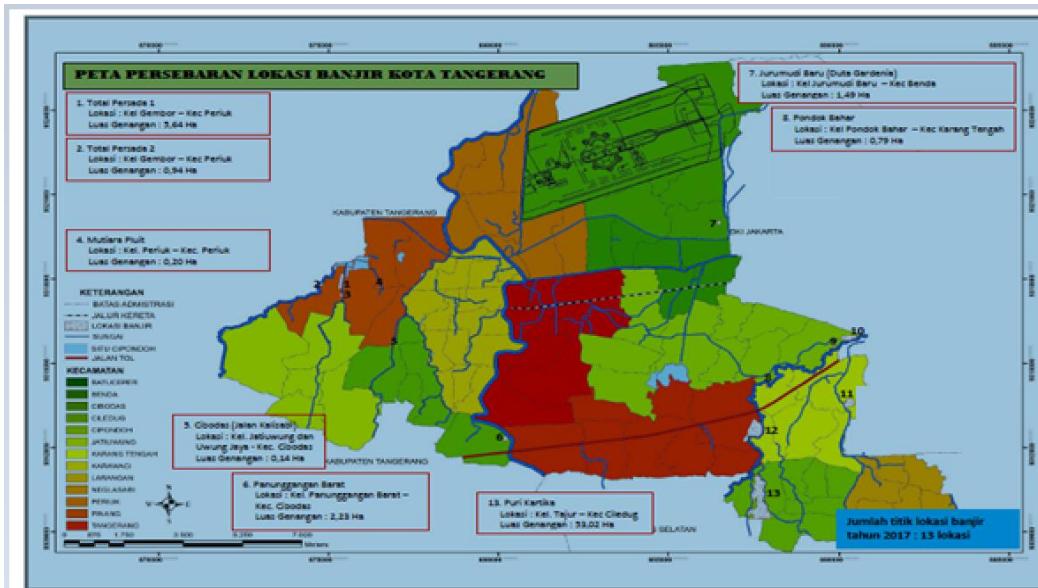


Tabel 3.33. Titik dan Luas Banjir dan Genangan Tahun 2016

No	kecamatan	Lokasi / Kelurahan	Jumlah titik banjir dan genangan		Luas banjir dan genangan		Tinggi banjir	
			genangan	banjir	genangan	banjir		
1	cipondoh	Petir	15	1	15 ha	7 Ha	100 cm	
		Candulan		1	-	0,51 Ha	100 cm	
2	Benda	Jurumudi Baru	12	1	10 ha	1,5 Ha	50 cm	
		priuk	6	-	25 ha	-	100 cm	
3		Gembor	10	1	17,5 ha	6 Ha	100 cm	
		Alamanda		1	-	0,87 Ha	100 cm	
		Mutiara Pluit		1	-	0,2 Ha	100 cm	
		Perum Cantiga		1		0,74 Ha	100 cm	
4	Cibodas	Jatiuwung	8	1	26 ha	15 ha	50 cm	
		Uwung Jaya	17	-	36 ha	-	50 cm	
		Panunggangan barat	14	1	24 ha	2,5 ha	50 cm	
		Cibodas (Kali Sabi)		1	-	0,11 Ha	100 cm	
6	Karang Tengah	PondokBahr	8	-	16,5 ha	-	50 cm	
		Komplek DDN		1	-	1,41 Ha	100 cm	
		Pinang Griya		1	-	1,16 Ha	100 cm	
6	Ciledug	Tajur	9	-	18 ha	-	50 cm	
		Pinang	4	-	12 ha	-	30 cm	
jumlah			103	5	198 ha	37 ha		
			108 titik		235 ha			



Tabel. 3.5 Titik banjir dan genangan di kota Tangerang pada tahun 2017



Tabel 3.34. Titik dan Luas Banjir dan Genangan tahun 2017

No	kecamatan	Lokasi / Kelurahan	Jumlah titik banjir dan genangan		Luas banjir dan genangan		Tinggi banjir
			genangan	banjir	genangan	Banjir	
1	Cipondoh	Petir	15	1	15 ha	7 Ha	100 cm
2	Benda	Jurumudi Baru	12	1	10 ha	1,5 Ha	50 cm
3	Priuk	priuk	6	-	25 ha	-	100 cm
		Gembor	10	1	17,5 ha	6 Ha	100 cm
4	Cibodas	Jatiuwung	8	1	26 ha	15 ha	50 cm
		Uwung Jaya	17	-	36 ha	-	50 cm
		Panunggangan barat	14	1	24 ha	2,5 ha	50 cm
5	Karang Tengah	Pondok Bahr	8	-	16,5 ha	-	50 cm
6	Ciledug	Tajur	9	-	18 ha	-	50 cm
7	Pinang	Pinang	4	-	12 ha	-	30 cm
jumlah			103	5	198 ha	32 ha	
			108 titik		230 ha		

Adapun penurunan luasan banjir dan genangan pada tahun 2017 seluas 5 Ha terdapat di Candulan kecamatan Cipondoh seluas 0,51 Ha, di Alamanda kecamatan Periuk seluas 0,87 Ha, di Mutiara Pluit kecamatan Periuk seluas 0,2 Ha, di Perum Cantiga kecamatan periuk seluas 0,74 Ha, di Cibodas (Kali Sabi) kecamatan priuk seluas 0,11 Ha, di Komplek DDN kecamatan Karang Tengah seluas 1,41 Ha, di Pinang Griya kecamatan Karang Tengah seluas 1,16 Ha.



Sedangkan dari 230 ha wilayah yang masih mengalami banjir dan genangan, terdapat di 7 kecamatan yaitu kecamatan cipondoh seluas 22 ha dengan titik banjir dan genangan sebanyak 16 titik, kecamatan benda seluas 11,5 ha sebanyak 13 titik, kecamatan priuk seluas 48,5 ha sebanyak 17 titik, kecamatan cibodas seluas 88,5 ha sebanyak 40 titik, kecamatan karang tengah seluas 15,5 ha sebanyak 8 titik, kecamatan ciledug seluas 12 ha sebanyak 9 titik, kecamatan pinang 12 ha sebanyak 4 titik.

Secara umum teridentifikasi 4 faktor utama tipologi penyebab terjadinya banjir dan genangan, yaitu:

- a) Kapasitas saluran pembuangan (sungai) yang tidak memadai (pendangkalan atau sedimentasi) 27 lokasi banjir atau genangan terdapat di kelurahan benda 8 lokasi, kelurahan jurumudi 6 lokasi, kelurahan cipondoh indah 4 lokasi, kelurahan gondrong 5 lokasi, kelurahan kunciran indah 4 lokasi.
- b) Kapasitas saluran drainase yang tidak memadai (kurangnya kapasitas saluran atau pun belum adanya saluran drainase); 65 lokasi banjir atau genangan terdapat di kelurahan petir 9 lokasi, kelurahan poris plawad 3 lokasi, kelurahan nerogtong, 4 lokasi, kelurahan cipete 4 lokasi, kelurahan sudimara pinang 12 lokasi, kelurahan alam jaya 3 lokasi, kelurahan tanah tinggi 3 lokasi, kelurahan sukarasa 4 lokasi, Kelurahan gaga 5 lokasi, kelurahan karawaci baru 6 lokasi, kelurahan karang tengah 4 lokasi, kelurahan sepajang jaya 4 lokasi, kelurahan mekarsari 4 lokasi.
- c) Rusaknya tanggul; 11 lokasi banjir atau genangan terdapat di kelurahan tajur 3 lokasi, kelurahan periuk 5 lokasi, kelurahan karang tengah 3 lokasi.
- d) Banjir kiriman dari daerah hulu; 5 lokasi banjir atau genangan terdapat di kelurahan petir, kelurahan jurumudi baru, kelurahan gembor, kelurahan jatiuwung dan kelurahan panunggangan barat.

Upaya yang telah dilakukan

- a) Pembangunan drainase sepanjang 78.104 meter dengan anggaran Rp 164.270.785.880,- yang tersebar di 13 kecamatan.



No.	Kecamatan	Panjang (Meter)
1	Tangerang	8.059
2	Jatiuwung	2.660
3	Karawaci	9.969
4	Neglasari	5.641
5	Pinang	8.284
6	Benda	4.173
7	Batuceper	3.546
8	Karang Tengah	8.793
9	Periuk	4.948
10	Cibodas	6.274
11	Cpondoh	4.014
12	Larangan	6.805
13	Ciledug	4.938
	Total	78.104

- b) Penyusunan rencana induk sistem drainase perkotaan dalam rangka mengatasi luasan banjir dan genangan seluas 230 Ha.
- c) Rehabilitasi/peningkatan, pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong sepanjang 206.482 meter dengan anggaran Rp. 9.943.053.000,- yang tersebar di 13 kecamatan.
- d) Pembangunan pintu air sebanyak 5 unit dengan anggaran Rp 1.996.500.000,- yang tersebar di kecamatan priuk (3 unit) dan kecamatan ciledug (2 unit).
- e) Pelaksanaan normalisasi saluran sungai di wilayah titik banjir dengan anggaran Rp. 4.816.395.000,- yang tersebar di 13 kecamatan.
- f) Rehabilitasi/pemeliaraan jaringan irigasi saluran sungai sepanjang 2.444 meter dengan anggaran Rp. 3.836.551.000,- yang tersebar di 13 kecamatan.
- g) Rehabilitasi/pemeliharaan pompa air sebanyak 212 unit dengan anggaran Rp. 1.035.792.000,- yang tersebar di 13 kecamatan.
- h) Pemeliharaan pompa dan diesel air sebanyak 48 unit rumah pompa dan 11 unit pompa berjalan dengan anggaran Rp. 1.256.686.000,- yang tersebar di 13 kecamatan.



- i) Pembangunan embung sebanyak 7 buah dengan anggaran Rp. 7.637.661.100,- yang tersebar di kecamatan karawaci (4 buah), kecamatan batu ceper (1 buah), kecamatan periuk (1 buah), dan kecamatan cipondoh (1 buah).
- j) Pembangunan turap dengan panjang 1.881 meter dengan anggaran Rp. 14.958.788.000,- yang tersebar di 10 kecamatan.

No.	Kecamatan	Panjang (Meter)
1	Tangerang	80
2	Jatiuwung	79
3	Karawaci	-
4	Neglasari	-
5	Pinang	161
6	Benda	159
7	Batuceper	-
8	Karang Tengah	51
9	Periuk	33
10	Cibodas	30
11	Cipondoh	1.070
12	Larangan	112
13	Ciledug	106
	Total	1.881

- k) Pembangunan pusat-pusat pengendali banjir sebanyak 23 unit dengan anggaran Rp. 51.139.690.235,- yang tersebar di kecamatan periuk (9 unit), kecamatan larangan (2 unit), kecamatan karang tengah (5 unit), kecamatan ciledug (4 unit), kecamatan tangerang (2 unit), kecamatan jatiuwung (1 unit).
- l) Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai sebanyak 10 lokasi dengan anggaran Rp. 1.667.928.000,- yang tersebar di kecamatan periuk (8 lokasi), kecamatan ciledug (1 lokasi), dan kecamatan karang tengah (1 lokasi).
- m) Pengerukan Kali sepanjang 36.000 meter dengan anggaran Rp. 8.444.849.000,- yang tersebar di 13 kecamatan.

Permasalahan

- a) Terdapat bangunan liar yang menempati sempadan sungai, sehingga menyulitkan ketika akan dilakukan pelebaran maupun normalisasi saluran sungai dan drainase.



- b) Banyak masyarakat membuang sampah di sungai sehingga menyebabkan sedimentasi. Kondisi seperti ini banyak ditemui di sepanjang bantaran sungai Cirarab di Kecamatan Periuk dan Kali Sabi di Kecamatan Cibodas.
- c) Belum terintegrasinya sistem saluran drainase, saluran primer-sekunder dan tersier, menyebabkan kesulitan ketika akan membangun saluran drainase yang baru.
- d) Curah hujan yang tinggi diatas curah hujan rencana (design).
- e) Kurangnya sarana dan sistem drainase yang memadai sebagai pengganti lahan yang mengalami perubahan fungsi tersebut, terlebih apabila perubahan tersebut tidak disertai dengan analisa tentang dampak lingkungan.
- f) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal kebersihan dan pemeliharaan terhadap sarana drainase lingkungan yang menyebabkan sistem drainase lingkungan tidak dapat berfungsi.
- g) Berubahnya/beralihnya fungsi tata guna lahan/ahli fungsi lahan yang cepat baik di daerah hulu dan kawasan perkotaan, yang semula merupakan daerah resapan air menjadi bangunan, perumahan, industry/pabrik, pertokoan, pergudangan dan sebagainya. Kondisi ini mengakibatkan semakin berkurangnya areal yang berfungsi sebagai tempat penampungan air dan resapan air sebelum menuju saluran pembuangan.

Upaya yang akan dilakukan

- a) Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong yang tersebar sebanyak 327 ruas yang tersebar di 13 kecamatan.
- b) Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong sebanyak 7 ruas yang tersebar di Kecamatan Tangerang (2 ruas), Kecamatan Batu Ceper (3 ruas), Kecamatan Cipondoh (1 ruas), dan Kecamatan Ciledug (1 ruas).
- c) Pembangunan turap/talud/bronjong yang tersebar sebanyak 41 ruas dengan panjang 3.000 meter.
- d) Perencanaan penanganan banjir atau genangan pada 10 lokasi.
- e) Pembangunan pintu air sebanyak 6 unit.
- f) Normalisasi saluran sungai di 12 titik saluran sungai.
- g) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi sepanjang 1.000 meter.



- h) Rehabilitasi /pemeliharaan pintu air sebanyak 168 unit.
- i) Pemeliharaan pompa dan diesel air sebanyak 48 unit.
- j) Pembangunan embung sebanyak 6 buah.
- k) Peningkatan pembangunan pusat pusat pengendali banjir sebanyak 28 unit.
- l) Peningkatan, pembersihan dan penggerukan sedimentasi sungai tersebar di 13 kecamatan.
- m) Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai sebanyak 14 ruas
- n) Pengadaan sarana dan prasarana pengendalian banjir sebanyak 20 unit pompa.

III.3.13 SASARAN 13

Terwujudnya pelayanan tansportasi perkotaan terpadu

Pencapaian sasaran 13 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			2017			2018 (Akhir RPJMD)	
		2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase kemacetan yang tertangani	%	75,00	79,00	89,00	93,00	95,12	100,00	100,00	95,12

Kinerja Sasaran Terwujudnya Pelayanan Transportasi Perkotaan Terpadu melalui Indikator Kinerja Sasaran Prosentase Kemacetan yang Tertangani pada 2017 dengan target sebesar 95,12% dan dapat terealisasikan sebesar 95,12%. Indikator tersebut pada tahun 2017 dalam prosentasi realisasi mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh titik macet yang ditargetkan sesuai data inventaris jumlah titik macet di seluruh wilayah kota Tangerang dan telah dipetakan sebelumnya sepanjang tahun 2017 dapat tercapai.

Pada Tahun Anggaran 2017, melalui Dinas Perhubungan Kota Tangerang telah tertangani titik kemacetan dengan melakukan Rekayasa Lalu Lintas, Penataan Ulang kembali Penempatan Personil yang ada, guna mengatasi kekurangan personil sehingga dapat menangani kemacetan yang ada, setelah dilakukan Penataan Ulang Penempatan Personil, akhirnya Titik Kemacetan yang tertangani pada Tahun 2017 ini mencapai 78



Titik Kemacetan, artinya terdapat peningkatan penanganan sebesar 5 Titik Kemacetan dari 73 Titik Kemacetan pada Tahun 2016. Dengan demikian Kinerja Sasaran dapat tercapai dengan adanya jumlah kenaikan dalam hal Penanganan Titik Kemacetan pada Tahun Anggaran 2017.

Pengendalian Kemacetan pada setiap Titik Kemacetan (Simpang ataupun ruas jalan) dilakukan dengan melalui APILL, MRL dan Petugas (Personil) ataupun dengan gabungan antara APILL dan Petugas. Selain itu juga pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan yang secara rutin memperbaiki perlengkapan jalan yang tidak berfungsi dengan baik. Terdapat juga dukungan pemeliharaan peralatan kerja seperti peralatan komunikasi bagi personil pengendalian lalulintas.

Titik Kemacetan di Kota Tangerang yang tertuang dalam RPJMD Kota Tangerang (2013 – 2018) sebanyak 82 Titik Macet, sebagai berikut :

Kecamatan Jatiuwung

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| Simpang Manis | - Simpang Pajajaran |
| Simpang Telesonic | - Simpang Prabusiliwangi |
| Simpang Gajah Tunggal | - Simpang Kel. Keroncong |

Kecamatan Periuk

- | | |
|-------------------|------------------------|
| Simpang Cadas | - Simpang KM |
| Simpang Nagrak | - Simpang Grand Tomang |
| Simpang Cangkring | - Simpang Sangiang |

Kelurahan Periuk

Simpang Vila Tangerang Regency

Kecamatan Cibodas

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| Simpang Pinangsia | - Simpang Ps. Malabar |
| Simpang Kavling Pemda | - Rs. Annisa |

Kecamatan Karawaci

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| Simp. M. Toha – Aria W. | - Simpang Gd.Cisadane |
| Simpang Galeong | - Jembatan Satria |
| Simpang Benoa | - Simpang Pintu Air 10 |
| Panarub | - Simpang Gerendeng |
| <u>Simpang M. Toha – Otista</u> | - Simpang Kenaiban |



Simp. Aria S. – Galeong – Subandi - Simpang Cimone
Simpang Sasmita - Simpang Tanah Gocap
Simp. Beringin – Proklamasi – T. Umar
Simp. Teuku Umar – Imam Bonjol

Kecamatan Neglasari

Simpang 3 Sewan - Simp. Suryadharma – Pemb. 3
Simpang 7 - Simpang M1

Kecamatan Tangerang

Simpang Tanah Tinggi - Simp. Windu Karya
Jembatan Gerendeng - Depan Tangerang City
Simpang waru - Simpang Benteng Betawi
Depan Yuppentek

Kecamatan Benda

Simpang Al Amin - Simpang Duta Garden
Simpang Rawa Bokor - Simpang Jawa Pos
Kecamatan Batuceper
Simpang Garuda – Halim P. - U Turn Kawasan Niaga
Simpang Kel. Batusari - Simpang Ampera
U Turn Bir Bintang - Simpang Maulana – Bent. Betawi

Kecamatan Cipondoh

Simpang Banjar Wijaya - Simpang Gondrong
Simpang Tm. Royal 1 & 3 - Simpang Pondok Bahar
Situ Cipondoh

Kecamatan Pinang

Kebon Nanas - Simpang Pikun
Segmen FM3 – Tifico - Simpang Pasar Bengkok
Simpang Alam Sutra - Graha Raya
Simpang Modernland

Kecamatan Karang Tengah

Akses Ciledug Indah 2 - Simpang Joglo
Simpang Bangun Reksa - Akses Perum Barata

CBD Ciledug



Kecamatan Ciledug

- Simpang Ciledug - Simpang Parub Serab
Simpang H. Mencong - Simpang Jl. Gunung Jati
Simpang Rd. Fatah – H. Mencong

Kecamatan Larangan

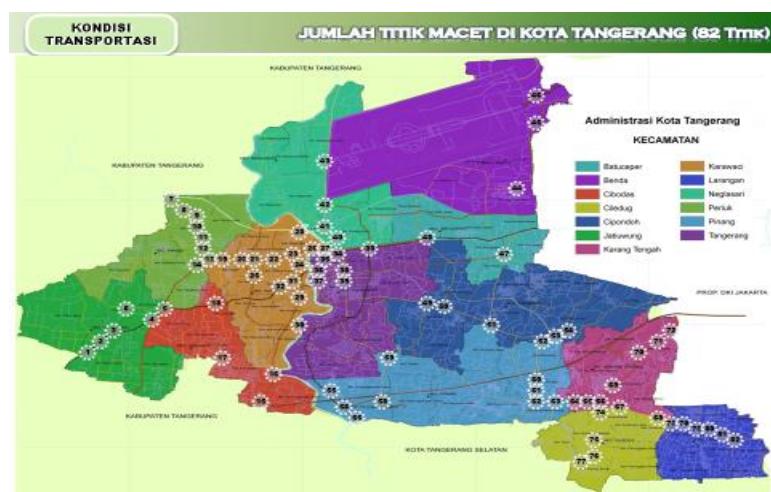
- Simpang Cipadu - Simpang Swadaya
Simpang Chairil Awar - Simpang Inpres (Puri Beta)
Simpang Prof. Hamka

Adapun 5 Titik Macet yang yang tertangani pada Tahun 2017 berada pada :

- 1) Simpang Manis di Kecamatan Jatiuwung
- 2) Simpang M.Toha – Aria Wangsakara di Kecamatan Karawaci
- 3) Simpang Duta Garden di Kecamatan Benda
- 4) Simpang Pondok Bahar di Kecamatan Cipondoh
- 5) Simpang Arah Modernland di Kecamatan Pinang

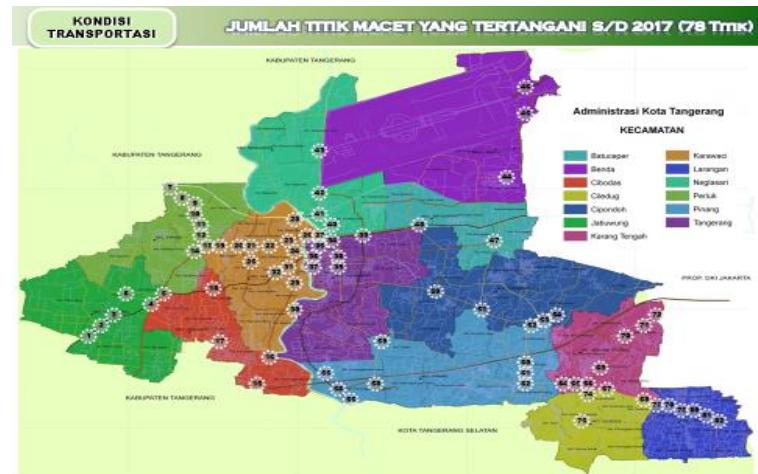
Pengendalian Kemacetan pada Titik Kemacetan (Simpang ataupun ruas jalan) dilakukan dengan melalui APILL, MRLL dan Petugas (Personil) ataupun dengan gabungan antara APILL dan Petugas.

Gambar 3.14. Jumlah Lokasi Titik Macet di Kota Tangerang (82 Titik)





Gambar 3.15. Jumlah Lokasi Titik Macet Yang Tertangani s,d 2017 (78 Titik)



Gambar 3.16. Jumlah Lokasi Titik Macet Yang Tertangani Pada Tahun 2017 (5 Titik)



Upaya yang telah dilakukan

- Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dalam rangka menyelesaikan permasalahan kemacetan yang tidak akan berhasil jika hanya satu OPD yang menangani, artinya kita butuh koordinasi dengan instansi lainnya untuk menciptakan kelancaran lalu lintas, ini dilakukan melalui Rapat Koordinasi Lalu Lintas.
- Rencana Teknis MRLL Kawasan Pintu Air 10, salah satu penanganan transportasi dilakukan dengan membuat kajian-kajian untuk menghasilkan solusi yang diharapkan.
- Rehabilitasi/ Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan, semua Fasilitas Perlengkapan Jalan harus terjaga dengan baik sesuai peruntukan dan fungsinya.



- d) Pengawasan dan Penertiban Angkutan Jalan, sebagai tindak lanjut dari Pendisiplinan Pengguna Jalan, melalui Operasi Gabungan dengan jajaran samping.
- e) Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melalui Pertemuan Rutin terkait Pembahasan Keselamatan di jalan dengan Pihak Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Kesehatan dan yang terkait lainnya.
- f) Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) mendukung Kota Layak Anak, merupakan kewajiban yang harus dilakukan Dinas Perhubungan untuk Keselamatan Para Pengguna Jalan, terutama anak-anak sekolah.
- g) Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan, untuk menjaga keberadaan Kendaraan-kendaraan pada jalurnya guna menjaga ketertiban dan keselamatan dalam berkendara.
- h) Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas, dalam rangka mengingatkan dan memberikan keteraturan kendaraan dalam berlalu lintas. Pengaturan lalulintas persimpangan adalah dengan adanya lampu pemberi isyarat berupa traffic light.
- i) Pembangunan PJU, pendukung program pelayanan langsung kepada masyarakat menjadikan sebagai Kota Tangerang terang. Selain itu PJU sendiri berfungsi sebagai pendukung kelancaran lalulintas khususnya di malam hari.
- j) Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Jalan, memenuhi fasilitas ketertiban lalulintas pada ruas jalan dalam rangka mendukung kelancaran arus lalulintas.
- k) Pengadaan Fasilitas Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas, merupakan fasilitas pendukung bagi tugas pengaturan lalulintas diperuntukan untuk kegiatan tertentu dan hari-hari khusus.
- l) Pengadaan Alat Kelengkapan MRL, Pendukung utama dalam pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalulintas sebagai upaya penanganan kemacetan lalulintas.
- m) Pengadaan Alat Pengaman Pemakai Jalan, Kebutuhan akan keselamatan dan kelancaran lalulintas adalah dengan membangun berbagai alat pengaman pemakai jalan.
- n) Operasional Wasdalops didukung oleh Petugas / Personil lapangan yang selama ini melakukan Pengaturan, Pengendalian dan Penegakkan aturan disetiap Simpang atau Ruas Jalan yang mengalami kemacetan ataupun terjadi hambatan-hambatan yang mengakibatkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas di Kota Tangerang.



Permasalahan

- a) Terkait APILL dan ATCS :
 - Adanya Kerusakan-kerusakan pada Traffic Light akibat cuaca ataupun dikarenakan masa usia kemampuan alat atau komponen nya.
 - Kurangnya SDM Penanganan Teknis Traffic Light.
 - Kurangnya daya dukung Alat untuk Penyambungan kabel FO.
 - Tidak adanya Tenaga Teknis pada Server ATCS
- b) Terkait Petugas / Personil Lapangan :
 - Kurang idealnya Jumlah Personil / Petugas pada setiap Titik Kemacetan.

Upaya yang akan dilakukan

- a) Terkait APILL dan ATCS :
 - Memperbaharui system ATCS dikarenakan sejak tahun 2011 system maupun komponen ATCS tidak pernah diperbaharui.
 - Menyediakan Cadangan (Stock) Alat atau Komponen Traffic Light, sehingga dapat mengatasi pergantian dengan segera apabila terjadi kerusakan pada komponen.
 - Menambah Peningkatan SDM Penanganan Teknis Traffic Light.
 - Pengadaan Alat untuk mendukung para Teknisi Traffic Light.
 - Memberikan pelatihan terhadap pegawai ATCS untuk dijadikan Tenaga Teknis Server ATCS.
- b) Terkait Petugas / Personil Lapangan :
 - Pengoptimalan petugas pengendalian dalam pelaksanaan tugas pengaturan lalulintas sehari-hari.
 - Memenuhi kebutuhan penunjang pengendalian lalu lintas baik fasilitas penunjang pengendalian maupun kebutuhan penunjang personil.
 - Menggerakkan Tim Reaksi Cepat Pengurai Kemacetan.

III.3.14 SASARAN 14

Terwujudnya Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Yang Layak



Pencapaian sasaran 14 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.35. Capaian Kinerja Sasaran 14

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			2017			2018 (Akhir RPJMD)	
		2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase rumah layak huni	%	98,38	98,40	98,80	99,42	99,42	100,00	99,43	99,99

Rumah layak huni dapat dilihat dari aspek kesehatan (sanitasi, sirkulasi udara, pencahayaan), aspek kecukupan luas ruang, maupun kondisi kerusakannya. Penanganan rumah tidak layak huni merupakan prioritas dalam pembangunan perumahan di Kota Tangerang.

Persentase rumah layak huni dihitung dengan membandingkan jumlah rumah atau hunian layak huni dengan jumlah rumah atau hunian yang tersedia. Dari 418.195 unit rumah yang tersedia di Kota Tangerang masih terdapat 2.459 rumah yang tidak layak huni. Dengan demikian persentase rumah layak huni tahun 2017 adalah 99,41% atau realisasi kinerja mencapai 100%.

Upaya yang telah dilakukan

Pada tahun 2017, Dinas Perumahan dan Permukiman melaksanakan pembangunan 2314 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan total anggaran mencapai Rp 38.632.912.000,- . RTLH yang dibangun terdiri atas 1500 rumah rusak berat dan 814 rumah rusak sedang/ringan. Rumah yang mendapat bantuan rehabilitasi sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Neglasari sebanyak 658 unit dan Kecamatan Cipondoh sebanyak 221 unit.

Tabel 3.36. RTLH terbangun Tahun 2017

NO.	KECAMATAN	RTLH RUSAK BERAT	RTLH RUSAK SEDANG	TOTAL RTLH
1	BATU CEPEP	69	39	108
2	BENDA	85	53	138
3	CIBODAS	157	51	208
4	CILEDUG	89	20	109
5	CIPONDOH	130	91	221
6	JATIUWUNG	95	54	149



NO.	KECAMATAN	RTLH RUSAK BERAT	RTLH RUSAK SEDANG	TOTAL RTLH
7	KARANG TENGAH	34	44	78
8	KARAWACI	98	97	195
9	LARANGAN	43	66	109
10	NEGLASARI	503	155	658
11	PERIUK	31	84	115
12	PINANG	58	29	87
13	TANGERANG	108	31	139
TOTAL UNIT		1.500	814	2.314

Secara teknis pelaksanaan dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat sebagai upaya pemberdayaan sekaligus guna meningkatkan rasa memiliki dari masyarakat. Masyarakat yang mendapat bantuan pembangunan rumah tidak layak huni harus merupakan penduduk Kota Tangerang (ber KTP Kota Tangerang), tanah milik pribadi, tidak memiliki rumah di tempat lain, serta memiliki penghasilan di bawah upah minimum.

Permasalahan

Masih terdapat Kawasan kumuh atau RTLH yang masih memerlukan bantuan dari pemerintah/ pemerintah daerah. Namun ada kesulitan dalam pemutakhiran data dari aparat kelurahan atau kelompok masyarakat yang berkompeten, sehingga diperoleh data yang valid untuk sasaran penerima bantuan pembangunan rumah layak huni.

Upaya yang akan dilakukan

Dilakukan pendataan dan pembangunan rumah tidak layak huni secara bertahap, disepakati data yang dipakai dan secara periodik dilaksanakan pemutakhiran data. Pemerintah Kota Tangerang berkomitmen untuk terus memberikan bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih memiliki rumah berkategori tidak layak huni, dengan memperkuat basis data dan melanjutkan pembangunan RTLH.

Pada tahun 2018 telah dianggarkan anggaran sebesar Rp 20.353.005.000,- untuk pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni sebanyak 1000 unit.



III.3.15 SASARAN 15

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Pencapaian sasaran 15 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.37. Capaian Kinerja Sasaran 15

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			2017			2018 (Akhir RPJMD)	
		2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	Target	%
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	(U, SB, B, C, K, SK, W)	W	W	W	SK	SK	100,00	K	66,67

Kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu perhatian utama bagi Pemerintah Kota Tangerang ditengah meningkatnya faktor-faktor pengaruh yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak pertumbuhan ekonomi maupun jumlah penduduk Kota Tangerang yang termasuk dalam kategori kota besar. Dalam perdebatan akan kualitas lingkungan hidup, satu hal yang sering sekali sulit untuk di jawab secara lugas berdasarkan data-data yang ada adalah apakah kualitas lingkungan hidup Kota Tangerang berada dalam kategori baik, sedang, atau buruk. Maka, untuk menjadi pedoman dalam menentukan kategori kualitas lingkungan hidup digunakanlah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mengukur Indeks Pencemaran Air (IPA), Indeks Pencemaran Udara (IPU), dan Indeks Tutupan Lahan (ITH).

Tujuan dari IKLH yaitu sebagai informasi bagi pengambil keputusan yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai alat untuk mengidentifikasi sumber masalah lingkungan hidup sehingga dapat diambil kebijakan untuk menentukan skala prioritas pembangunan lingkungan hidup, dan sebagai bahasa komunikasi yang menjadi penggerak bagi keterlibatan publik untuk ikut aktif menjaga kequalitas lingkungan hidup.

IKLH dihitung berdasarkan jumlah nilai dari 3 hasil pengukuran indeks yaitu Indeks Pencemaran Air (IPA) dengan bobot 30%, Indeks Pencemaran Udara (IPU)



dengan bobot 30%, dan Indeks Tutupan Lahan (ITH) dengan bobot 40%. sebagaimana rumus berikut :

$$\text{IKLH} = (\text{IPA} \times 30\%) + (\text{IPU} \times 30\%) + (\text{ITH} \times 40\%)$$

Keterangan :

IKLHLH	:	Indeks Kualitas lingkungan Hidup
IPA	:	Indeks Pencemaran Air
IPU	:	Indeks Pencemaran Udara
ITH	:	Indeks Tutupan Lahan

Kategori IKLH	Nilai
Unggul	$x > 90$
Sangat Baik	$82 < x \leq 90$
Baik	$74 < x \leq 82$
Cukup	$66 \leq x \leq 74$
Kurang	$58 \leq x < 66$
Sangat Kurang	$50 \leq x < 58$
Waspada	$x < 50$

Indeks Pencemaran Air (IPA)

Indeks Pencemaran Air (IPA) diperoleh dari data hasil uji laboratorium sampel air sungai dan situ meliputi 3 parameter yaitu Fisika (suhu, zat padat tersuspensi, & zat oadat larut), kimia anorganik (BOD, COD, pH, Minyak, dan lain-lain), dan mikro biologi (Total Coliform). Hasil uji laboratorium dari 3 parameter tersebut kemudian dianalisis dengan perhitungan Indeks Pencemaran sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.115 tahun 2003 tentang pedoman penentuan status mutu air. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan. Indeks ini dinyatakan sebagai Indeks Pencemaran (IP) / Pollution Index (PI) yang digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap parameter kualitas air yang diizinkan. Sample air sungai atau situ yang diambil untuk diuji, hasilnya dapat menggambarkan tingkat pencemaran yang terjadi jika hasil nilai IP nya berada pada interval berikut :



$0 \leq PIj \leq 1,0$	= memenuhi baku mutu (kondisi baik)
$1,0 < PIj \leq 5,0$	= cemar ringan
$5,0 < PIj \leq 10$	= cemar sedang
$PIj > 10$	= cemar berat

IPA tahun 2017 diukur dengan mengambil air di 9 (sembilan) lokasi sampel yaitu Sungai Cisadane, Sungai Mokevart, Sungai Angke, Sungai Sabi, Sungai Cicarab, Situ Cipondoh, Situ Gede, Situ Bulakan, dan Sungai Cangkring. Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap sampel air dari Sembilan lokasi tersebut, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.38. Hasil IPA Sungai Cisadane

Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	Prosentase pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
1	2	3	4	$5 = 3 \times 4$
Memenuhi			70	-
Cemar Ringan	16	100%	50	50
Cemar Sedang			30	
Cemar Berat			10	
Total	16			50

Tabel 3.39. Hasil IPA Sungai Mokevart

Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	Prosentase pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
1	2	3	4	$5 = 3 \times 4$
Memenuhi		0%	70	-
Cemar Ringan	12	100%	50	50
Cemar Sedang		0%	30	0
Cemar Berat		0%	10	0
Total	12	100%		50

Tabel 3.40. Hasil IPA Sungai Angke

Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	Prosentase pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
1	2	3	4	$5 = 3 \times 4$
Memenuhi		0%	70	-
Cemar Ringan	16	100%	50	50
Cemar Sedang		0%	30	0
cemar Berat		0%	10	0



Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	Prosentase pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
Total	16	100%		50

Tabel 3.41. Hasil IPA Sungai Sabi

Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	Prosentase pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
1	2	3	4	$5 = 3 \times 4$
Memenuhi		0%	70	-
Cemar Ringan	12	100%	50	50
Cemar Sedang		0%	30	0
cemar Berat		0%	10	0
Total	12	100%		50

Tabel 3.42. Hasil IPA Sungai Cirarab

Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	Prosentase pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3 X 4)
Memenuhi		0%	70	-
Cemar Ringan	10	100%	50	50
Cemar Sedang		0%	30	0
cemar Berat		0%	10	0
Total	10	100%		50

Tabel 3.43. Hasil IPA Situ Cipondoh

Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	Prosentase pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3 X 4)
Memenuhi		0%	70	-
Cemar Ringan	8	100%	50	50
Cemar Sedang		0%	30	0
cemar Berat		0%	10	0
Total	8	100%		50



Tabel 3.44. Hasil IPA Situ Gede

Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	Prosentase pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3 X 4)
Memenuhi		0%	70	-
Cemar Ringan	3	60%	50	30
Cemar Sedang	2	40%	30	12
Cemar Berat		0%	10	0
Total	5	100%		42

Tabel 3.45. Hasil IPA Situ Bulakan

Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	Prosentase pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3 X 4)
Memenuhi		0%	70	-
Cemar Ringan	5	100%	50	50
Cemar Sedang		0%	30	0
Cemar Berat		0%	10	0
Total	5	100%		50

Tabel 3.46. Hasil IPA Situ Cangkring

Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	Prosentase pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3 X 4)
Memenuhi		0%	70	-
Cemar Ringan	5	100%	50	50.00
Cemar Sedang		0%	30	0.00
Cemar Berat		0%	10	0.00
Total	5	100%		50.00

Tabel 3.47. Hasil Rekap IPA

Lokasi	Nilai Indeks Pencemaran Air (IPA)
Sungai Cisadane	50
Sungai Mokervart	50
Sungai Angke	50
Sungai Sabi	50



Lokasi	Nilai Indeks Pencemaran Air (IPA)
Sungai Cirarab	50
Situ Cipondoh	50
Situ Gede	42
Situ Bulakan	50
Situ Cangkring	50
Rata-rata	49,11

Dari perhitungan nilai IPA terhadap 9 (sembilan) sampel lokasi sebagaimana disajikan pada tabel 1.11 dapat disimpulkan bahwa Indeks Pencemaran Air (IPA) tahun 2017 berada pada nilai rata-rata : 49,11. Nilai indeks tersebut memiliki kecenderungan meningkat jika dibandingkan tahun 2015 dengan nilai IPA 22.71 dan tahun 2016 dengan IPA 43.74. Nilai IPA yang meningkat selama 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa kualitas air di Kota Tangerang semakin membaik.

Indeks Pencemaran Udara

Indeks Pencemaran Udara diukur dengan menguji sampel di 37 (tiga puluh tujuh) titik pantau yang terbagi menjadi 2 periode yakni periode 1 sebanyak 19 titik pantau dan periode 2 sebanyak 18 titik pantau dengan durasi pemantauan 24 jam yang tersebar di 13 Kecamatan di Kota Tangerang. Parameter dan waktu pengukuran mengacu pada regulasi PP No.41 tahun 1999 tentang Baku Mutu Udara Ambient untuk memperoleh nilai perbandingan atau rasio nilai pencemaran NO₂ dan SO₂ terhadap nilai baku mutunya. NO₂ dan SO₂ adalah 2 parameter uji yang digunakan untuk menghitung Indeks Pencemaran Udara (IPU). Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Hasil perhitungannya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.48. Hasil Perhitungan Indeks Pencemaran Udara Tahun 2017

Parameter	Rerata pemantauan	Baku mutu	Index 2017
NO ₂	6.5295µg/Nm ³	40	0.163238
SO ₂	18.045µg/Nm ³	20	0.90225
Indeks Udara (Indeks Annual model EU-leu)			0.532744
Indeks Kualitas Udara (IKU)			75.95868



Berdasarkan hasil rata-rata pemantauan uji lapangan terhadap parameter NO₂ tahun 2017 diperoleh hasil 6.5295 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, lebih rendah dibandingkan tahun 2016 (22,24 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$). Sedangkan parameter SO₂ tahun 2017 diperoleh hasil 18.045 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, tetapi lebih tinggi dari tahun 2016 (10.65 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$). Maka, perhitungan nilai indeks kualitas udara (IKU) dapat disimpulkan bahwa IKU tahun 2017 berada pada nilai 75,95. Nilai indeks tersebut lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2015 dengan nilai IKU 75,31 dan lebih rendah dari tahun 2016 dengan IPA 76,59. Tetapi secara umum hasil uji 2 parameter masih menunjukkan kondisi udara yang baik.

Indeks Tutupan Lahan

Tabel 3.49. Hasil Perhitungan Indeks Tutupan Lahan (ITL) 2017

Luas Hutan/ lahan (km^2)	Luas Wilayah (km^2)	Persentase Luas Tutupan Hutan/Lahan	ITL
35,53	181,86	19.53700649	40.36556767

Indeks Tutupan Lahan (ITH) diukur dengan memperhitungkan luas ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah Kota Tangerang. Berdasarkan kegiatan Kajian Pencapaian Ruang Terbuka Hijau tahun 2017 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, diperoleh bahwa luas RTH publik dan privatdi Kota Tangerang mencapai 35,53 KM², sehingga jika dibandingkan dengan luas wilayah Kota Tangerang 181,86 KM² maka persentase RTH publik baru mencapai 19,53%. Dengan mengacu pada rumusan baku perhitungan ITH, maka ITH Kota Tangerang berada pada angka 40,36.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Tangerang

Dari perhitungan Indeks Pencemaran Air (IPA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Lahan tersebut maka dapat diambil kesimpulan nilai IKLH Kota Tangerang sebagai berikut:

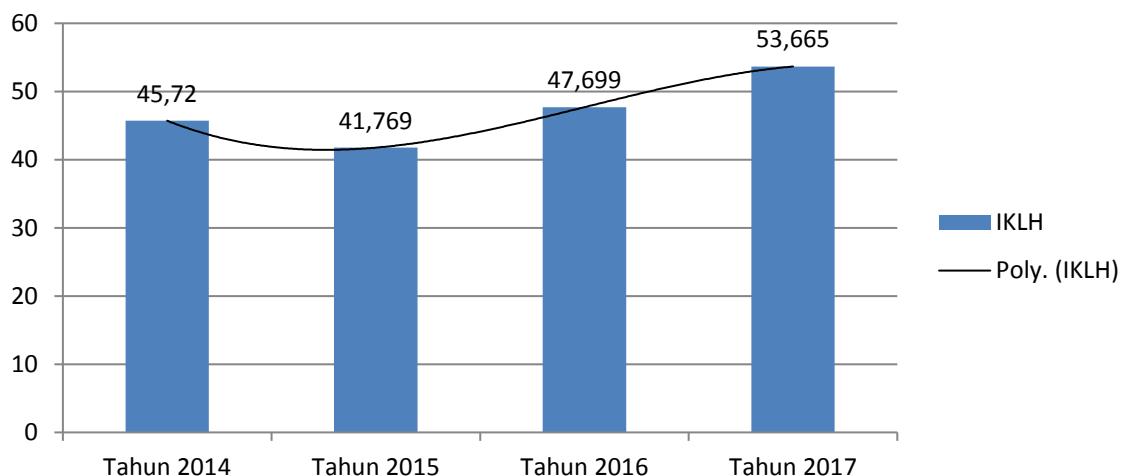
Tabel 3.50. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Indikator	Nilai	Bobot	Hasil
1	Indeks Pencemaran Air	49.11	30%	14.733
2	Indeks Pencemaran Udara	75.96	30%	22.788
3	Indeks Tutupan Lahan	40.36	40%	16.144
	IKLH Kota Tangerang			53.665



Berdasarkan Tabel 3.50 diatas, maka Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tangerang tahun 2017 sebesar **53,665** dan berada dalam kategori “**Sangat Kurang**” (**SK**). Pencapaian tersebut telah sesuai dengan target RPJMD dan Rencana Strategis DLH tahun 2017 meskipun, pencapaian tersebut harus lebih ditingkatkan karena hasil uji Indeks Pencemaran Air di beberapa titik lokasi masuk kategori cemar ringan, Indeks Kualitas Udara masih dalam kategori baik, dan Indeks Tutupan Lahan masih perlu menambah luas ruang terbuka hijau. Jika membandingkan dengan hasil pengukuran IKLH 3 tahun kebelakang dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut :

Gambar 3.17. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Tahun 2014-2017



Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai IKLH dari tahun 2014 hingga 2016 masih dalam kategori status “Waspada” dengan nilai indeks dibawah 50, kemudian mengalami peningkatan menjadi kategori “Sangat Kurang” dengan nilai indeks 53,665. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa kondisi IKLH selama 4 tahun terakhir cenderung membaik, tetapi pencapaian tersebut harus lebih ditingkatkan untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang lebih tinggi yakni mencapai kategori “Unggul”.

Upaya Yang Telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yakni sebagai berikut:

- a) Menata lingkungan pemukiman yang berwawasan lingkungan melalui Penataan Lingkungan Kampung Hijau di 10 lokasi kelurahan yaitu Mekar Sari, Karang Sari,



Kunciran Indah, Sudimara Pinang, Panunggangan Barat, Poris Plawad Utara, Poris Plawad Indah, Suka Asih, Cibodas, dan Cibodas Sari.

- b) Meningkatkan kualitas udara dan tutupan lahan melalui Kegiatan Hari Bebas Kendaraan di 6 lokasi : Puri Beta I Kecamatan Larangan, Jalan Pinang Kunciran Kecamatan Pinang, Jalan Irigasi Sipon Kecamatan Cipondoh, Jalan M. Yamin Kecamatan Tangerang, Jalan Suryadharma Kecamatan Neglasari dan Perumnas Kecamatan Cibodas.
- c) Peningkatan Penghijauan Kota dengan menanam 1.500 pohon produktif.
- d) Meningkatkan peran serta masyarakat untuk melakukan upaya pengelolaan dan perlindungan kondisi lingkungan hidup melalui
 - pembinaan 300 RW yang tersebar di 104 kelurahan Kota Tangerang dengan Sosialisasi Kampung Iklim.
 - Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA,
 - Penilaian Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup,
 - Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengendalian Pencemaran Udara, dan Pengelolaan limbah B3.
- e) Menangani pengaduan, penyelesaian sengketa, dan penegakkan hukum lingkungan hidup sebagai upaya untuk mencegah atau menghentikan pencemaran/perusakan yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup, melalui upaya sebagai berikut:
 - Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup. Selama tahun 2017 DLH telah menerima dan memproses 39 kasus lingkungan hidup yang diadukan oleh masyarakat.
 - Penanganan Kasus Lingkungan Hidup. Selama tahun 2017 DLH telah menyelesaikan 30 kasus lingkungan hidup.
- f) Melakukan pemantauan kualitas air, udara, dan kebisingan untuk mengetahui tingkat pencemarannya melalui kegiatan :
 - Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Kondisi Ekologis.



- Pemantauan Kualitas Air Tanah dan Air Situ di Sembilan lokasi sungai dan situ (Sungai Cisadane, Sungai Mokevart, Sungai Angke, Sungai Sabi, Sungai Cicarab, Situ Cipondoh, Situ Gede, Situ Bulakan, dan Sungai Cangkring).
 - Pemantauan Kualitas Udara dan Kebisingan di 19 titik pantau (Pasar Bengkok, Jalan Pinang Kunciran, Kantor Kelurahan Pasir Jaya, Jalan Siliwangi, Jembatan Tatung, Jalan Pembangunan 1, Perbatasan Rajeg – Kota Tangerang, Jalan Bayur, Jl. HOS Cokroaminoto, Kantor Kelurahan Pajang Lama, Jl. Raden Saleh, Pasar Malabar, Simpang Jl. Cipto Mangunkusumo – Duta Sinar, Jl. Marsekal Suryadarma, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Gedung Pusat Pemerintahan, Simpang 3 Robinson, Simpang 3 Gedung Cisadane, dan Kantor Kecamatan Karawaci).
- g) Meningkatkan pencapaian prestasi Adipura dan membina sekolah adiwiyata. Di tahun 2017 Pemerintah Kota Tangerang berhasil memperoleh penghargaan Adipura Kencana dan berhasil membina 5 sekolah sehingga mendapatkan penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri tingkat Nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ke-5 sekolah tersebut adalah : SDN Gondrong 4, SDN Total Persada, SMPN 5, SDN Tangerang 15, dan SDN Sangiang Jaya. Pencapaian tersebut tentunya ikut andil dalam meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Permasalahan

- a) Kualitas air secara umum masih tergolong baik, tetapi masih ditemukan nilai indeks pencemaran air di beberapa titik air sungai dan situ yang tercemar ringan. Hal tersebut disebabkan oleh masih ditemukannya sampah rumah tangga di saluran air dan limbah cair yang dihasilkan oleh rumah tangga, industri, rumah sakit, dan pusat perdagangan dan jasa yang masih melebihi Baku Mutu Lingkungan (BML).
- b) Kualitas udara secara umum berada pada kondisi cukup baik, tetapi tahun 2017 ditemukan konsentrasi parameter SO₂ yang lebih tinggi dari tahun 2016 meskipun masih berada dalam batas wajar sebagaimana kualitas NO₂. Tetapi, kandungan SO₂ yang cenderung meningkat selama 2 tahun terakhir tersebut perlu diwaspadai karena berdampak negative terhadap lingkungan.



- c) Luas ruang terbuka hijau yang perlu ditambah, karena hingga saat ini luas RTH adalah 35,53 KM². Luas harus ditambah guna meningkatkan nilai Indeks Tutupan Lahan, mengurangi polusi udara, dan meningkatkan kualitas udara.

Upaya yang akan dilakukan

- a) Upaya meningkatkan Indeks Kualitas Air :
- Membangun sarana prasarana pemulihian kualitas lingkungan hidup, di tahun 2018 akan membangun 5 unit instalasi pengolahan air limbah untuk meningkatkan mutu air limbah yang dibuang ke saluran air dan 33 unit sumur resapan untuk memperbaiki mutu air tanah.
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak buang sampah di saluran air dan meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah dengan menambah jumlah TPST 3R dan tempat pembuangan sampah sementara untuk mengurangi jumlah sampah terbuang ke sungai.
- b) Upaya meningkatkan Indeks Kualitas Udara dengan melaksanakan kegiatan hari bebas kendaraan setiap hari minggu.
- c) Upaya meningkatkan Indeks Tutupan Lahan dengan melaksanakan kegiatan penanaman 1.000 pohon produktif dan penyerap polutan pada event tahunan Hari Menanam Pohon untuk meningkatkan penghijauan.
- d) Meningkatkan pengawasan melalui kegiatan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup.

Dari hasil evaluasi capaian kinerja Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2017 didapatkan nilai capaian kinerja pada tahun 2017 memperoleh predikat **Sangat Tinggi**, dengan **rata-rata seluruh capaian kinerja dari 15 sasaran adalah 111,01%**.

Pada Tahun 2017, pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan mencakup pencapaian 15 (lima belas) sasaran stratejik. Dari penilaian sendiri (*self assessment*) untuk seluruh indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dan mengacu pada skala ordinal di atas, maka capaian kinerja sasaran dalam Tahun 2017 adalah sebagai berikut:



Tabel 3.51. Rata-rata Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2017

No.	Sasaran	% Rata2 Capaian Kinerja Sasaran	Kriteria
1	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	113,90	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	116,67	Sangat Tinggi
3	Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	106,06	Sangat Tinggi
4	Terwujudnya peningkatan investasi dan kemudahan perijinan	112,64	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya kepariwisataan	203,69	Sangat Tinggi
6	Terwujudnya industri yang maju	96,20	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	102,11	Sangat Tinggi
8	Meningkatnya aksesibilitas kesehatan	100,00	Sangat Tinggi
9	Terwujudnya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial	100,00	Sangat Tinggi
10	Terwujudnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja	101,51	Sangat Tinggi
11	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepoltikan dan hukum	100,00	Sangat Tinggi
12	Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan	100,00	Sangat Tinggi
13	Terwujudnya pelayanan transportasi perkotaan terpadu	102,28	Sangat Tinggi
14	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak	100,00	Sangat Tinggi
15	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	100,00	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Keseluruhan		110,34	Sangat Tinggi

III.4 REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kota Tangerang penganggarannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang sebesar Rp4.491.146.524.148,69 dan direalisasikan sebesar Rp3.666.689.086.673,00 (81,64%). Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk pendanaan belanja tidak langsung sebesar Rp1.343.886.886.059,31 dan belanja langsung sebesar Rp3.147.259.638.089,38. Alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp3.147.259.638.089,38 diperuntukan bagi pendanaan program dan kegiatan pada 43



SKPD yang meliputi 24 urusan wajib, 5 urusan pilihan, 5 urusan penunjang urusan, 2 urusan pendukung, 1 urusan kesatuan bangsa dan politik, 1 urusan kewilayahan, 270 program dan 1.842 kegiatan. Alokasi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2017 diprioritaskan pada pendanaan untuk:

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Peningkatan manajemen transportasi perkotaan;
3. Peningkatan manajemen sumber daya pemerintah dan masyarakat kota;
4. Peningkatan sanitasi dan drainase perkotaan;
5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup perkotaan; dan
7. Peningkatan ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan.

Tabel 3.52. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Tidak Langsung	1.343.886.886.059,31	1.295.347.849.082,00	96,38
Belanja Pegawai	1.269.244.777.171,31	1.223.673.217.558,00	96,40
Belanja Hibah	69.363.946.770,00	68.967.946.770,00	99,43
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	1.278.162.118,00	1.030.008.579,00	80,59
Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	1.676.676.175,00	41,92
Belanja Langsung	3.147.259.638.089,38	2.371.341.237.591,00	75,35
Belanja Pegawai	103.460.312.699,62	43.321.821.190,00	41,87
Belanja Barang dan Jasa	1.705.569.827.643,05	1.317.716.922.049,00	77,29
Belanja Modal	1.338.229.497.746,71	1.010.302.494.352,00	75,46
J u m l a h	4.491.146.524.148,69	3.666.689.086.673,00	81,64

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2018

Untuk Tahun 2017 anggaran belanja langsung mencakup 70,08% dari total anggaran belanja daerah. Sedangkan untuk realisasi belanja daerah sebesar Rp3.666.689.086.673,00 (81,64%) berada di bawah target realisasi sebesar 100% dengan capaian realisasi terendah adalah belanja langsung sebesar 75,35%.

Anggaran Belanja Langsung merupakan bagian dari APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 dengan komposisi belanja APBD Kota Tangerang, sebagai berikut :



Tabel 3.53. Komposisi Belanja Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.343.886.886.059,31	1.295.347.849.082,00	35,33
2	Belanja Langsung	3.147.259.638.089,38	2.371.341.237.591,00	64,67
	Jumlah	4.491.146.524.148,69	3.666.689.086.673,00	100,00

Sumber: BPKD, 2018

Alokasi anggaran Belanja Langsung apabila dilihat berdasarkan urusan yang ditangani oleh Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.54. Alokasi dan Realisasi Anggaran berdasarkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2017

No	Urusan	Jml Program	Jml Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
I	Wajib	184	1369	3,649,956,125,862.93	2,820,203,007,458.00
A	Wajib Pelayanan Dasar	74	811	2,123,517,793,983.50	1,490,930,881,569.00
1	Pendidikan	7	422	705,251,701,328.76	514,586,526,013.00
2	Kesehatan	21	151	458,897,825,387.88	199,674,725,874.00
3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	18	80	767,531,902,458.86	611,964,104,837.00
4	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	10	66	125,687,701,760.00	100,935,070,202.00
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	6	27	27,802,900,090.00	26,952,408,060.00
6	Sosial	12	65	38,345,762,958.00	36,818,046,583.00
B	Wajib Non Pelayanan Dasar	110	558	651,954,915,259.88	492,008,028,780.00
7	Tenaga Kerja	8	36	11,214,482,788.00	10,761,452,192.00
8	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	7	26	4,689,214,700.00	4,556,878,386.00
9	Pangan	5	31	5,341,817,700.00	5,017,543,956.00
10	Pertanahan	7	23	119,709,091,369.16	9,909,356,813.00
11	Lingkungan Hidup	11	72	182,839,090,519.00	167,771,677,321.00
12	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3	35	12,827,340,741.00	11,277,589,288.00
13	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1	6	6,583,808,400.00	6,560,262,900.00
14	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	7	16	11,662,847,060.00	11,397,452,960.00
15	Perhubungan	11	57	205,562,764,231.72	179,820,173,771.00
16	Komunikasi Dan Informasi	8	62	30,072,014,618.00	27,841,538,631.00
17	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	8	34	8,171,080,940.00	7,784,638,487.00
18	Penanaman Modal	7	28	6,155,877,770.00	5,451,392,729.00
19	Kepemudaan Dan Olah Raga	10	47	32,646,762,759.00	31,151,922,448.00
20	Statistik	1	4	586,140,000.00	578,415,000.00



No	Urusan	Jml Program	Jml Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
21	Persandian	1	1	150,000,000.00	132,232,680.00
22	Kebudayaan	5	21	7,475,786,293.00	5,921,692,346.00
23	Perpustakaan	6	41	5,355,278,171.00	5,269,682,322.00
24	Kearsipan	4	18	911,517,200.00	901,198,500.00
II Pilihan		24	33	25,925,467,854.00	20,769,534,119.00
1	Kelautan Dan Perikanan	1	2	446,909,900.00	444,075,600.00
2	Pariwisata	3	9	3,840,877,400.00	3,713,207,400.00
3	Pertanian	6	9	2,146,239,854.00	1,946,386,659.00
4	Perdagangan	5	13	12,823,147,500.00	8,272,379,857.00
5	Perindustrian	9		6,668,293,200.00	6,393,484,603.00
III Penunjang Urusan		30	248	67,756,732,644.00	64,573,731,778.00
1	Inspektorat	7	30	5,185,731,100.00	4,849,906,223.00
2	Perencanaan	11	97	20,866,817,446.00	20,195,302,465.00
3	Keuangan	5	78	25,236,244,948.00	24,120,325,815.00
4	Kepegawaian	6	23	13,231,767,450.00	12,570,169,681.00
5	Pendidikan Dan Pelatihan	1	20	3,236,171,700.00	2,838,027,594.00
No	Urusan	Jml Program	Jml Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
IV Pendukung		15	104	171,436,875,348.00	140,324,848,351.00
1	Sekretariat Daerah	9	67	80,112,288,748.00	72,882,935,488.00
2	Sekretariat Dprd	6	37	91,324,586,600.00	67,441,912,863.00
V Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik		12	54	36,259,131,127.00	35,701,626,279.00
1	Kesatuan Bangsa Dan Politik	12	54	36,259,131,127.00	35,701,626,279.00
VI Kewilayahan		5	34	70,408,721,873.00	66,816,350,984.00
1	Kecamatan	5	34	70,408,721,873.00	66,816,350,984.00
JUMLAH		270	1842	4,491,146,524,148.69	3,604,567,091,263.00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2018

Permasalahan

Dalam rangka pengelolaan belanja daerah masih terdapat permasalahan yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2017, adalah sebagai berikut:

1. Adanya program-program lanjutan strategis, terutama program dan kegiatan fisik dengan nilai anggaran yang cukup besar, sehingga berpengaruh terhadap keseluruhan rencana alokasi anggaran belanja;



2. Banyaknya alternatif atau usulan program menurut bidang pembangunan yang perlu dilaksanakan;
3. Kebutuhan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Dinas/Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

Solusi

Adapun solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan strategi yang lebih mengutamakan pada pencapaian sasaran program pembangunan dimana alokasinya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
2. Penanganan masalah-masalah khusus yang perlu segera ditangani serta menampung aspirasi masyarakat yang mendesak dan membutuhkan perhatian lebih dari Pemerintah Daerah.

III.5 PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Dalam melaksanakan amanahnya Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Pemerintah Kota Tangerang telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai. Berikut Prestasi dan penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kota Tangerang selama tahun 2017.

1. Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Kategori Lalu-Lintas, 31 Januari 2017
2. Penghargaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 23 Februari 2017.
3. Penghargaan Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2017, yang digelar di Convention Hall Hotel Harris, Sunset Road, Kuta, Bali, Jum'at (24/03). Kategori Digital Public Relations, Departement Public Relations, Media Relations, Media Internal untuk Kategori Cetak.



4. Penghargaan Recognition of Excellence atas keberhasilan Kota Tangerang dalam menerapkan Teknologi Informasi, dalam acara Indonesia Leadership OpenGov Forum yang dilaksanakan di Hotel Shangrila, Jakarta, Rabu (22/03).
5. Penghargaan iNew Maker Awards 2017 sebagai kepala daerah yang menerapkan Smart City atau Kota Pintar.
6. Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kesepuluh kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten, Rabu (31/05) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Banten, Serang. Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kesepuluh kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten, Rabu (31/05) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Banten, Serang.
7. Piagam Penghargaan Role Model Pelayanan Publik di Indonesia yang diselenggarakan oleh MenPANRB di Ruang Sebaguna Kantor Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Jumat (03/03).
8. Penghargaan Perencanaan Terbaik yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Tahun 2017, 10/4.
9. Penghargaan dari Menteri kesehatan Bagi PEMDA yang telah menerapkan PERDA/Kebijakan Lain dalam pengendalian konsumsi hasil tembakau di Jogjakarta, Rabu, 12 Juli 2017.
10. Penghargaan Jasa Dharma Bakti Koperasi dari Kementerian UKM dan Koperasi Republik Indonesia di Makasar, Senin (11/7).
11. Penghargaan Kepala Daerah Inovatif Tahun 2017 dari Koran Sindo di Jakarta, Selasa (01/08).
12. Penghargaan Adipura Kencana Tahun 2017 kategori kota Metropolitan di Jakarta, Rabu (02/08).
13. Penghargaan Lencana Melati Atas Kepedulian Gerakan Pramuka di kota, Jakarta, (14/8).
14. Penghargaan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional, Jakarta (16/08).
15. Penghargaan Best Communicator 2017 kategori Walikota dari Majalah PR Indonesia, Jumat, (25/08).
16. Penghargaan Icon Humas 2017 dari majalah PR Indonesia, Jumat (25/08).
17. Penghargaan Indeks Kondisi Keuangan Daerah T.A 2015 dari Universitas Gajah Mada (07/09).



18. BPI KPNPA Award atas kepuasan masyarakat terhadap kinerja, dedikasi dan kerja nyata dalam mengimplementasikan Nawacita Jokowi & Jk dari Badan Peneliti Independen kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Pengawas Anggara RI, Rabu (27/09).
19. Penghargaan Kota Layak Pemuda dari kementerian Pemuda dan Olahraga, Minggu (29/10).
20. Penghargaan Swasti Saba Wistara sebagai kota Sehat Tahun 2017 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Selasa (28/11).
21. Penghargaan Kepala Daerah Peduli PAUD dari Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Senin (20/11).
22. Penghargaan Smart City 2017 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk aplikasi e-Plesiran, Kamis (16/11).
23. Penghargaan Anugerah Pandu Negeri dengan predikat Pemerintah Daerah dengan Kinerja dan Tata Kelola Sangat Baik. Penghargaan dari Indonesian Institute Publik Governance (IIPG), Minggu (10/11).
24. Penghargaan Deraah Tertib Ukur Tahun 2017 untuk kategori kota besar dari kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Senin (4/12).
25. Entrepreneur Award dari Mark Plus, Rabu (06/12).
26. Penghargaan IRSA tahun 2017 untuk kategori Kota dengan Kepadatan Penduduk Tinggi dari ADIRA dan Majalah SWA, Kamis (07/12).
27. Badan Publik Terbaik tingkat Provinsi Banten dari KIP Banten, Kamis (07/12).
28. Penghargaan Indonesia Visionary Leader untuk Wali Kota Tangerang kategori Best In Information Technology oleh koran Sindo, (8/12).

BAB IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sebagaimana Bab sebelumnya dapat diketahui bahwa secara umum capaian kinerja masing-masing sasaran dalam kategori Sangat Tinggi. Meskipun belum seluruh indikator mencapai target yang telah ditetapkan, sebagian besar indikator dari sasaran strategis yang telah ditetapkan menunjukkan keberhasilan pencapaian dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Capaian kinerja pada tahun 2017 juga menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dari capaian tahun sebelumnya. Keberhasilan capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari keterlibatan pihak-pihak yang terkait, seperti halnya dalam rangka mencapai sasaran Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah pada indikator nilai SAKIP Kota Tangerang yang telah mencapai nilai B, untuk mencapai nilai yang lebih tinggi lagi memerlukan kerja sama yang intensif dan sinergis dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang telah memberikan asistensi dan konsultansi untuk pencapaian indikator tersebut.

Keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja telah dilakukan analisis dan evaluasi sehingga diketahui langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan dalam meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya. Demikian halnya koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait akan terus ditingkatkan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Tangerang yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tangerang yang menggambarkan Capaian Kinerja tiap-tiap Sasaran pada Tahun 2017 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Tangerang.

RENCANA STRATEGIS KOTA TANGERANG 2014 - 2018

Misi 1: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan professional

No.	Sasaran	Indikator Sasaran			Realisasi		Target		
		Uraian		Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.1.1	Terwujudnya penataan pertanahan	1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	77,15	80,01	83,00	85,99	88,97
		2	Persentase kasus tanah pemda/negara yang diselesaikan	% per tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1.2	Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1	Persentase penerbitan kartu keluarga	%	75,56	78,34	90,36	95,06	100,00
		2	Persentase penerbitan kartu tanda penduduk	%	95,68	75,09	99,76	99,88	100,00
		3	Persentase penerbitan kutipan akta kelahiran	%	18,85	48,11	72,15	84,40	100,00
		4	Persentase penerbitan kutipan akta kematian	%	77,35	69,54	90,36	95,06	100,00
		5	Persentase Pasangan Suami-Isteri Ber-Akta Nikah	%	15,24	36,49	66,47	86,19	100,00
1.1.3	Terwujudnya sistem dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Poin	2,92	2,86	2,90	2,96	3,00
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada SKPD pelayanan Publik	Poin	63,50	78,76	80,45	80,45	82,63
		3	Persentase Raperda yang disetujui DPRD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1.4	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	1	Jumlah pendapatan daerah	Rp. Triliun	3,02	3,38	3,15	3,63	3,72
		2	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)	Rp. Triliun	1,26	1,47	1,44	1,63	1,67
		3	Persentase pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	%	41,70	43,50	45,70	45,00	44,80

No.	Sasaran	Indikator Sasaran			Realisasi		Target		
		Uraian		Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.1.5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	1	Persentase Hasil temuan yang ditindak lanjuti	%	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
		2	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP/ WDP/ TMP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		3	Nilai evaluasi AKIP pemerintah daerah	A, BB, B, CC, C, D	CC	CC	CC	CC	B
		4	Persentase SKPD yang memiliki nilai "B" hasil evaluasi SAKIP	%			60,00	80,00	100,00
1.1.6	Terwujudnya aparatur yang profesional	1	Persentase Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) diatas 75	%			85,00	85,00	87,00
		2	Jumlah Pegawai yang terkena hukuman disiplin	Orang	18	16	6	6	6
1.1.7	Terwujudnya statistik dan persandian yang berkualitas	1	Persentase publikasi data statistik daerah berbasis website	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2	Persentase penggunaan persandian untuk pengamanan aplikasi	%			60,00	31,10	71,00
1.1.8	Terwujudnya perencanaan serta penelitian dan pengembangan pembangunan yang berkualitas	1	Persentase output kegiatan yang tercapai	%	74,47	89,34	91,05	92,00	93,00
		2	Persentase indikator sasaran yang tercapai	%	78,48	80,72	93,26	96,70	97,80
		3	Persentase Keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		5	Persentase Keselarasan Renja SKPD dan RKPD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		6	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir (RKPD)	%	54,50	60,14	64,00	65,90	68,89

No.	Sasaran	Indikator Sasaran			Realisasi		Target		
		Uraian		Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
		7	Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan strategis dalam perencanaan pembangunan	% per tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1.9	Terwujudnya kearsipan yang berkualitas	1	Percentase SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku	%	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
1.2.1	Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	1	Percentase penyediaan aplikasi perijinan online	%			5,41	54,10	100,00
		2	Percentase integrasi aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah	%	28,28	45,52	51,00	81,72	100,00

Misi 2: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi

No.	Sasaran	Indikator Sasaran			Realisasi		Target		
		Uraian		Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
2.1.1	Terwujudnya keberdayaan UMKM dan Koperasi sebagai pendukung perekonomian	1	Jumlah UMKM yang melakukan kegiatan usaha	Unit	10.079	10.281	10.553	10.600	10.700
		2	Percentase koperasi yang melakukan kegiatan usaha	%	63,70	68,10	66,30	68,00	69,00
2.1.2	Terwujudnya peningkatan investasi dan kemudahan perijinan	1	Jumlah penanaman modal (investasi)	Rp. Triliun	4,28	5,07	5,58	6,13	6,75
		2	Percentase perizinan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.3	Terwujudnya ketahanan pangan yang memadai dan berkualitas	1	Jumlah Cadangan Pangan	Ton			100,00	184,67	284,67
		2	Produksi padi	Kw	64.613	42.669	36.870	48.170	47.210
		3	Produksi sayuran	Kw	209.380	214.883	213.946	224.880	224.880
		4	Produksi Buah-buahan	Kw	48.395	20.668	62.253	75.195	78.943

No.	Sasaran	Indikator Sasaran			Realisasi		Target		
		Uraian		Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
2.1.4	Meningkatnya kepariwisataan	5	Produksi tanaman bio farmaka	kg	11.878	8.802	6.394	6.000	6.000
		6	Produksi Daging	Ton	49.909	66.071	26.389	26.916	27.454
2.1.5	Terwujudnya perdagangan yang berkualitas serta peningkatan perlindungan konsumen	1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	381.265	337.678	34.612	354.773	363.642
		2	Rata-rata lama kunjungan wisatawan (Rata-rata lama menginap di hotel)	Hari	1,33	1,55	1,75	1,95	2,15
2.1.6	Terwujudnya industri yang maju	1	Persentase Alat Ukur yang terstandar	%			2,27	46,20	65,00
		2	Persentase pasar tradisional yang bersih	%	93,55	96,77	96,77	96,88	100,00
3.1.6	Terwujudnya industri yang maju	1	Persentase industri yang memiliki standar	%	36,35	45,72	52,72	59,72	66,72
		2	Nilai PDRB sektor industri (ADHK)	Rp Miliar	34.468,97	35.638,73	37.460,57	38.931,05	40.967,26
		3	Persentase IKM memiliki produk sertifikasi halal	%	11,66	13,41	15,28	16,58	17,88

Misi 3: Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi

No.	Sasaran	Indikator Sasaran			Realisasi		Target		
		Uraian		Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
3.1.1	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	1	Indeks pendidikan	Point	69,71	69,83	70,04	70,25	70,45
		2	Harapan lama sekolah	Tahun	12,86	12,90	12,94	12,99	13,03
		3	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,20	10,20	10,23	10,25	10,28
		4	Angka melek huruf penduduk usia >15 tahun	(%)	98,50	98,51	98,74	98,77	98,80
3.1.2		1	Indeks kesehatan	Point	78,60	78,91	78,98	79,04	79,11

No.	Sasaran	Indikator Sasaran		Realisasi		Target			
		Uraian	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	
3.1.3	Meningkatnya aksesibilitas kesehatan	2	Angka harapan hidup	Tahun	71,09	71,29	71,33	71,38	71,42
		3	Jumlah Kematian Ibu	Orang	13	20	19	5	4
		4	Jumlah Kematian Bayi	Orang	132	120	87	78	64
		5	Prevalensi Penyakit (Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru Tuberkolosis)	%	45,62	54,87	65,02	70,00	75,02
		6	Presentase balita gizi buruk (BB/TB)	%	0,12	0,16	0,10	0,09	0,08
3.1.4	Terwujudnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1	Indeks pembangunan gender	Point	93,90	94,03	94,15	94,27	94,39
		2	Indeks pemberdayaan gender	Point	71,40	71,90	72,40	72,90	73,40
		3	Jumlah kekerasan terhadap anak	Orang	64	73	76	74	72
3.1.5	Terwujudnya keluarga sejahtera melalui keluarga berencana	1	Persentase pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif	%	73,02	77,91	74,42	76,52	77,64
		2	Persentase posyandu yang melaksanakan kegiatan sebulan sekali	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1.6	Terwujudnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja	1	Persentase penurunan PMKS	%	3,36	3,71	3,70	3,11	2,97
		2	Persentase Penanganan PMKS	%	16,67	40,00	60,00	80,00	100,00
3.1.7	Terwujudnya peningkatan pengelolaan dan pelestarian kebudayaan daerah	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,81	8,01	7,48	7,27	7,06
		2	Jumlah lowongan kerja	Orang	13.290	14.312	15.902	16.312	17.312
3.1.8	Terwujudnya kepemudaan dan	1	Persentase pelestarian cagar budaya daerah	%	56,25	66,67	81,25	93,75	100,00
		2	Jumlah pagelaran budaya kota.	Kegiatan	8	12	16	17	18

No.	Sasaran	Indikator Sasaran			Realisasi		Target		
		Uraian		Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	keolahragaan yang mandiri dan berprestasi	2	Persentase organisasi olahraga yang memiliki sertifikat standar mutu oraganisasi keolahragaan	%	0,00	25,00	50,00	75,00	100,00
		3	Jumlah atlet berprestasi tingkat Provinsi	orang	281	93	109	85	367
3.1.9	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepoltikan dan hukum	1	Persentase penyelesaian konflik Suku, Agama, Ras dan Adat (SARA)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2	Persentase penyelesaian penegakan perda	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1.10	Terwujudnya peningkatan keberdayaan masyarakat	1	Persentase kelompok masyarakat aktif	%	26,96	42,02	62,52	81,26	100,00
3.1.11	Terwujudnya peningkatan kesadaran dan kegemaran membaca masyarakat	1	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah	Orang	9.047	11.488	28.744	31.619	46.970

Misi 4: Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas

No.	Sasaran	Indikator Sasaran			Realisasi		Target		
		Uraian		Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
4.1.1	Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan	1	Luas genangan dan banjir	Ha	245	240	235	230	225
4.2.1	Terwujudnya jaringan jalan dan sarana pendukungnya yang mantap	1	Persentase kondisi jalan kota yang mantap	%	99,79	99,79	99,87	99,93	99,96
		2	Persentase keterhubungan pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat produksi di wilayah kota	%	92,21	95,64	96,26	99,49	100,00

No.	Sasaran	Indikator Sasaran			Realisasi		Target		
		Uraian		Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
4.2.2	Terwujudnya pelayanan transportasi perkotaan terpadu	1	Persentase kemacetan yang tertangani	%	75,00	79,00	89,00	93,00	100,00
		2	Jumlah koridor angkutan umum masal yang beroperasi	Koridor	0	0	1	1	2

Misi 5: Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman

No.	Sasaran	Indikator Sasaran			Realisasi		Target		
		Uraian		Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
5.1.1	Terwujudnya peningkatan penanggulangan bencana	1	Persentase penanggulangan bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2	Jumlah penanganan korban bencana	Orang	8.058	6.715	5.839	4.963	3.971
5.1.2	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak	1	Backlog rumah	%	5,25	5,18	4,93	2,26	1,98
		2	Persentase rumah layak huni	%	98,38	98,40	98,80	99,42	99,43
		3	Luas lingkungan permukiman kumuh	Ha	358,29	350,32	339,87	54,87	38,21
		4	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih	%	58,09	64,60	97,90	98,01	98,13
		5	Persentase penduduk yang terlayani jaringan air limbah	%	32,00	38,30	44,20	48,97	50,75
5.1.3	Terwujudnya penataan ruang wilayah yang berkualitas	1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Sasaran	Indikator Sasaran			Realisasi		Target		
		Uraian		Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
5.1.4	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	U,SB,B,C,K,SK,W	W	W	W	SK	K
		2	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	56,87	56,88	57,02	57,04	57,10
		3	Persentase pengurangan sampah di perkotaan	%	18,98	19,64	20,23	20,27	20,46

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017

Misi 1 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan professional

No.	Sasaran	Indikator Sasaran			Target
		Uraian		Satuan	
1.1.1	Terwujudnya penataan pertanahan	1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	85,99
		2	Persentase kasus tanah pemda/negara yang diselesaikan	% per tahun	100,00
1.1.2	Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1	Persentase penerbitan kartu keluarga	%	95,06
		2	Persentase penerbitan kartu tanda penduduk	%	99,88
		3	Persentase penerbitan kutipan akta kelahiran	%	84,40
		4	Persentase penerbitan kutipan akta kematian	%	95,06
		5	Persentase Pasangan Suami-Isteri Ber-Akta Nikah	%	86,19
1.1.3	Terwujudnya sistem dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Poin	2,96
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada SKPD pelayanan Publik	Poin	80,45
		3	Persentase Raperda yang disetujui DPRD	%	100,00
1.1.4	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	1	Jumlah pendapatan daerah	Rp. Triliun	3,63
		2	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)	Rp. Triliun	1,63
		3	Persentase pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	%	45,00
1.1.5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	1	Persentase Hasil temuan yang ditindak lanjuti	%	80,00
		2	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP/ WDP/ TMP	WTP
		3	Nilai evaluasi AKIP pemerintah daerah	A, BB, B, CC, C, D	CC
		4	Persentase SKPD yang memiliki nilai "B" hasil evaluasi SAKIP	%	80,00
1.1.6	Terwujudnya aparatur yang profesional	1	Persentase Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) diatas 75	%	85,00

No.	Sasaran	Indikator Sasaran			Target
		Uraian		Satuan	
		2	Jumlah Pegawai yang terkena hukuman disiplin	Orang	6
1.1.7	Terwujudnya statistik dan persandian yang berkualitas	1	Percentase publikasi data statistik daerah berbasis website	%	100,00
		2	Percentase penggunaan persandian untuk pengamanan aplikasi	%	71,00
1.1.8	Terwujudnya perencanaan serta penelitian dan pengembangan pembangunan yang berkualitas	1	Percentase output kegiatan yang tercapai	%	92,00
		2	Percentase indikator sasaran yang tercapai	%	96,70
		3	Percentase Keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD	%	100,00
		4	Percentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	100,00
		5	Percentase Keselarasan Renja SKPD dan RKPD	%	100,00
		6	Percentase Usulan Masyarakat yang diakomodir (RKPD)	%	65,90
		7	Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan strategis dalam perencanaan pembangunan	% per tahun	100,00
1.1.9	Terwujudnya kearsipan yang berkualitas	1	Percentase SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku	%	80,00
1.2.1	Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	1	Percentase penyediaan aplikasi perijinan online	%	54,10
		2	Percentase integrasi aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah	%	81,72

Misi 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi

No.	Sasaran	Indikator Sasaran			Target
		Uraian		Satuan	
2.1.1	Terwujudnya keberdayaan UMKM dan Koperasi sebagai pendukung perekonomian	1	Jumlah UMKM yang melakukan kegiatan usaha	Unit	10.600
		2	Percentase koperasi yang melakukan kegiatan usaha	%	68,00
2.1.2	Terwujudnya peningkatan investasi dan kemudahan perijinan	1	Jumlah penanaman modal (investasi)	Rp. Triliun	6,13
		2	Percentase perizinan tepat waktu	%	100,00
2.1.3		1	Jumlah Cadangan Pangan	Ton	184,67

No.	Sasaran	Indikator Sasaran			Target			
		Uraian		Satuan				
	Terwujudnya ketahanan pangan yang memadai dan berkualitas	2	Produksi padi	Kw	48.170			
		3	Produksi sayuran	Kw	224.880			
		4	Produksi Buah-buahan	Kw	75.195			
		5	Produksi tanaman bio farmaka	kg	6.000			
		6	Produksi Daging	Ton	26.916			
		2.1.4	Meningkatnya kepariwisataan	1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	354.773	
				2	Rata-rata lama kunjungan wisatawan (Rata-rata lama menginap di hotel)	Hari	1,95	
				1	Persentase Alat Ukur yang terstandar	%	46,20	
	Terwujudnya perdagangan yang berkualitas serta peningkatan perlindungan konsumen			2	Persentase pasar tradisional yang bersih	%	96,88	
				1	Persentase industri yang memiliki standar	%	59,72	
				2	Nilai PDRB sektor industri (ADHK)	Rp Milyar	38.931,05	
				3	Persentase IKM memiliki produk sertifikasi halal	%	16,58	

Misi 3 : Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi

No.	Sasaran	Indikator Sasaran			Target
		Uraian		Satuan	
3.1.1	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	1	Indeks pendidikan	Point	70,25
		2	Harapan lama sekolah	Tahun	12,99
		3	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,25
		4	Angka melek huruf penduduk usia >15 tahun	(%)	98,77
3.1.2	Meningkatnya aksesibilitas kesehatan	1	Indeks kesehatan	Point	79,04
		2	Angka harapan hidup	Tahun	71,38
		3	Jumlah Kematian Ibu	Orang	5
		4	Jumlah Kematian Bayi	Orang	78
		5	Prevalensi Penyakit (Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru Tuberkolosis)	%	70,00
		6	Presentase balita gizi buruk (BB/TB)	%	0,09
3.1.3		1	Indeks pembangunan gender	Point	94,27

No.	Sasaran	Indikator Sasaran			Target
		Uraian		Satuan	
	Terwujudnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2	Indeks pemberdayaan gender	Point	72,90
		3	Jumlah kekerasan terhadap anak	Orang	74
3.1.4	Terwujudnya keluarga sejahtera melalui keluarga berencana	1	Persentase pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif	%	76,52
		2	Persentase posyandu yang melaksanakan kegiatan sebulan sekali	%	100,00
3.1.5	Terwujudnya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial	1	Persentase penurunan PMKS	%	3,11
		2	Persentase Penanganan PMKS	%	80,00
3.1.6	Terwujudnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,27
		2	Jumlah lowongan kerja	Orang	16.312
3.1.7	Terwujudnya peningkatan pengelolaan dan pelestarian kebudayaan daerah	1	Persentase pelestarian cagar budaya daerah	%	93,75
		2	Jumlah pagelaran budaya kota.	Kegiatan	17
3.1.8	Terwujudnya kepemudaan dan keolahragaan yang mandiri dan berprestasi	1	Persentase organisasi pemuda yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi kepemudaan	%	100,00
		2	Persentase organisasi olahraga yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi keolahragaan	%	75,00
		3	Jumlah atlet berprestasi tingkat Provinsi	orang	85
3.1.9	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepolitikan dan hukum	1	Persentase penyelesaian konflik Suku, Agama, Ras dan Adat (SARA)	%	100,00
		2	Persentase penyelesaian penegakan perda	%	100,00
3.1.10	Terwujudnya peningkatan keberdayaan masyarakat	1	Persentase kelompok masyarakat aktif	%	81,26
3.1.11	Terwujudnya peningkatan kesadaran dan kegemaran membaca masyarakat	1	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah	Orang	31.619

Misi 4 : Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas

No.	Sasaran	Indikator Sasaran			Target
		Uraian		Satuan	
4.1.1	Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan	1	Luas genangan dan banjir	Ha	230
4.2.1	Terwujudnya jaringan jalan dan sarana pendukungnya yang mantap	1	Persentase kondisi jalan kota yang mantap	%	99,93
		2	Persentase keterhubungan pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat produksi di wilayah kota	%	99,49
4.2.2	Terwujudnya pelayanan tansportasi perkotaan terpadu	1	Persentase kemacetan yang tertangani	%	93,00
		2	Jumlah koridor angkutan umum masal yang beroperasi	Koridor	1

Misi 5 : Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman

No.	Sasaran	Indikator Sasaran			Target
		Uraian		Satuan	
5.1.1	Terwujudnya peningkatan penanggulangan bencana	1	Persentase penanggulan bencana	%	100,00
		2	Jumlah penanganan korban bencana	Orang	4.963
5.1.2	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak	1	Backlog rumah	%	2,26
		2	Persentase rumah layak huni	%	99,42
		3	Luas lingkungan permukiman kumuh	Ha	54,87
		4	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih	%	98,01
		5	Persentase penduduk yang terlayani jaringan air limbah	%	48,97
5.1.3	Terwujudnya penataan ruang wilayah yang berkualitas	1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	100,00
5.1.4	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	U,SB,B,C,K,SK,W	SK
		2	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	57,04
		3	Persentase pengurangan sampah di perkotaan	%	20,27

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KOTA TANGERANG

Misi 1: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan professional

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
1	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)	Rp. Triliun	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD) yang diterima oleh Pemerintah Kota Tangerang.	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) dan Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP/ WDP/ TMP	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD)	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
		Nilai evaluasi AKIP pemerintah daerah	A, BB, B, CC, C, D	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kota Tangerang	Sekretariat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Kota Tangerang diukur sesuai dengan Permenpan No. 25/2012 tentang Pedoman atas Implementasi SAKIP serta perubahannya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
3	Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	Persentase integrasi aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah	%	Jumlah sistem informasi dan aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah terintegrasi dibagi Jumlah sistem informasi dan aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang ada	Dinas Komunikasi dan Informatika	Integrasi sistem merupakan proses membangun suatu kesatuan sistem informasi dari komponen-komponen perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan yang berbeda

Misi 2: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
4	Terwujudnya peningkatan investasi dan kemudahan perijinan	Jumlah penanaman modal (investasi)	Rp. Triliun	Jumlah nilai penanaman modal (investasi) PMA dan PMDN	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP)	
		Persentase perizinan tepat waktu	%	Jumlah perijinan yang diterbitkan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku dibagi Jumlah permohonan perijinan yang memenuhi syarat lengkap sesuai peraturan berlaku	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP)	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) menargetkan seluruh pelayanan izin sesuai waktu sehingga target yang harus dicapai adalah 100%
5	Meningkatnya kepariwisataan	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Tangerang	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Kunjungan Wisatawan terdiri dari Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
		Rata-rata lama kunjungan wisatawan (Rata-rata lama menginap di hotel)	Hari	Jumlah lamanya hari tamu yang menginap di hotel (hari) dibagi Jumlah tamu yang menginap di hotel (orang)	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	
6	Terwujudnya industri yang maju	Nilai PDRB sektor industri (ADHK)	Rp. Milyar	Nilai PDRB Atas Harga Konstan 2010 pada sektor industri pengolahan	BPS, Dinas Perindustrian dan, Perdagangan	Sektor industri pengolahan merupakan lapangan usaha terbesar yang berperan dalam perekonomian Kota Tangerang.

Misi 3: Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
7	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	Indeks pendidikan	Point	Indeks pendidikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indeks Pendidikan atau Indeks Pengetahuan adalah penggabungan dua indikator pendidikan, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
8	Meningkatnya aksesibilitas kesehatan	Indeks kesehatan	Point	Indeks Kesehatan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	BPS, Dinas Kesehatan	Indeks Kesehatan atau Indeks harapan hidup didapat dari angka harapan hidup, digunakan untuk mengukur pembangunan di bidang kesehatan. Meningkatnya angka harapan hidup dapat berarti adanya perbaikan pembangunan di bidang kesehatan
9	Terwujudnya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial	Percentase penurunan PMKS	%	Jumlah PMKS tahun n dikurang Jumlah PMKS tahun n-1 dibagi Jumlah PMKS tahun n-1 kali 100 persen	Dinas Sosial	Berdasarkan Permensos RI No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
		Percentase penduduk miskin	%	Jumlah penduduk miskin (berdasarkan garis kemiskinan) dibagi jumlah penduduk Kota Tangerang kali 100 persen	BPS, Dinas Sosial	Garis Kemiskinan Kota Tangerang sebesar Rp455.228 per kapita/bulan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
10	Terwujudnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	Jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan dibagi jumlah angkatan kerja kali 100 persen	BPS, Dinas Ketenagakerjaan	Angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan adalah mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah berkerja, atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja
11	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepolitikan dan hukum	Persentase penyelesaian konflik Suku, Agama, Ras dan Adat (SARA)	%	Jumlah penyelesaian konflik SARA yang difasilitasi dibagi Jumlah konflik SARA yang terjadi	Kantor Kesbang dan Politik Dalam Negeri	

Misi 4: Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
12	Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan	Luas genangan dan Banjir	Ha	Luas genangan dan banjir di wilayah Kota Tangerang	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya air	Penanganan banjir sampai tuntas sehingga luas genangan dan banjir di wilayah Kota Tangerang akan berkurang
13	Terwujudnya pelayanan transportasi perkotaan terpadu	Persentase kemacetan yang tertangani	%	Jumlah titik kemacetan yang ditangani dibagi jumlah titik kemacetan di ruas jalan Kota Tangerang kali 100 persen	Dinas Perhubungan	Semakin banyak titik kemacetan yang tertangani maka kondisi lalu lintas semakin lancar

Misi 5: Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
14	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak	Persentase rumah layak huni	%	Jumlah rumah layak huni dibagi Total jumlah rumah yang ada	Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang	Permendagri 54 Tahun 2010
15	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	(U, SB, B, C, K, SK, W)	Nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Badan Lingkungan Hidup	ukuran utama untuk Sasaran Pokok Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019 dan RPJMD Kota Tangerang 2014-2018

PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2017

Misi 1 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan professional

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)	Rp. Triliun	1,633
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP/ WDP/ TMP	WTP
		Nilai evaluasi AKIP pemerintah daerah	A, BB, B, CC, C, D	CC
3	Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	Persentase integrasi aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah	%	81,72

Misi 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
4	Terwujudnya peningkatan investasi dan kemudahan perijinan	Jumlah penanaman modal (investasi)	Rp. Triliun	6,13
		Persentase perizinan tepat waktu	%	100,00
5	Meningkatnya kepariwisataan	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	354.773
		Rata-rata lama kunjungan wisatawan (Rata-rata lama menginap di hotel)	Hari	1,95
6	Terwujudnya industri yang maju	Nilai PDRB sektor industri (ADHK)	Rp Miliar	38.931,05

Misi 3 : Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
7	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	Indeks pendidikan	Point	70,25
8	Meningkatnya aksesibilitas kesehatan	Indeks kesehatan	Point	79,04
9	Terwujudnya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial	Persentase penurunan PMKS	%	3,11
		Persentase penduduk miskin	%	4,78
10	Terwujudnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,27
11	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepoltikan dan hukum	Persentase penyelesaian konflik Suku, Agama, Ras dan Adat (SARA)	%	100,00

Misi 4 : Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
12	Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan	Luas genangan dan Banjir	Ha	230
13	Terwujudnya pelayanan tansportasi perkotaan terpadu	Persentase kemacetan yang tertangani	%	93,00

Misi 5 : Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
14	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak	Persentase rumah layak huni	%	99,42
15	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	(U, SB, B, C, K, SK, W)	SK

PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

KOTA TANGERANG TAHUN 2017

Misi 1 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan professional

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			2017			2018	
				2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	Target	%
1	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	1 Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)	Rp. Triliun	1,26	1,47	1,59	1,63	1,86	113,90	1,67	111,58
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	2 Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP/ WDP/ TMP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	WTP	100,00
		3 Nilai evaluasi AKIP pemerintah daerah		A, BB, B, CC, C, D	CC	CC	CC	B	133,33	B	100,00
3	Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	4 Persentase integrasi aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah	%	28,28	45,52	71,00	81,72	86,67	106,06	100,00	86,67

Misi 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			2017			2018	
				2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	Target	%
4	Terwujudnya peningkatan investasi dan kemudahan perijinan	5	Jumlah penanaman modal (investasi)	Rp. Triliun	4,28	5,07	6,86	6,13	7,68	125,29	6,75
		6	Persentase perizinan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Meningkatnya kepariwisataan	7	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	478.715	500.493	536.963	354.773	1.088.700	306,87	540.000
		8	Rata-rata lama kunjungan wisatawan (Rata-rata lama menginap di hotel)	Hari	1,33	1,55	1,80	1,95	1,96	100,51	2,15
6	Terwujudnya industri yang maju	9	Nilai PDRB sektor industri (ADHK)	Rp Miliar	34.007,79	35.049,96	36.037,67	37.460,57	36.037,67	96,20	40.967,26
											87,97

Misi 3 : Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			2017			2018	
				2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	Target	%
7	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	10	Indeks pendidikan	Point	69,71	69,80	71,52	70,04	71,52	102,11	70,45
8	Meningkatnya aksesibilitas kesehatan	11	Indeks kesehatan	Point	78,60	78,85	78,98	78,98	78,98	100,00	79,11
											99,84

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			2017		2018			
				2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	Target	%	
9	Terwujudnya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial	12	Persentase penurunan PMKS	%	3,36	3,71	3,90	3,11	3,11	100,00	2,97	95,29
		13	Persentase penduduk miskin	%	4,91	5,04	4,94	4,94	4,94	100,00	4,66	93,99
10	Terwujudnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja	14	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,81	8,01	7,00	7,27	7,16	101,51	7,06	98,58
11	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepolitikan dan hukum	15	Persentase penyelesaian konflik Suku, Agama, Ras dan Adat (SARA)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Misi 4 : Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			2017		2018			
				2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	Target	%	
12	Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan	16	Luas genangan dan Banjir	Ha	245	240	235	230	230	100,00	225	97,78
13	Terwujudnya pelayanan transportasi perkotaan terpadu	17	Persentase kemacetan yang tertangani	%	75,00	79,00	89,00	93,00	95,12	102,28	100,00	95,12

Misi 5 : Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			2017		2018			
				2014	2015	2016	Target	Realisasi	%	Target	%	
14	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak	18	Persentase rumah layak huni	%	98,38	98,40	98,80	99,42	99,42	100,00	99,43	99,99
15	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	(U, SB, B, C, K, SK, W)	W	W	W	SK	SK	100,00	K	66,67